



LKIP 2021

BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten



<https://bptd8banten.dephub.go.id/>

 bptd.banten

 bptd.8banten

 @bptd8banten_

DAFTAR ISI

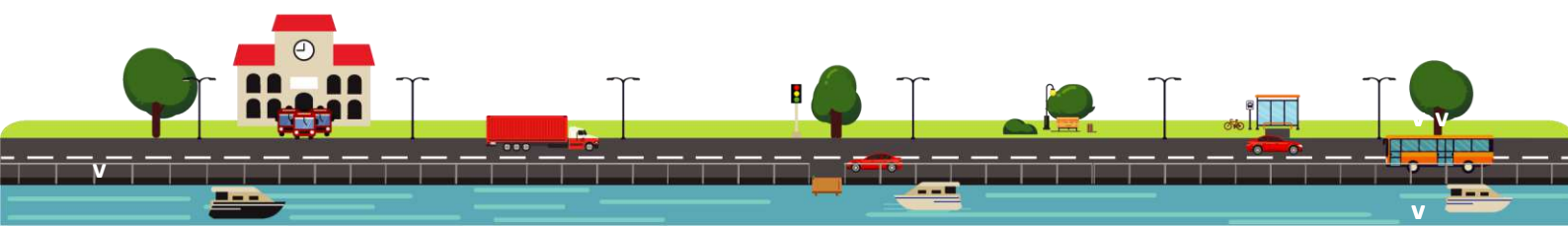
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-2
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	I-6
I.3 Sumber Daya Manusia.....	I-8
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-8
I.5 Sistematika Laporan.....	I-10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	II-19
II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	II-21
II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	II-21
II.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021	II-22
II.2.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021	II-22
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	III-23
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	III-24
A. SK1	III-28
KK1.1	III-
IKK1.2	III-
KK1.3	III-
IKK1.4	III-
IKK1.5	III-
IKK1.6	III-
B. SK2	III-
IKK2.1	III-
IKK2.2	III-
IKK2.3	III-
C. SK4	III-
IKK3.1	III-
IKK3.2	III-
IKK3.3	III-
IKK3.4	III-
IKK3.5	III-
IKK3.6	III-
IKK7a.....	III-
IKK7b	III-
D. SK5	III-
IKK5.1	III-
E. SK1	III-
IKK1	III-



III.3 Realisasi Anggaran.....	III-
III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2020	III-
III.3.1.1 Pagu Anggaran	III-
A.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2021.....	III-
A.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2021.....	III-
A.3 Uraian Surat Pengasahan Revisi Anggaran	III-
III.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2021	III-
A.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021	III-
A.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2021	III-
A.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2021	III-
A.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021..	III-
III.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2021	III-
III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	III-
III.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021...	III-
III.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021	III-
III.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021	III-
III.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	III-
III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-
III.3.4 Hambatan dan Kendala.....	III-

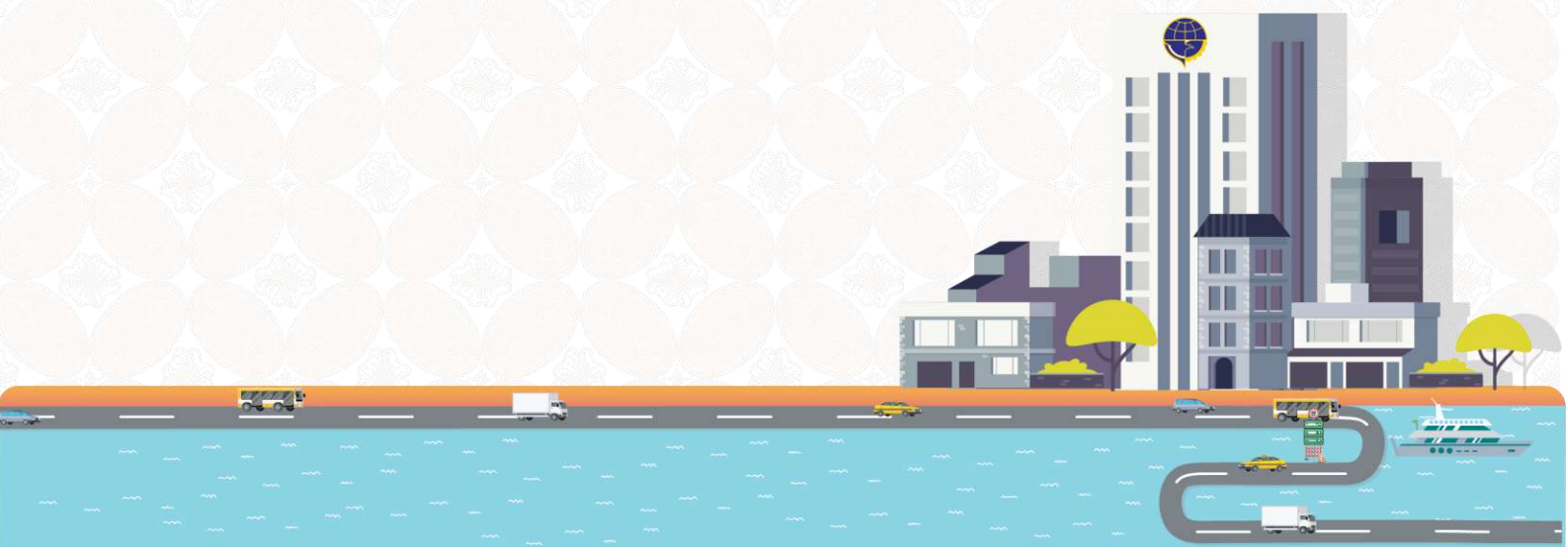
BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup.....	IV-61
IV.1.1 Ringkasan Capaian	IV-61
IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab	IV-61



I. 1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit kerja teknis dari Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dibentuk pada Tahun 2017 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No : PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi PM 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai suatu instansi Perhubungan di daerah juga dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.



I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- 2) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- 3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
- 4) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, dan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan



nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C;

Susunan Organisasi BPTD Tipe A terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Tipe B terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi BPTD Tipe C terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Transportasi Jalan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;

4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

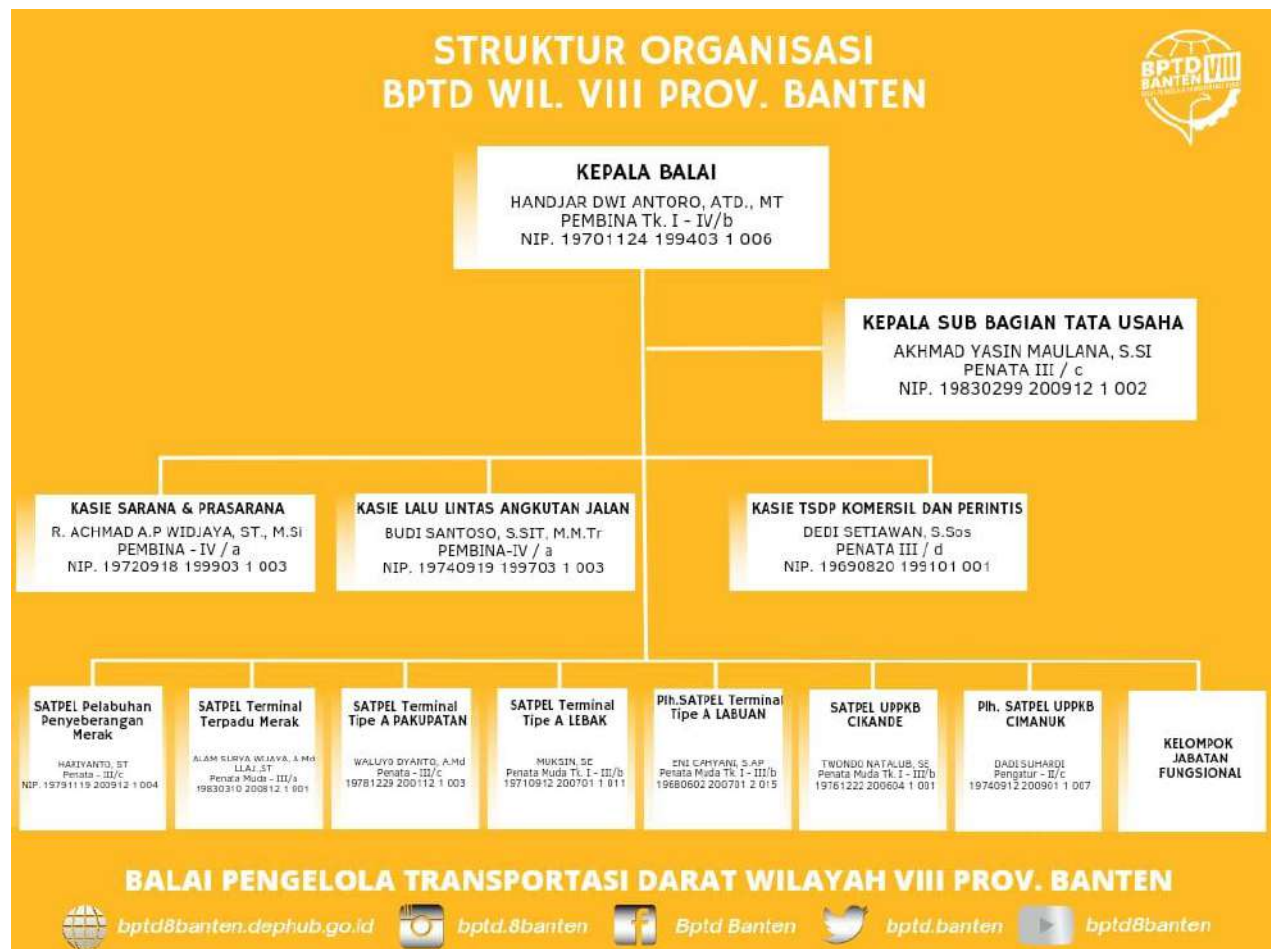
25 Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPTD Wil. I Aceh
2. BPTD Wil. II Sumut
3. BPTD Wil. III Sumbar
4. BPTD Wil. IV Riau dan Kepri
5. BPTD Wil. V Jambi
6. BPTD Wil. VI Bengkulu dan Lampung
7. BPTD Wil. VII Sumsel dan Babel
8. BPTD Wil. VIII Banten
9. BPTD Wil. IX Jabar
10. BPTD Wil. X Jateng dan DIY
11. BPTD Wil. XI Jatim
12. BPTD Wil. XII Bali dan NTB
13. BPTD Wil. XIII NTT
14. BPTD Wil. XIV Kalbar
15. BPTD Wil. XV Kalsel
16. BPTD Wil. XVI Kalteng
17. BPTD Wil. XVII Kaltim dan Kaltara
18. BPTD Wil. XVIII Sultra
19. BPTD Wil. XIX Sulsel dan Sulbar
20. BPTD Wil. XX Sulteng
21. BPTD Wil. XXI Gorontalo
22. BPTD Wil. XXII Sulut
23. BPTD Wil. XXIII Maluku
24. BPTD Wil. XXIV Maluku Utara
25. BPTD Wil. XXV Papua dan Papua Barat.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten merupakan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A yang susunan organisasinya terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis serta Anggota Jabatan Fungsional.



Bagan Struktur Organisasi



I.2.1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

I.2.2. Seksi Sarana Dan Prasarana Transportasi Jalan

Seksi Saran dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

I.2.3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

I.2.4. Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Seksi Transpotasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan tarif dan



penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

I. 3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menaungi sebanyak Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	UNIT KERJA	PNS	PPNPN	JUMLAH	TENAGA KESEHATAN	TOTAL
1	Kantor Induk	23	55	78	2	80
2	Satpel Pelabuhan	4	39	43	0	43
3	Satpel Terminal Merak	5	57	62	1	63
4	Satpel Terminal Pakupatan	4	63	67	1	68
5	Satpel Terminal Labuan	3	30	33	0	33
6	Satpel Terminal Lebak	3	25	28	0	28
7	Satpel UPPKB Cimanuk	1	9	10	0	10
8	Satpel UPPKB Cikande	1	17	18	0	18
TOTAL		44	295	339	4	343

I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. *PM No. 122 Tahun 2018*

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPLJSKB dan BPTD).

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki wilayah kerja 2 Provinsi.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);



3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2019 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I. 5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - **Bagan Struktur Organisasi**
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - **Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021**

II.3 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- **Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021**
- **Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

A. **SK1**

- **Uraian Sasaran Program**

A.1. IKK1.1

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.2. IKK1.2

A.2.1. Definisi Indikator Kinerja

A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.2. IKK1.3

A.2.1. Definisi Indikator Kinerja

A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan



- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.2. IKK1.4

- A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.2. IKK1.5

- A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.2. IKK1.6

- A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B. **SK2**

• **Uraian Sasaran Program**

B.1. IKK2.1

B.1.1. Definisi Indikator Kinerja

B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

B.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B.2. IKK2.2

B.2.1. Definisi Indikator Kinerja

B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B.3. IKK2.3

B.3.1. Definisi Indikator Kinerja

B.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

B.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020



B.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C. **SK4**

• **Uraian Sasaran Program**

C.1. IKK3.1

C.1.1. Definisi Indikator Kinerja

C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

C.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C.2. IKK3.2.....

C.2.1. Definisi Indikator Kinerja

C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C.2. IKK3.3.....

C.2.1. Definisi Indikator Kinerja

C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C.2. IKK3.4.....

C.2.1. Definisi Indikator Kinerja

C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C.2. IKK3.5.....

C.2.1. Definisi Indikator Kinerja

C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C.2. IKK3.6.....

C.2.1. Definisi Indikator Kinerja

C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024



C.2. IKK7a.....

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C.2. IKK7b.....

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

D. SK5

• Uraian Sasaran Program

D.2. IKK5.1.....

- D.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- D.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- D.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- D.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- D.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- D.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

E. SK1

- **Uraian Sasaran Program**

E.2. IKK1.....

E.2.1. Definisi Indikator Kinerja

E.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

E.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

E.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

E.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

E.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

- **Pagu Anggaran**
- **Rincian Per Sumber Dana Tahun 2021**
- **Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2021**
- **Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran**
- **Refocusing Anggaran Tahun 2021**
- **Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021**
- **Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2021**
- **Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2021**
- **Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021**
- **Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 - 2021**

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021

- **Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021**
- **Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021**
- **Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021**
- **Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja**

III.3.3. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

Lampiran



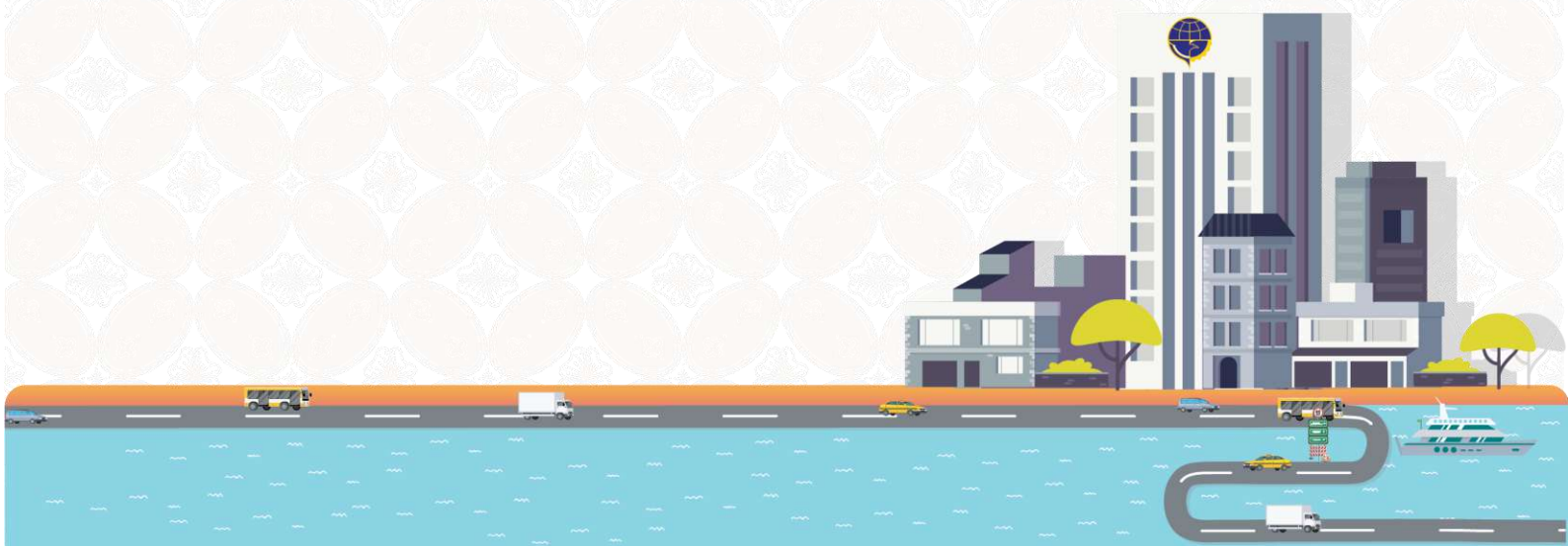
1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
3. Rencana Aksi Tahun 2021;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2021;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2021;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2021;
9. Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah Tahun 2020;
10. Draft Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah Tahun 2021;
11. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021;
12. Lain – lain yang dianggap perlu.

II.1

URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

II. 1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.



Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	KK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			KK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
			KK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
			KK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			KK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
			KK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	KK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
			KK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
			KK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	KK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
			KK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90
			KK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	14
			KK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			KK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0
			KK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	0

			KK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			KK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	KK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	KK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Renapan kinerja merupakan dokumen yang berisi tentang kegiatan beserta target yang harus di capai dalam 1 tahun .Rencana Kinerja pada tahun 2021 menyesuaikan dengan isi yang tercantum pada Renstra 2020-2024. Terdapat 5 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja. Target di sesuaikan dengan Renstra 2020-2024 dan dilaksanakan sesuai Rencana aksi jika terdapat kegiatan yang tertunda akan di laksanakan saat hambatan sudah teratasi.

II. 2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 69.403.690.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	KK1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	100
			KK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0

			KK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
			KK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			KK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
			KK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	KK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
			KK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
			KK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	KK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
			KK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90
			KK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	14
			KK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			KK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0
			KK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	0
			KK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			KK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	KK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	KK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

II.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021

Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten mengalami revisi pada bulan April dikarenakan terdapat pergantian Kepala Balai selaku Pihak Pertama yang bertanda tangan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

II.2.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021

Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten mengalami revisi kedua pada bulan Juli karena indikator kegiatan yang terdapat di dokumen perjanjian kinerja tidak sesuai dengan indikator kegiatan yang ada di rentra sehingga dilakukan harmonisasi terkait indikator kegiatan yang ada dalam renstra dan di dokumen perjanjian kinerja.

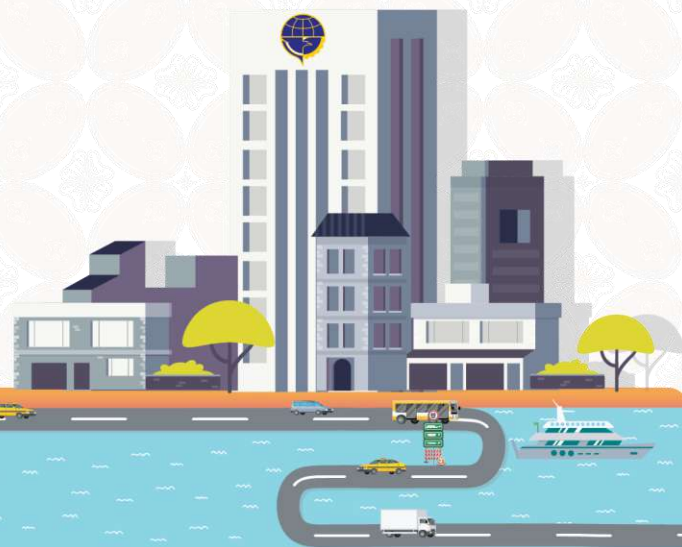
II. 1.	Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	19
II. 2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	21



III.1

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



III. 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

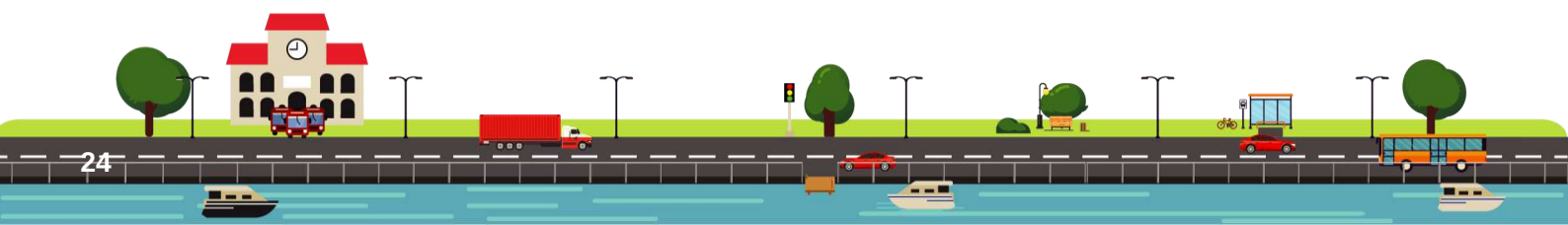
Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2020

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2020 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.



Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SAT UAN	TAR GET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						100 %			100 %			100 %			
IKK 1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	24,9	24,9	100 %	49,8	49,8	100 %	74,7	74,7	100 %	100%	100%	100 %
IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	4	1	1	100 %	2	2	100 %	3	3	100 %	4	4	100 %
IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 1.5	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	1	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat						100 %			100 %		100%				100 %
IKK 2.1	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 2.2	Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	30	30	100 %	60	60	100 %	90	90	100 %	100	100	100 %
SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi						100 %			100 %		100%				100 %
IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	22,5	22,5	100 %	45	45	40 %	67,5	67,5	100 %	90	90	100 %
IKK 3.2	Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90	22,5	22,5	100 %	45	45	0	67,5	67,5	100 %	90	90	100 %
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOOS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	14	0	0	0	0	0	0	14	14	100 %	14	14	100 %
IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Penguji Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	14,3	14,3	100%	14,3	14,3	100%	42,9	42,9	100%	100	100	100%
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	100	100	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%			100%		100%				100%
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	22,5	22,5	100%	45	45	100%	67,5	67,5	100%	90	90	100%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100%			100%		100%				100%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	22,5	22,5	100%	45	45	100%	67,5	67,5	100%	90	90	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100%			100%			100%			100%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						100%			100%			100%			100%

Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP ≥ 100%)	9				
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0% ≤ IKP < 100%)	10				



Selama tahun 2021, ada 3 Sasaran Kegiatan (SP) dan di dalamnya ada 7 IKP Balai Pengelola Transportasi Darat. Penjelasan capaian IKP untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menggunakan 6 (Enam) IKK, yaitu:

- IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
- IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda
- IKK 1.3 Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi
- IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
- IKK 1.5 Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
- IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN TARGET		TRIWULAN I			TRIWULAN II		TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					100 %				100 %			100%			100%	
IKK 1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	24,9	24,9	100 %	49,8	49,8	100 %	0	74,7	100%	100	100%	100%	
IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	100 %	0	0	0	0	0	
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	4	1	1	100 %	2	2	100 %	0	3	100%	4	4	100%	
IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Intearasi Moda 0	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



IKK 1.5	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	1	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100%	1	1	100%

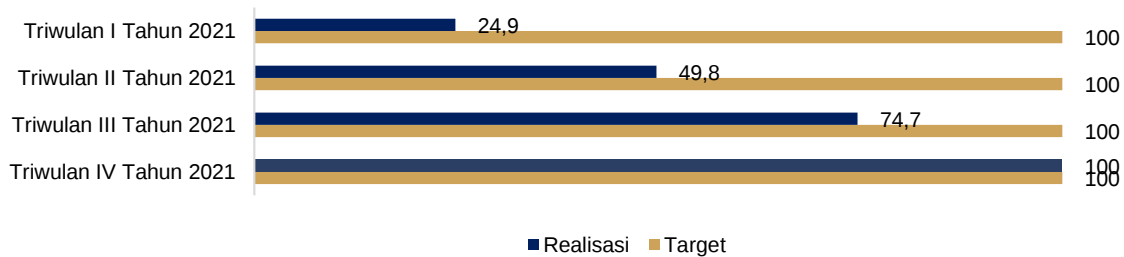
Tabel II. 1 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi



1. IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Capaian Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan triwulan I tahun 2021 sebesar 24,9%, triwulan II tahun 2021 sebesar 49,8%, triwulan III tahun 2021 sebesar 74,7%, maka capaian kinerja mencapai 100% Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.



Grafik II. 1.1 Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan IV tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan IV senilai Rp. 2.640.259.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 Rp. 2.640.259.000 atau mencapai 100%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.



2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

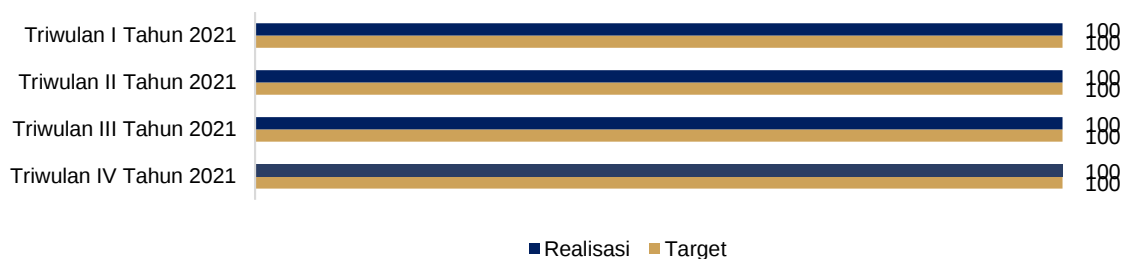
2. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

3. IKK 1.3 Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Capaian Kinerja Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi dengan target 4 lokasi dan capaian pada triwulan I tahun 2021 yaitu 1 lokasi, triwulan II tahun 2021 yaitu 2 lokasi, triwulan III yaitu 3 lokasi, maka capaian kinerja triwulan IV yaitu 4 lokasi. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.



Grafik II. 1.3 Capaian IKK Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Triwulan IV tahun 2021 terhadap terget Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capian Indikator Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:



- Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi target Triwulan IV senilai Rp. 12.918.124.000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 12.916.651.150 atau mencapai 99,98%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan Monitoring Terminal Tipe-A sesuai dengan jadwal yang telah disusun
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

4. IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

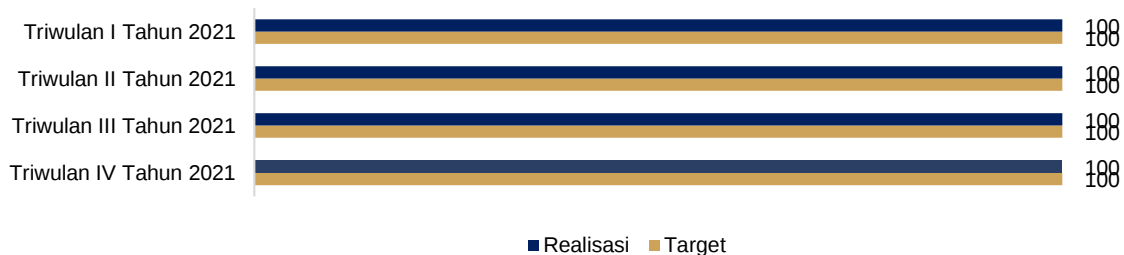
5. IKK 1.5 Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

Kinerja Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

6. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Capaian Kinerja Jumlah Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dengan target 1 lokasi dan capaian pada triwulan I tahun 2021 sebesar 100%, triwulan II tahun 2021 sebesar 100%, triwulan III tahun 2021 sebesar 100%, maka capaian kinerja triwulan III mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.



Grafik II. 1.6 Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi



b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Triwulan IV tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Uji Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Jumlah Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi target Triwulan IV senilai Rp. 1.879.895.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 Rp. 1.878.830.568 atau mencapai 99,94%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan Monitoring Pelabuhan SDP yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.



2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menggunakan 3 (Tiga) IKK, yaitu:

- IKK 2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A
- IKK 2.2 Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A
- IKK 2.3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN /				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat						100%				100%					
IKK 2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 2.2 Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



IKK 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	30	30	100%	60	60	100%	90	90	100%	100	100	100%
---------	---	---	-----	----	----	------	----	----	------	----	----	------	-----	-----	------

Tabel II. 1 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat



7. IKK 2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

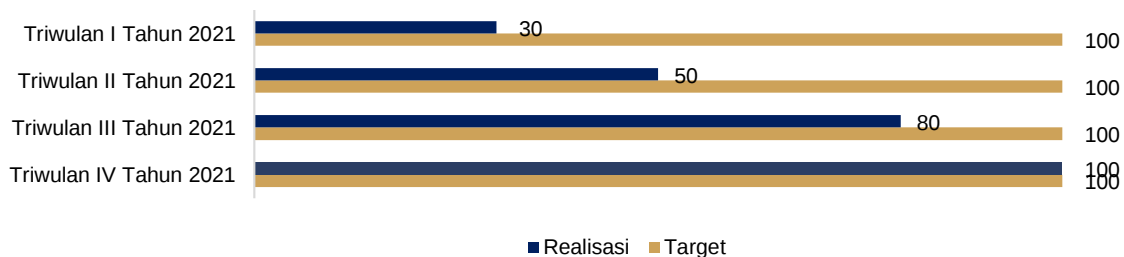
8. IKK 2.2 Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

Kinerja Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

9. IKK 2.3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP target 100% capaian pada triwulan I tahun 2021 sebesar 30%, triwulan II tahun 2021 sebesar 50%, triwulan III tahun 2021 sebesar 80%, maka capaian kinerja triwulan IV mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK umlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.



Grafik II. 2.3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan IV tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:



- Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP target Triwulan IV senilai Rp. 220.000.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 Rp. 220.000.000 atau mencapai 100%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

3. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menggunakan 8 (Delapan) IKK, yaitu:

IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
IKK 3.2	Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan
IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)
IKK 7a	Presentase Standararisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP



Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN /				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi					100 %			100%			100%			100%
IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	22,5	22,5	100 %	45	45	100%	67,5	67,5	100%	90	90	100%
IKK 3.2	Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90	22,5	22,5	100 %	45	45	100%	67,5	67,5	100%	90	90	100%
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	14	0	0	0	0	0	0	14	14	100%	14	14	100%
IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Penguji Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	14,3	14,3	100%	14,3	14,3	100%	42,9	42,9	100%	100	100	100%
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

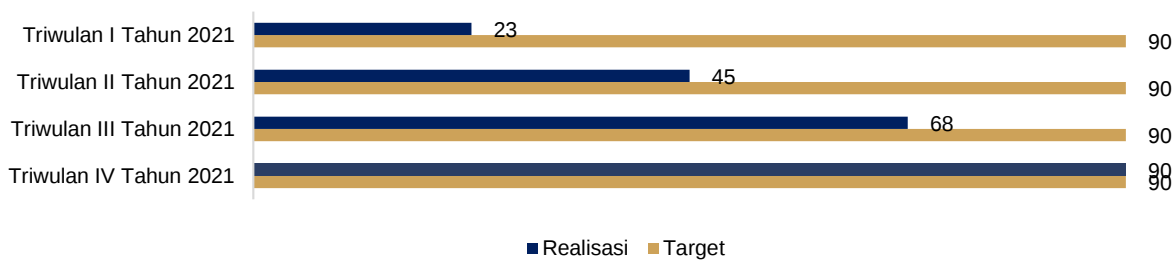
Tabel III. 2 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat



10. IKK 3.1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal target 90% capaian pada triwulan I tahun 2021 sebesar 22,5%, triwulan II tahun 2021 sebesar 45%, triwulan III mencapai 67,5%, maka capaian kinerja triwulan IV 90%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK umlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.



Grafik II. 3.1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan IV tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,5}{67,5} \times 90\% = 90\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Uji Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal target Triwulan IV senilai Rp. 16.211.649.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 Rp. 16.132.198.400 atau mencapai 99,45%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:



1. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana pihak ke-3 (kontraktor) dan pengawas pekerjaan (supervise) agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan capaian prestasi dan rencana pembayaran atau termin sesuai kontrak pekerjaan
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

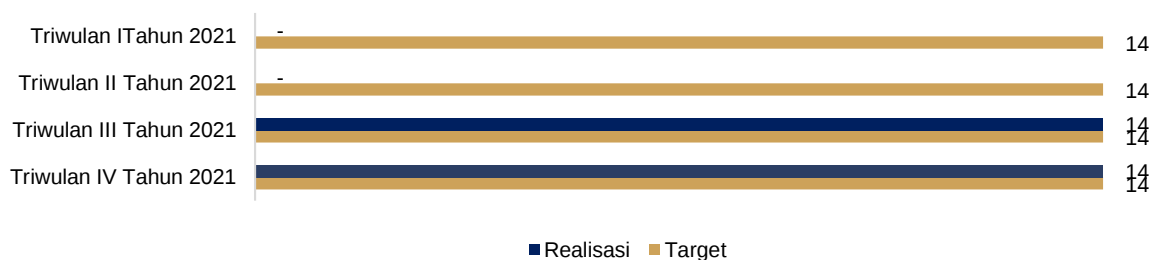
11. IKK 3.2 Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

Kinerja Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

12. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass dan Batas Kecepatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Capaian Kinerja Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass dan Batas Kecepatan target 14 Lokasi capaian pada triwulan I tahun 2021 dan triwulan II tahun 2021 yaitu 0 lokasi, triwulan III mencapai 14 lokasi, maka capaian kinerja triwulan IV mencapai 14 lokasi. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass dan Batas Kecepatan.



Grafik II. 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, dan Batas Kecepatan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, dan Batas Kecepatan Triwulan IV tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, dan Batas Kecepatan Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:



- Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, dan Batas Kecepatan target Triwulan IV senilai Rp. 4.566.586.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 Rp. 4.545.170.710 atau mencapai 99,53%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana pihak ke-3 (kontraktor) dan pengawas pekerjaan (supervise) agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan capaian prestasi dan rencana pembayaran atau termin sesuai kontrak pekerjaan
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

13. IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif tidak dilaksanakan pada tahun berjalan.

14. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

15. IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Penguji Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)

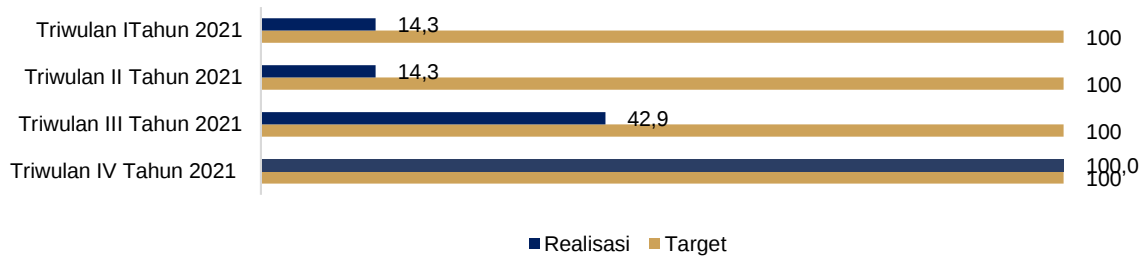
Kegiatan Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE) tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

16. IKK 7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Capaian Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor target 100% pada triwulan I tahun 2021 sebesar 14,3%, triwulan II tahun 2021 sebesar 14,3%, triwulan III mencapai 42,9%, maka capaian kinerja triwulan IV mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan .





Grafik II. 7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan IV tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{42,9}{42,9} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor target Triwulan IV senilai Rp. 736.296.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 Rp. 736.296.000 atau mencapai 100%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

17. IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.



4. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menggunakan 1 (Satu) IKK, yaitu:

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN /				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Tranportasi Darat					100 %			100%			100%			100%
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	22,5	22,5	100 %	45	45	100%	67,5	67,5	100%	90	90	100%

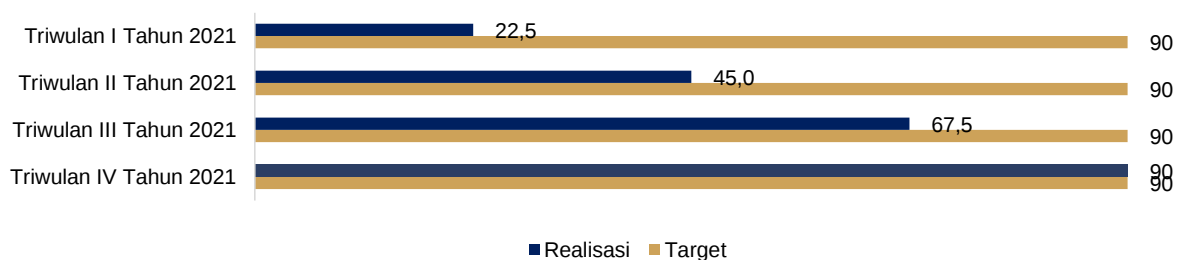
Tabel II. 4 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat



18. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Capaian Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat target nilai 90% pada triwulan I tahun 2021 sebesar 22,5%, triwulan II tahun 2021 sebesar 45%, triwulan III mencapai 67,5%, maka capaian kinerja triwulan IV sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat



Grafik II. 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Triwulan IV tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,5}{67,5} \times 90\% = 90\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat target Triwulan IV senilai Rp. 4.465.658.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 Rp. 4.464.714.012 atau mencapai 90%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.



5. Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menggunakan 1 (Satu) IKK, yaitu:

IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100 %			100 %			100%	100%		
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	22,5	22,5	100 %	45	45	100 %	67,5	67,5	100%	90	90	100%

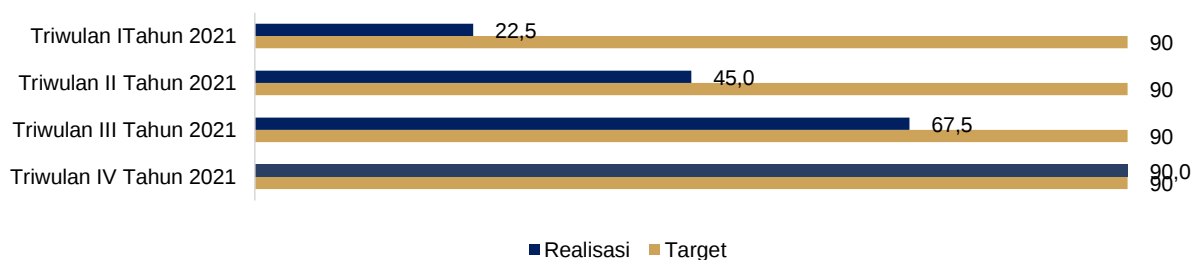
Tabel II. 4 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel



19. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat target nilai 90% pada triwulan I tahun 2021 sebesar 22,5%, triwulan II tahun 2021 sebesar 45%, triwulan III mencapai 67,5%, maka capaian kinerja triwulan IV mencapai 90%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat



Grafik II. 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,5}{67,5} \times 90\% = 90\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat target Triwulan IV senilai Rp. 16.756.749.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 Rp. 16.602.630.281 atau mencapai 99.08%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana pihak ke-3 (kontraktor) dan pengawas pekerjaan (supervise) agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan capaian prestasi dan rencana pembayaran atau termin sesuai kontrak pekerjaan
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.



III. 3. REALISASI ANGGARAN

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

III.3.1.1. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2021 sebesar **88.405.280.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 2 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2021

RM	Rp.	83.820.670.000
PNBP	Rp.	4.820.670.000
SBSN	Rp.	-
Total	Rp.	88.405.280.000

Tabel III. 3 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2021

Belanja Pegawai	Rp.	7,098,656,000
Belanja Barang	Rp.	54,041,983,000
Belanja Modal	Rp.	27,264,641,000
Total	Rp.	88.405.280.000

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2021 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. **69.403.690.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat pada Triwulan III TA. 2021 adalah sebesar Rp. **69.403.690.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 4 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2021

RM	Rp.	62.500.808.000
PNBP	Rp.	6.902.882.000
SBSN	Rp.	-
Total	Rp.	69.403.690.000

Tabel III. 5 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan III TA. 2021

Belanja Pegawai	Rp.	5.628.656.000
Belanja Barang	Rp.	43.185.048.000
Belanja Modal	Rp.	20.389.986.000
Total	Rp.	69.403.690.000



Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-15/AG.3/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-1);
- b. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-147/AG.3/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2);
- c. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-171/AG.3/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-3);
- d. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-290/AG/AG.3/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-4);
- e. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-316/AG/AG.3/2021 tanggal 22 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Pergeseran Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA 022.03 (Kementerian Perhubungan c.q. Ditjen Perhubungan Darat) Tahun Anggaran 2021 (Revisi ke-5);
- f. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-364/AG/AG.3/2021 tanggal 03 Juni 2021 perihal Pengesahan Revisi Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 (Tahap II) di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan TA 2021 (Revisi ke-6);
- g. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-443/AG/AG.3/2021 tanggal 08 Juli 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan TA 2021 (Revisi ke-7);
- h. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-532/AG/AG.3/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Revisi Refocusing dan Realokasi Belanja (Tahap III) Tahun 2021 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-8);
- i. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-630/AG/AG.3/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Revisi Refocusing Tahap IV Tahun 2021 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-9);
- j. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-711/AG/AG.3/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-10).



III.3.1.2. Refocussing Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-147/AG.3/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2) sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar Rp. 88,405,280,000,-. Dari pagu Revisi ke-1 sebesar Rp. 65,706,567,000,- menjadi sebesar Rp. 64,956,567,000,- di Revisi ke-2. Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel III. 6 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2021

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	83,820,670,000	4,584,610.000	-	88,405,280,000
REVISI KE-1	61,121,957,000	4,584,610.000	-	65,706,567,000
REVISI KE-2	60,371,957,000	4,584,610.000	-	64,956,567,000
REVISI KE-3	59,581,790,000	4,584,610.000	-	64,166,400,000
REVISI KE-4	50,349,508,000	4,584,610.000	-	63,934,118,000
REVISI KE-5	59,059,508,000	6,902,882,000	-	63,644,118,000
REVISI KE-6	61,500,808,000	6,902,882,000	-	68,403,690,000
REVISI KE-7	62,500,808,000	6,902,882,000	-	69,403,690,000
REVISI KE-8	62,500,808,000	6,902,882,000	-	69,403,690,000
REVISI KE-9	62,500,808,000	6,902,882,000	-	69,403,690,000

Tabel III. 7 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2021

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	7,098,656,000	54,041,983,000	27,264,641,000	88,405,280,000
REVISI KE-1	7,098,656,000	42,317,925,000	16,289,986,000	65,706,567,000
REVISI KE-2	6,348,656,000	42,317,925,000	16,289,986,000	64,956,567,000
REVISI KE-3	6,348,656,000	41,527,758,000	16,289,986,000	64,166,400,000
REVISI KE-4	6,348,656,000	41,295,476,000	16,289,986,000	63,934,118,000
REVISI KE-5	6,058,656,000	41,295,476,000	16,289,986,000	63,644,118,000
REVISI KE-6	6,058,656,000	42,955,048,000	19,389,986,000	68,403,690,000
REVISI KE-7	5.628.656.000	43.185.048.000	20.389.986.000	69,403,690,000
REVISI KE-8	5.628.656.000	43.185.048.000	20.389.986.000	69,403,690,000
REVISI KE-9	5.628.656.000	43.185.048.000	20.389.986.000	69,403,690,000



Tabel III. 8 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2021

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	7,098,656,000		7,098,656,000		6,348,656,000		6,058,656,000		5.828.656.000
Belanja Barang	54,041,983,000		42,317,925,000		42,317,925,000		41,295,476,000		43.185.048.000
Belanja Modal	27,264,641,000		16,289,986,000		16,289,986,000		16,289,986,000		20.389.986.000
TOTAL	88,405,280,000		65,706,567,000		64,956,567,000		63,644,118,000		69,403,690,000

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 9 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2021

KO DE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL (juta)	PAGU PER TRIWULAN I (juta)	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II (juta)	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III (juta)	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV (juta)	TRIWULAN IV	
				REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	72.974.831.000	50.351.118.000			50.351.118.000			49.328.669.000			52.646.941.000		
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	2.931.732.000	2.931.732.000	Rp429.982.994	14,67 %	2.931.732.000	Rp1.074.957.485	36,67 %	2.640.259.000	Rp1.719.931.976	65,14 %	2.640.259.000	Rp2.640.259.000	100,00 %
4638	Pelayanan Transportasi Darat	14.808.019.000	14.808.019.000	Rp2.572.389.150	17,37 %	14.808.019.000	Rp7.085.716.550	47,85 %	14.798.019.000	Rp10.236.515.053	69,17 %	17.298.019.000	Rp14.795.482.318	99,98 %

4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	48.870.461. 000	27.923.427. 000	Rp4.143.117 .100	14,84 %	27.923.427. 000	Rp19.619.752 .822	70,26 %	27.424.733. 000	Rp23.698.990 .644	86,73 %	28.143.005. 000	Rp25.856.068 .154	86,73 %
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	6.364.619.0 00	4.687.940.0 00	Rp1.037.328 .036	22,13 %	4.687.940.0 00	Rp2.714.733. 343	57,91 %	4.465.650.0 00	Rp3.326.230. 691	74,48 %	4.565.658.0 00	Rp4.563.267. 012	99,95 %
WA	Program Dukungan Manajemen	15.430.449. 000	15.355.449. 000			14.605.449. 000			14.315.449. 000			16.756.749. 000		
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	15.430.449. 000	15.355.449. 000	Rp3.835.929 .409	24,98 %	14.605.449. 000	Rp8.083.143. 009	55,34 %	14.315.449. 000	Rp10.750.408 .497	75,10 %	16.756.749. 000	Rp16.602.630 .308	99,08 %

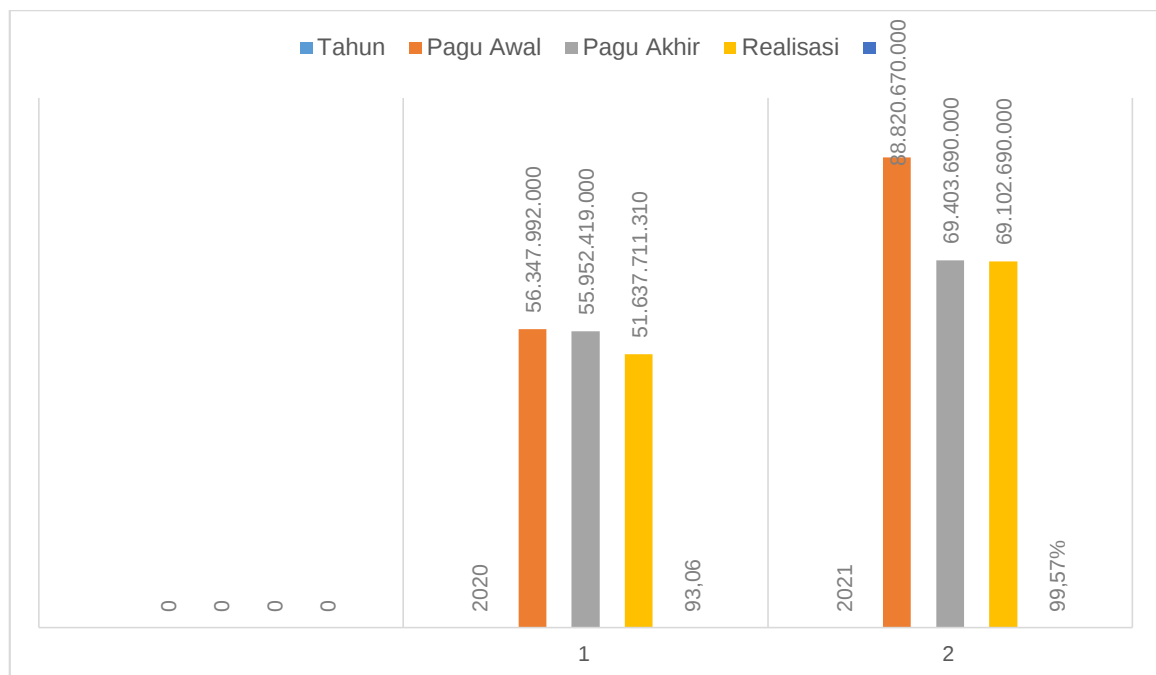


III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017 – 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 10 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	56.347.992.000	55.952.419.000	51.637.711.310	93,06
2	2021	88.820.670.000	69.403.690.000	69.102.690.000	99,57%



Gambar III 1 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi di awal tahun 2021, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2021 anggaran yang terserap sebesar Rp. 69.102.690.000,- atau mencapai 99,57% dari pagu akhir Rp. 69.403.690.000,-

III.3.2. Realisasi Anggaran

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2021

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 11 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KO DE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL (juta)	PAGU PER TRIWULA N I (juta)	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULA N II (juta)	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULA N III (juta)	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULA N IV (juta)	TRIWULAN IV	
				REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	72.974.831.000	50.351.118.000			50.351.118.000			49.328.669.000			52.646.941.000		
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	2.931.732.000	2.931.732.000	Rp429.982.994	14,67 %	2.931.732.000	Rp1.074.957.485	36,67 %	2.640.259.000	Rp1.719.931.976	65,14 %	2.640.259.000	Rp2.640.259.000	100,00 %
4638	Pelayanan Transportasi Darat	14.808.019.000	14.808.019.000	Rp2.572.389.150	17,37 %	14.808.019.000	Rp7.085.716.550	47,85 %	14.798.019.000	Rp10.236.515.053	69,17 %	17.298.019.000	Rp14.795.482.318	99,98 %
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	48.870.461.000	27.923.427.000	Rp4.143.117.100	14,84 %	27.923.427.000	Rp19.619.752.822	70,26 %	27.424.733.000	Rp23.698.990.644	86,73 %	28.143.005.000	Rp25.856.068.154	86,73 %
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	6.364.619.000	4.687.940.000	Rp1.037.328.036	22,13 %	4.687.940.000	Rp2.714.733.343	57,91 %	4.465.650.000	Rp3.326.230.691	74,48 %	4.565.658.000	Rp4.563.267.012	99,95 %
WA	Program Dukungan Manajemen	15.430.449.000	15.355.449.000			14.605.449.000			14.315.449.000			16.756.749.000		
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	15.430.449.000	15.355.449.000	Rp3.835.929.409	24,98 %	14.605.449.000	Rp8.083.143.009	55,34 %	14.315.449.000	Rp10.750.408.497	75,10 %	16.756.749.000	Rp16.602.630.308	99,08 %

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar **Rp64.457.706.792,-** atau mencapai **93%** dari total pagu sebesar **Rp69.403.690.000,-**.



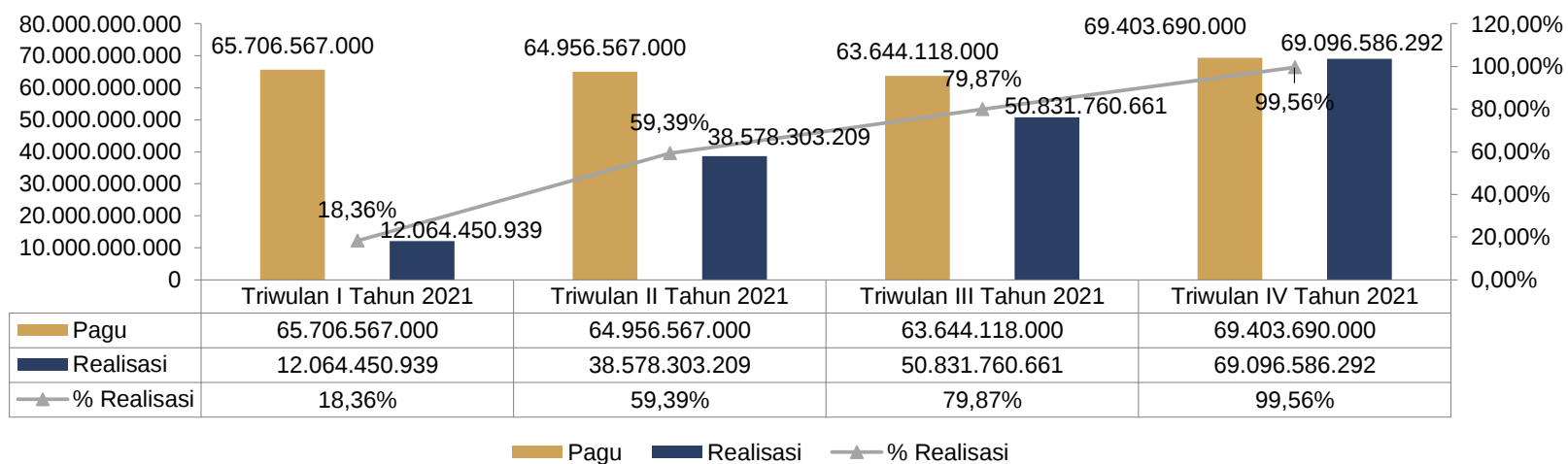
III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2021 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III dan IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 12 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III 2021

N O	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III	
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%
1	Belanja Pegawai	7.098.656.000	1.096.345.967		6.348.656.000	2.824.265.245		6.058.656.000	4.060.959.845		5.828.656.000	5.677.464.372	
2	Belanja Barang	42.317.925.000	8.104.618.172		42.317.925.000	21.155.170.963		41.295.476.000	30.575.265.416		43.185.048.000	43.152.583.740	
3	Belanja Modal	16.289.986.000	2.863.486.800		16.289.986.000	14.598.867.000		16.289.986.000	16.195.535.400		20.389.690.000	20.272.513.663	

2	PNBP	4.584.610.000	694.340.000		4.584.610.000	2.360.756.000		4.584.610.000	3.097.296.000		6.902.880.000	6.896.906.629	
3	SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		65.706.567.000	12.064.450.939	18,36	64.956.567.000	38.578.303.209	59,39	63.644.118.000	50.831.760.661	79,87	69.403.690.000	69.096.586.292	99,56



Gambar III 2 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan IV Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2021 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 18,36% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 59,39% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 79,89%, sehingga pada triwulan terakhir yaitu Triwulan IV yaitu 99,56%

III.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 14 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	5.828.656.000	5.677.464.372	151.191.673
2	Belanja Barang	43.185.048.000	43.152.283.740	32.764.260
3	Belanja Modal	20.389.936.000	20.272.513.663	117.422.337
TOTAL		69.403.690.000	69.102.561.775	301.398.270

Tabel III. 15 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	62.500.808.000	62.199.679.663	301.128.337
2	PNBP	6.902.882.000	6.896.906.629	5.975.371
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		69.403.690.000	69.102.561.775	301.398.270

Tabel III. 16 Rincian sisa Anggaran Tahun 2021

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana		
2	Kegiatan yang Terblokir		
3	Sisa Kontraktual	6.902.882.000	6.896.906.629
	a. Belanja Barang		
	b. Belanja Modal		
4	Sisa Non Kontraktual	62.500.808.000	62.199.679.663
	a. Belanja Barang		
	b. Belanja Modal		
5	Sisa Belanja Pegawai		
TOTAL			69.102.561.775



Dari total pagu anggaran Balai Pengelolaan Transportasi Darat sebesar Rp **69.403.690.000,-** (Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp **69.102.561.775,-** (Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 99,57% sehingga total dana yang tidak terserap di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat adalah sebesar Rp **301.398.270,-** (Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 0,43%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Tidak Ada Kegiatan yang terblokir;
3. Sumber dana PNBPN tidak tersisa
4. Sisa Belanja Modal Rp 117.422.337,- (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)
5. Sisa Belanja Pegawai Rp 151.191.673,- (Seratur Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

III.3.3. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020, sehingga beberapa pekerjaan sempat ditunda pengerjaannya karena PSBB di lokasi setempat, sehingga waktu penyelesaian mundur dari target.
2. Adanya refocusing anggaran untuk membantu pencegahan dampak pandemi Covid-19 sehingga beberapa pekerjaan seperti anggaran kegiatan SMART Terminal, Pekan Nasional Keselamatan dan beberapa anggaran terkait perjalanan dinas melaksanakan kegiatan di luar.



IV. Penutup

IV.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2021 ini terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja yang capaiannya telah/lebih dari target yang telah ditentukan yaitu
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Jalan Wilayah VIII Provinsi Banten akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring terkait capaian indikator kegiatan dan capaian realisasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan.



KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN

Laporan Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tahun 2020

Kata Pengantar

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten

Balai Pengelola
Transportasi Darat
Wilayah VIII
Provinsi Banten
mengemban amanah
menjadi organisasi
pemerintah yang
profesional, yang
dapat memfasilitasi
dan mendukung
mobilitas
masyarakat, melalui
suatu layanan
transportasi darat.



Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2019 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020, Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2020.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Merak, 4 Januari 2021

**KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
PROVINSI BANTEN**


ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19680110 199603 1 001

Ikhtisar Eksrekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2019 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direview pada tahun 2020 sebanyak 35 Indikator dan 10 Sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Wilayah Provinsi Banten telah melaksanakan dengan baik. Disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target (kurang dari 100%) namun dalam kategori baik karena sudah mencapai 100%.

Hal ini menandakan capaian sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten telah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2019.

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksrekutif	5
Daftar Isi	6
BAB 1	7
PENDAHULUAN.....	7
I.1. Latar Belakang	8
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
I.3. Sumber Daya Manusia	11
I.4. Potensi dan Permasalahan.....	12
I.4.1. Potensi	12
I.4.2 Permasalahan	12
I.5. Sistematika Laporan.....	13
BAB 3.....	32
AKUNTABILITAS.....	32
KINERJA	32
III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	33
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja.....	34



BAB 1

PENDAHULUAN





I.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan guna mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-programnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mentransformasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak sebagai Unit Pelaksana Teknis yaitu menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat yang berada di Serang, Banten.

Setelah berganti nama menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten dan sebagai tindak lanjut terhadap Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2018 – 2020, maka disusun Rencana Strategis Dua Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2019 – 2020.



Dalam penyusunan Rencana Dua Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2019 – 2020 berpedoman kepada peraturan perundang – undangan antara lain :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang di usahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum di usahakan secara komersial.
- b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
 - 3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
 - 4) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban,

- penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran
- 5) peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
 - 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai di BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten adalah sebanyak 335 orang dengan rincian 40 (Empat Puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 295 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima) Tenaga Honorer (Non PNS) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

No	Wilayah Kerja	PNS	Non PNS
1	Kantor Induk Merak	21	48
2	Satpel Pelabuhan Penyeberangan Merak	1	34
3	Terminal Tipe A Merak	3	64
4	Terminal Tipe A Lebak	4	28
5	Terminal Tipe A Labuan	4	32
6	Terminal Tipe A Pakupatan	4	67
7	UPPKB Cikande	1	15
8	UPPKB Cimanuk	2	7
Total		40	295

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten

I.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam dua tahun kedepan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten. memetakan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi.

I.4.1. Potensi

Potensi yang dimiliki oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. VIII – Provinsi Banten yang meliputi 1 (satu) Provinsi yaitu Banten yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota. Wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) provinsi membuat pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih fokus;
2. Adanya Penambahan sumber daya pegawai pada tahun 2017 yang berasal dari Pegawai Terminal Tipe A dan UPPKB;
3. Perkembangan teknologi baik peralatan dan informasi beserta personil yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi tersebut yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan mulai tahap perencanaan, pembangunan serta pemeliharaan.

I.4.2 Permasalahan

Terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lima tahun kedepan yaitu:

1. Eksistensi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten belum tersosialisasi secara maksimal ke seluruh SKPD yang ada di wilayah kerja.
2. Belum adanya kejelasan pendelegasian kewenangan sesuai dengan PM 154 Tahun 2016 dari Direktorat Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten;
3. Keterbatasan jumlah SDM baik ASN maupun PPNP Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan bidang LLAJ, TSDP termasuk tupoksi – tupoksi lainnya;
4. Masih rangkap fungsi dan kewenangan PT ASDP sebagai operator dan regulator sehingga menjadi kendala Balai Pengelola Transportasi Darat

Wilayah VIII Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di Pelabuhan Penyeberangan;

5. Belum adanya keterpaduan pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan dikarenakan masih belum maksimalnya koordinasi antar instansi pemangku kepentingan di bidang transportasi;
6. Tidak adanya keterpaduan pelayanan antar moda darat, laut dan udara.
7. Karakteristik batas wilayah administratif Kabupaten/Kota relatif pendek sehingga menimbulkan biaya transportasi yang tinggi dan pelayanan angkutan umum tidak maksimal.
8. Belum adanya data yang lengkap mengenai peta alur pelayanan sungai, danau dan sebagai batas administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta belum adanya buku petunjuk pelayaran di sungai dan danau.
9. Belum adanya penetapan jaringan lintas angkutan barang, sehingga menimbulkan kerusakan jalan, tinggi angka kecelakaan, kemacetan dan tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

I.5. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknik perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri perhubungan nomor PM Nomor 45 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kementerian perhubungan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Kementerian Perhubungan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten pada tahun 2020 yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja tahun 2020 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh selama tahun 2020 yang terdiri dari :

- a. Analisis pencapaian kinerja menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja unit kerja, menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan dan hambatan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan. Dalam hal ini dapat dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan tersebut.
- b. Aspek keuangan menguraikan sumber perolehan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Aspek keuangan harus memperhatikan prinsip – prinsip pelaporan keuangan yang lazim.

4. BAB IV PENUTUP

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja (Termasuk Struktur Organisasi, Sasaran Strategis Unit Kerja)
- I.3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan (Termasuk Ruang Lingkup)
- I.5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Lampiran II. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran III. Revisi Perjanjian Kerja Tahun 2020

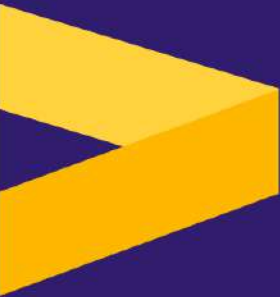


BAB 2

PERENCANAAN

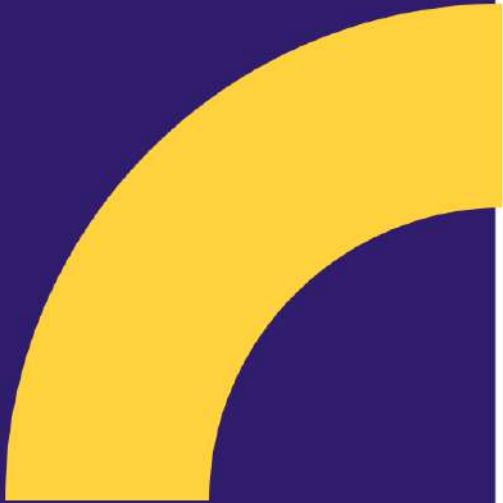
KINERJA





II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Melalui pendekatan Renstra yang transparan dan sinergi, instansi pemerintah dapat memaduserasikan visi, misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerjanya.



Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat 2020 sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)			
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	-	-
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	-	-
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	lokasi	-	-
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	unit	-	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	lokasi	-	-
		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	lokasi	-	-
		g. Jumlah Lokasi	lokasi	-	-

		Rehabilitasi UPPKB			
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	lokasi	-	-
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1	1
		IKK 3 Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020			
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	7	7
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi		
		c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	-	-
		IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1	1
		IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	1	1
		IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan			
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan			
		• Marka Jalan	m'	34.263	34.263
		• Rambu Lalu Lintas	buah	330	330
		• Patok Lalu Lintas	buah	250	250
		• Paku Jalan	buah	-	-

		• Pagar Pengaman Jalan	Unit	35	35
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-	-
		• Cermin Tikungan	buah	16	16
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-	-
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	-	-
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	-	-
		e. Pengadaan Bus	unit	-	-
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	5	5
		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis	paket	-	-
		IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	3	3
		IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial			
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	-	-
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	-	-
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	-	-
		d. Jumlah Lokasi	lokasi	-	-

		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru			
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	-	-
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	-	-
		g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	-	-
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	-	-
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	-	-
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	-	-
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	lokasi	-	-
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	lokasi	-	-
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	lokasi	-	-
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	-	-
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	-	-
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	-	-
		q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	-	-
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1	1

		IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A	bahan	1	1
--	--	---	-------	---	---

II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	-
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	-
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	lokasi	-
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	unit	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	lokasi	-

		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	lokasi	-
		g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	-
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	lokasi	-
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1
		IKK 3 Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	7
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi	
		c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	-
		IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1
		IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	1
		IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		
		• Marka Jalan	m'	34.263
		• Rambu Lalu Lintas	buah	330

		• Patok Lalu Lintas	buah	250
		• Paku Jalan	buah	-
		• Pagar Pengaman Jalan	Unit	35
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		• Cermin Tikungan	buah	16
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	-
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	-
		e. Pengadaan Bus	unit	-
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	5
		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis	paket	-
		IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	3
		IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial		
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	-
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	-
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal	unit	-

		Penyeberangan Perintis Lanjutan		
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	-
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	-
		g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	-
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	-
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	-
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	-
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	lokasi	-
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	lokasi	-
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	lokasi	-
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	-
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	-
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	-
		q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	-
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di	IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha,	laporan	1

	Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan		
		IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A	bahan	1

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pada konteks implementasi LKIP, Perjanjian Kinerja adalah rencana kinerja tahunan (annual performance plan) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2017-2019, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Penetapan Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif).

Maksud Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten tahun 2020 adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam berjalannya Tahun Anggaran 2020 terdapat 1 (satu) kali Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten pada Semester ke-II. Untuk mewujudkan Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2017-2019.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan		

		pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	-
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	-
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	lokasi	-
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	unit	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	lokasi	-
		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	lokasi	-
		g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	-
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	lokasi	-
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1
		IKK 3 Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	7
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi	
		c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	-

		IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1
		IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	1
		IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		
		• Marka Jalan	m'	34.263
		• Rambu Lalu Lintas	buah	330
		• Patok Lalu Lintas	buah	250
		• Paku Jalan	buah	-
		• Pagar Pengaman Jalan	Unit	35
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		• Cermin Tikungan	buah	16
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	-
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	-
		e. Pengadaan Bus	unit	-
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	5

		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis	paket	-
		IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	3
		IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial		
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	-
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	-
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	-
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	-
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	-
		g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	-
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	-
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	-
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	-

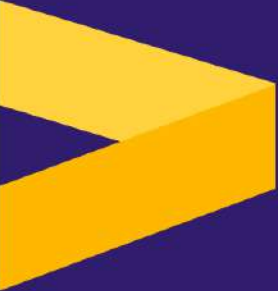
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	lokasi	-
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	lokasi	-
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	lokasi	-
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	-
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	-
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	-
		q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	-
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1
		IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A	bahan	1



BAB 3

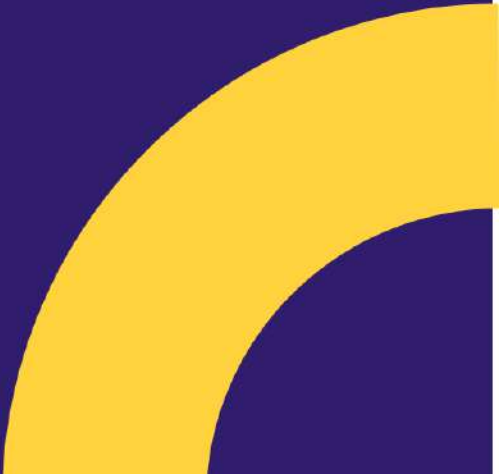
AKUNTABILITAS KINERJA





III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.



Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten melalui aplikasi E-performance dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi E-Performance yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola data dan laporan kinerja di Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten.

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama:

1. Prosentase pengukuran IKU (Unit)
 - a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:
perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Realisasi a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \text{ a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

2. Rata-rata nilai capaian IKU terhadap Sasaran (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

3. Rata-rata nilai capaian seluruh IKU yang dilaksanakan (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan pendanaan. Untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten 2017-2019, bermuara pada terwujudnya tujud Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai pada periode 2019-2021.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Revisi PK 2020	Realisasi 2020	%	Capaian Triwulan			
							Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	1. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)								
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	-	-					
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	-	-					
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	lokasi	-	-					
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	unit	-	-					

		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	lokasi	-	-					
		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	lokasi	-	-					
		g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	-	-					
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	lokasi	-	-					
		2. Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1	1	100%				v
		3. Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020								
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	7	7	100%			v	
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi							
		c. Jumlah Lokasi	lokasi	-	-					

		Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan								
		4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1	1	100%				v
		5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	1	1	100%		v		
		6. Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan								
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan						V		
		• Marka Jalan	m'	34.263	34.263	100%				
		• Rambu Lalu Lintas	buah	330	330	100%				
		• Patok Lalu Lintas	buah	250	250	100%				
		• Paku Jalan	buah	-	-					
		• Pagar Pengaman Jalan	Unit	35	35	100%				

		• Alat Penerangan Jalan	unit	208	208	100%				
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-	-					
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-	-					
		• Cermin Tikungan	buah	16	16	100%				
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							v	
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208	208	100%				
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-	-					
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-	-					
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	-	-					
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	-	-					
		e. Pengadaan Bus	unit	-	-					
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	5	5	100%	v	v	v	V
		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis	paket	-	-					
		7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan	Lokasi	3	3	100%		V		

		jalan								
		8. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang yang belum diusahakan secara komersial								
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	-	-					
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	-	-					
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	-	-					
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	-	-					
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	-	-					
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	-	-					
		g. Jumlah Lokasi	lokasi	-	-					

		Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru								
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	-	-					
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	-	-					
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	-	-					
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	lokasi	-	-					
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	lokasi	-	-					
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	lokasi	-	-					
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	-	-					
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	-	-					
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	-	-					
		q. Jumlah Paket Pengerukan	paket	-	-					

		Kolam Pelabuhan								
9.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	10. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1	1	100%	v	v	V	V
		11. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A	bahan	1	1	100%			V	

Tabel III.2.1 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2020		%
		Target Revisi PK 2020	Realisasi Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)				
a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	-	-	
b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	-	-	
c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	lokasi	-	-	
d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	unit	-	-	
e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	lokasi	-	-	
f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	lokasi	-	-	
g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	-	-	
h. Pengadaan Lahan UPPKB	lokasi	-	-	
2. Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1	1	100%
3. Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana				

penerapan sampai dengan tahun 2020				
a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	7	7	100%
b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi			
c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	-	-	
4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1	1	100%
5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	1	1	100%
6. Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan				
a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan				
• Marka Jalan	m'	34.263	34.263	100%
• Rambu Lalu Lintas	buah	330	330	100%
• Patok Lalu Lintas	buah	250	250	100%
• Paku Jalan	buah	-	-	
• Pagar Pengaman Jalan	Unit	35	35	100%
• Alat Penerangan Jalan	unit	208	208	100%
• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-	-	
• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-	-	
• Cermin Tikungan	buah	16	16	100%
b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				
• Alat Penerangan Jalan	unit	208	208	100%
• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-	-	
• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-	-	
c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	-	-	
d. Pengembangan Transportasi	lokasi	-	-	

Perkotaan				
e. Pengadaan Bus	unit	-	-	
f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	5	5	100%
g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis	paket	-	-	
7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	3	3	100%
8. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial				
a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	-	-	
b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	-	-	
c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	-	-	
d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	-	-	
e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	-	-	
f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	-	-	
g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	-	-	
h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	-	-	
i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	-	-	
j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	-	-	
k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	lokasi	-	-	
l. Jumlah Lokasi Peningkatan/	lokasi	-	-	

Rehabilitasi Pelabuhan Danau				
m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	lokasi	-	-	
n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	-	-	
o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	-	-	
p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	-	-	
q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	-	-	
9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1	1	100%
10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A	bahan	1	1	100%

III.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Revisi PK Tahun 2020

Selama tahun 2020, ada 10 SS dan di dalamnya ada 35 IK Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten merupakan Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat di Wilayah Provinsi Banten yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2017-2019. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam ikut membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan

mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas.



Sasaran Strategis 1

Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Pencapaian SS 1 diukur melalui sepuluh Indikator Kinerja (IK) yaitu,

IK 1. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru

Capaian lokasi pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK tahun 2020 maka capaian Kinerja Mencapai 100%.

IK 2. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan

Capaian Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK 3. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A

Capaian Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK 4. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)

Capaian Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.5 Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)

Capaian Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.6 Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)

Capaian Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.7 Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB

Capaian Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.8 Pengadaan Lahan UPPKB

Capaian Pengadaan Lahan UPPKB tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%



Sasaran Strategis 2

Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Pencapaian SS 2 yaitu evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) tahun 2020 sebesar 1 Laporan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebesar 1 Laporan maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 3

Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020

Pencapaian SS 3 diukur melalui tiga Indikator Kinerja (IK) yaitu

IK.8 Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)

Capaian lokasi pembangunan ZOSS tahun 2020 sebanyak 7 jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 7 maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.9 Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)

Capaian lokasi Pembangunan RASS tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.10 Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan

Capaian lokasi pembangunan implementasi batas kecepatan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 4

Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri

Pencapaian SS 4 yaitu evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri tahun 2020 sebesar 1 Laporan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebesar 1 Laporan maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 5

Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor

Pencapaian SS 5 yaitu bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor tahun 2020 sebesar 1 Laporan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebesar 1 Laporan maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 6

Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan

Pencapaian SS 6 diukur melalui tujuh Indikator Kinerja (IK) yaitu

IK.11 Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

a. Marka Jalan

Capaian Marka Jalan tahun 2020 sebesar 34.263 m' jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebesar 34.263 m' maka capaian kinerja mencapai 100%.

b. Rambu Lalu Lintas

Capaian Rambu lalu lintas tahun 2020 sebanyak 330 buah jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 330 buah maka capaian kinerja mencapai 100%.

c. Patok Lalu Lintas

Capaian Patok lalu lintas tahun 2020 sebanyak 250 buah jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 250 buah maka capaian kinerja mencapai 100%.

d. Paku Jalan

Capaian Patok lalu lintas tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

e. Pagar Pengaman Jalan

Capaian pagar pengaman jalan tahun 2020 sebanyak 35 unit jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 35 unit maka capaian kinerja mencapai 100%.

f. Alat Penerangan Jalan

Capaian alat penerangan jalan tahun 2020 sebanyak 208 unit jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 208 unit maka capaian kinerja mencapai 100%.

g. Lampu Peringatan Pemakai Jalan

Capaian lampu peringatan pemakai jalan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

h. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Capaian alat pemberi isyarat lalu lintas tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

i. Cermin Tikungan

Capaian cermin tikungan tahun 2020 sebanak 16 buah jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 16 buah maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.12 Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

a. Alat Penerangan Jalan

Capaian alat penerangan jalan tahun 2020 sebanyak 208 unit jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 208 unit maka capaian kinerja mencapai 100%.

b. Lampu Peringatan Pemakai Jalan

Capaian lampu peringatan pemakai jalan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Capaian alat pemberi isyarat lalu lintas tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.13 Jumlah Paket ATCS (baru)

Capaian alat pemberi isyarat lalu lintas tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.14 Pengembangan Transportasi Perkotaan

Capaian pengembangan transportasi perkotaan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.15 Pengadaan Bus

Capaian pengadaan Bus tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.16 Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan

Capaian subsidi operasional keperintisan Angkutan Jalan tahun 2020 sebanyak 5 trayek jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 5 trayek maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.17 Dukungan Terhadap Pengembangan Aeropolis

Capaian dukungan terhadap aeropolis tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 7

Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan

Pencapaian SS 7 yaitu kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan tahun 2020 sebanyak 3 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 3 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 8

Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial

Pencapaian SS 8 diukur melalui tujuh Indikator Kinerja (IK) yaitu

IK.18 Jumlah Unit Pembangunan Bus Air

Capaian Unit pembangunan Bus air tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.19 Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru

Capaian unit pembangunan kapal penyeberangan perintis baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.20 Jumlah Lokasi Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan

Capaian lokasi pembangunan kapal penyeberangan perintis lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.21 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.22 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.23 Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

Capaian lokasi rehabilitasi pelabuhan penyeberangan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.24 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan sungai baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.25 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan sungai lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.26 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan danau baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.27 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan danau lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.28 Jumlah Lokasi Peningkatan/Rehabilitasi Pelabuhan Danau

Capaian lokasi peningkatan/rehabilitasi pelabuhan danau baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.29 Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)

Capaian subsidi operasional keperintisan angkutan SDP tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.30 Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Capaian unit sarana bantu navigasi pelayaran tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.31 Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau

Capaian unit pengadaan rambu sungai danau baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.32 Jumlah Unit Halte Sungai

Capaian unit halte sungai baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.33 Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan

Capaian paket pengerukan kolam pelabuhan baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 9

Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan

Pencapaian SS 9 yaitu Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan tahun 2020 sebanyak 1 laporan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 1 laporan maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 10

Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A

Pencapaian SS 10 yaitu Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A tahun 2020 sebanyak 3 bahan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 3 bahan maka capaian kinerja mencapai 100%.

Nilai Aset Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten yang berhasil diinventarisasi.

Hingga Desember 2020 Nilai Aset pada Neraca Unaudited 2020 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 186.512.054.491.

III.2.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis Efisiensi Sumber Daya Kami sajikan dalam Tabel berikut :

NO.	KEGIATAN	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		
			Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 19.454.050.000	Rp. 19.454.050.000	-	100%
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 2.931.732.000	Rp. 2.931.732.000	-	100%
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 12.650.228.000	Rp. 12.650.228.000	-	100%
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 3.003.000.000	Rp. 3.003.000.000	-	100%
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi	Rp. 1.698.025.000	Rp. 1.698.025.000	-	100%

NO.	KEGIATAN	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		
			Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 34.362.428.000	Rp. 34.362.428.000	-	100%

III.3. Capaian Kinerja Lainnya

Kontribusi dalam membantu penanganan pandemi covid-19 sesuai arahan Bapak Dirjen Perhubungan Darat untuk memberikan upaya pencegahan penyebaran covid-19, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- a. pembagian 1000 masker kepada pengguna jasa
- b. bantuan covid-19 berupa bansos sembako 200 unit sembako.

Semua bantuan sudah disalurkan melalui masing-masing satuan pelayanan baik terminal, UPPKB maupun pelabuhan, dengan sinergi dan kerja sama seluruh pegawai BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten dan seluruh Jajaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersinergi membantu dalam mencegah penyebaran covid-19.

III.4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Utama dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran yang rendah dari alokasi atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dapat tercapai sesuai target.

III.4.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2020

Alokasi Anggaran Tahun 2018

a. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2018 sebesar Rp. 74.099.463.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian per Sumber Dana :

RM	:	Rp.	76.096.463.000,-	100%
PNBP	:	Rp.	3.003.000.000	0%
PLN	:	Rp.	-	0%

- 2) Pagu setelah Efisiensi dan Penambahan Pagu T.A. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pagu Awal (DIPA)	Rp.	74.099.463.000
2.	Penambahan	Rp.	387.191.000
3.	Penambahan a. Perencanaan Teknis	Rp.	387.191.000
4.	Pagu Akhir (DIPA)	Rp.	76.096.463.000

Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	Rp. 4.940.105.390,-	96,81%
Belanja Barang	Rp. 35.954.086.216,-	98,79%
Belanja Modal	Rp. 32.512.853.054	98,56%

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi) :

Pembangunan dan pengelolaan lalu lintas jalan	Rp.	19.248.035.072
Pembangunan dan pengelolaan angkutan jalan	Rp.	2.410.728.000
Pembangunan dan pengelolaan sarana transportasi jalan	Rp.	13.586.791.120
Pembangunan dan pengelolaan sarana transportasi jalan	Rp.	2.813.503.850
Pembangunan dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	Rp.	1.787.139.350
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen pwehubungan darat	Rp.	33.561.357.268

II.4.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Dana tidak terserap TA. 2020 di ai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Bantensebesar Rp. 1.079.609.340 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan tidak dilaksanakan/tidak diserap, antara lain :

1. Pembangunan dan pengelolaan lalu lintas jalan Rp. 560.459.928
2. Pembangunan dan pengelolaan angkutan jalan Rp. 510.000
3. Pembangunan dan pengelolaan sarana transportasi jalan Rp. 63.436.880
4. Pembangunan dan pengelolaan sarana transportasi jalan Rp. 189.496.150

5. Pembangunan dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan Rp. 10.885.650
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen pwehubungan darat Rp. 254.820.732

III.4.3.Hambatan dan Kendala

Dikarenakan :

1. sisa kontrak tidak bisa di efisiensi
2. terlambat melakukan revisi anggaran.



BAB 4

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Sebagai penutup dari LKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2017-2019, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2020 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten akan senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.

RENCANA KINERJA

TAHUNAN

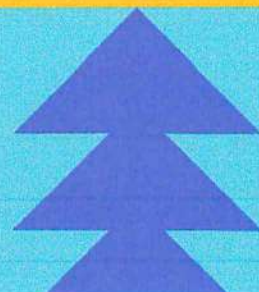
2020



**DIREKTORAT
JENDERAL
PERHUBUNGAN
DARAT**

Balai Pengelola Transportasi
Daerah (BPTD)

**Wilayah VIII
Provinsi Banten**



RENCANA KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
PROVINSI BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	-
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	-
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	lokasi	-
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	unit	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	lokasi	-
		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	lokasi	-
		g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	-
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	lokasi	-
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit	laporan	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		IKK 3 Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	7
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi	
		c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	-
		IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1
		IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	1
		IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		
		• Marka Jalan	m'	34.263
		• Rambu Lalu Lintas	buah	330
		• Patok Lalu Lintas	buah	250
		• Paku Jalan	buah	-
		• Pagar Pengaman Jalan	m'	35

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		• Cermin Tlkungan	buah	16
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	-
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	-
		e. Pengadaan Bus	unit	-
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	5
		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis	paket	-
		IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	3
		IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial		
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	-
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	-
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	-
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	-
		g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	-
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	-
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	-
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	-
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	lokasi	-
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	lokasi	-
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	lokasi	-
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	-
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	-
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	-
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1
		IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A	bahan	1

Merak, 2 Januari 2020

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VIII Provinsi Banten



ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680110 199603 1 001



**DIREKTORAT
JENDERAL
PERHUBUNGAN
DARAT**



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Merak, 2 Januari 2020

Pihak Pertama

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

NURHADI UNGGUL W., ST, MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19711116 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	-
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	-
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	lokasi	-
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	unit	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	lokasi	-
		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	lokasi	-
		g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	1
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	lokasi	-
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1
		IKK 3 Terlaksananya penerapan		

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	7
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi	7
		c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	-
		IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	3
		IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	1
		IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		
		• Marka Jalan	m'	34.263
		• Rambu Lalu Lintas	buah	330
		• Patok Lalu Lintas	buah	250
		• Paku Jalan	buah	-
		• Pagar Pengaman Jalan	unit	35
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		• Rambu Peringatan Pengguna Jalan	buah	16
		b. Jumlah Pemeliharaan		

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perlengkapan Jalan		
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	-
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	-
		e. Pengadaan Bus	unit	-
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	5
		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis	paket	-
		IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	3
		IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial		
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	-
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	-
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	-
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	-
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan	lokasi	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penyeberangan		
		g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	-
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	-
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	-
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	-
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	lokasi	-
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	lokasi	-
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	lokasi	-
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	-
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	-
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	-
		q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	-
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1
		IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A	bahan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 19.454.050.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 2.931.732.000
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 12.650.228.000
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 3.003.000.000
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Rp. 1.698.025.000
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 34.362.428.000

Merak , 2 Januari 2020

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Pihak Pertama



NURHADI UNGGUL W., ST, MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19711116 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN**

2020





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Merak, 1 September 2020

Pihak Pertama

ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680110 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru	lokasi	-
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan	lokasi	-
		c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A	lokasi	-
		d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	unit	-
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)	lokasi	-
		f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)	lokasi	-
		g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	-
		h. Pengadaan Lahan UPPKB	lokasi	-
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan	laporan	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		IKK 3 Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	7
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)	lokasi	7
		c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	lokasi	-
		IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1
		IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	1
		IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
		a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		
		• Marka Jalan	m'	34.263
		• Rambu Lalu Lintas	buah	330
		• Patok Lalu Lintas	buah	250
		• Paku Jalan	buah	-
		• Pagar Pengaman Jalan	unit	35
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		• Rambu Peringatan Pengguna Jalan	buah	16
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• Alat Penerangan Jalan	unit	208
		• Lampu Peringatan Pemakai Jalan	unit	-
		• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	paket	-
		c. Jumlah Paket ATCS (baru)	paket	-
		d. Pengembangan Transportasi Perkotaan	lokasi	-
		e. Pengadaan Bus	unit	-
		f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	5
		g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis	paket	-
		IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Lokasi	3
		IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial		
		a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air	unit	-
		b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	unit	-
		c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan	unit	-
		d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	lokasi	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	lokasi	-
		f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	lokasi	-
		g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	lokasi	-
		h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	lokasi	-
		i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	lokasi	-
		j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru	lokasi	-
		k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	lokasi	-
		l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau	lokasi	-
		m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)	lokasi	-
		n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	unit	-
		o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau	unit	-
		p. Jumlah Unit Halte Sungai	unit	-
		q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan	paket	-
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan	laporan	1
		IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring	bahan	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A		

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 19.454.050.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 2.931.732.000
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp. 12.650.228.000
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp. 3.003.000.000
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Rp. 1.698.025.000
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 34.362.428.000

Merak, 1 September 2020

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Pihak Pertama



ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680110 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN

2021





REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT.**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merak, 1 Juli 2021

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Pihak Pertama

HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT
Pembina TK.I-IV/b
NIP. 19701124 199403 1 006

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
PROVINSI BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	14
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	0
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 2.640.259.000
2.	4638 Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 14.798.019.000
3.	4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 27.424.733.000
4.	4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.465.658.000
5.	4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 14.605.449.000
JUMLAH		Rp. 63.934.118.000

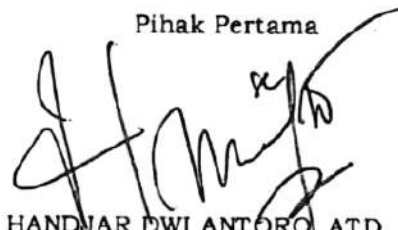
Merak, 1 Juli 2021

Pihak Kedua



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Pihak Pertama



HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT
Pembina TK.I-IV/b
NIP. 19701124 199403 1 006



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN**

2021





REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT.**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Merak, 1 Juli 2021

Pihak Pertama

HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19701124 199403 1 006

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
PROVINSI BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	14
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	0
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

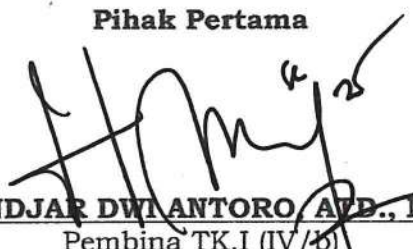
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 2.640.259.000
2.	4638 Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 14.798.019.000
3.	4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 27.424.733.000
4.	4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.465.658.000
5.	4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 14.605.449.000
JUMLAH		Rp. 63.934.118.000

Merak, 1 Juli 2021

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Pihak Pertama


HANDJAR DWI ANTORO, A.P., MT.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19701124 199403 1 006



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id

**REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VII PROVINSI BANTEN**

[illegible]

[illegible]

4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	4.465.658.000	Para Kasi (Eselon IV)
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat, Layanan Sarana Internal	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	14.605.449.000	Kasubbag TU

Merak, 1 Juli 2021

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VII PROVINSI BANTEN**



HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT

Pembina TK.I-IV/b

NIP. 19701124 199403 1 006

WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN

[illegible]

[illegible]

			alur pelayaran SDP																	
4	SK5	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	4.455.658,00	Para Kasi (Eselon IV)
5	SK1	Meningkatkan Birokrasi Difen Perhubungan Darat Akuntabel	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Difen Perhubungan Darat	Nilai	90	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat, Layanan Sarana Internal	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	14.605,449,000	Kasubbag TU

Merak, 1 Juli 2021

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VII PROVINSI BANTEN


HANDJAR DWI ANTORO, A.T.D., MT
Pembina - IV/a
NIP. 19701124 199403 1 006

RENCANA KINERJA

TAHUNAN

2021



**DIREKTORAT
JENDERAL
PERHUBUNGAN
DARAT**

Balai Pengelola Transportasi
Daerah (BPTD)

**Wilayah VIII
Provinsi Banten**



REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
PROVINSI BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	14
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0

			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	0
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Merak, 1 Juli 2021

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VIII Provinsi Banten



HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT
Pembina TK.I-IV/b
NIP. 19701124 199403 1 006



**DIREKTORAT
JENDERAL
PERHUBUNGAN
DARAT**



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id

RENCANA KINERJA

TAHUNAN

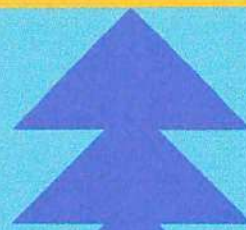
2021



**DIREKTORAT
JENDERAL
PERHUBUNGAN
DARAT**

Balai Pengelola Transportasi
Daerah (BPTD)

**Wilayah VIII
Provinsi Banten**



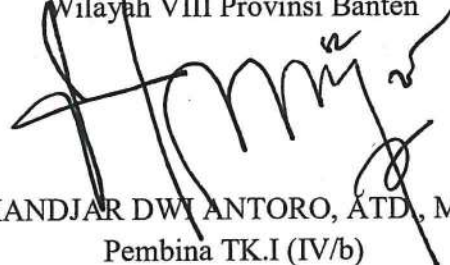
REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
PROVINSI BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	100
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	14
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0

			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	0
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Merak, 1 Juli 2021

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VIII Provinsi Banten



HANDJAR DWI ANTORO, ATD, MT.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19701124 199403 1 006



**DIREKTORAT
JENDERAL
PERHUBUNGAN
DARAT**



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id

**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
PROVINSI BANTEN**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII PROVINSI
BANTEN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan monitoring capaian kinerja merupakan laporan monitoring secara berkala (triwulan) atas pelaksanaan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) 2021 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2021 disusun untuk memantau progres pencapaian kinerja pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Selain itu laporan monitoring juga menyampaikan realisasi anggaran yang telah tercapai pada tahun 2021.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2021 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten. Semoga laporan monitoring capaian kinerja ini bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan pemenuhan target kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten tahun 2021.

Merak, 29 April 2021

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VIII Provinsi Banten

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'se' followed by a stylized signature.

HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701124 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	3
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	4
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021	6
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	6
B. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	9
C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	11
D. REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA.....	19
BAB III PENUTUP	23
A. KESIMPULAN	23
B. REKOMENDASI	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Monitoring Capaian Kinerja.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada khususnya dan Kementerian Perhubungan pada umumnya. Laporan Monitoring Capaian Kinerja dilaporkan setiap Triwulan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Monitoring Capaian Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Peraturan menteri PAN-RB Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Peraturan Menteri PAN-RB Nomer 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan monitoring capaian kinerja triwulan I tahun 2021 disusun dengan maksud penyampaian informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja masing-masing indikator dalam waktu tertentu sesuai target rencana aksi pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Tujuan penyusunan laporan monitoring kinerja adalah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja pada triwulan I tahun 2021, identifikasi permasalahan atau kendala serta memberikan rekomendasi perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Capaian kinerja (*performance result*) triwulan I tahun 2021 merupakan perbandingan dengan target pada rencana aksi triwulan I yang tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini juga termasuk identifikasi kegiatan yang mendukung kinerja (*performance gap*) guna perbaikan terhadap kinerja program atau kegiatan di periode berikutnya.

C. TUGAS DAN FUNGSI

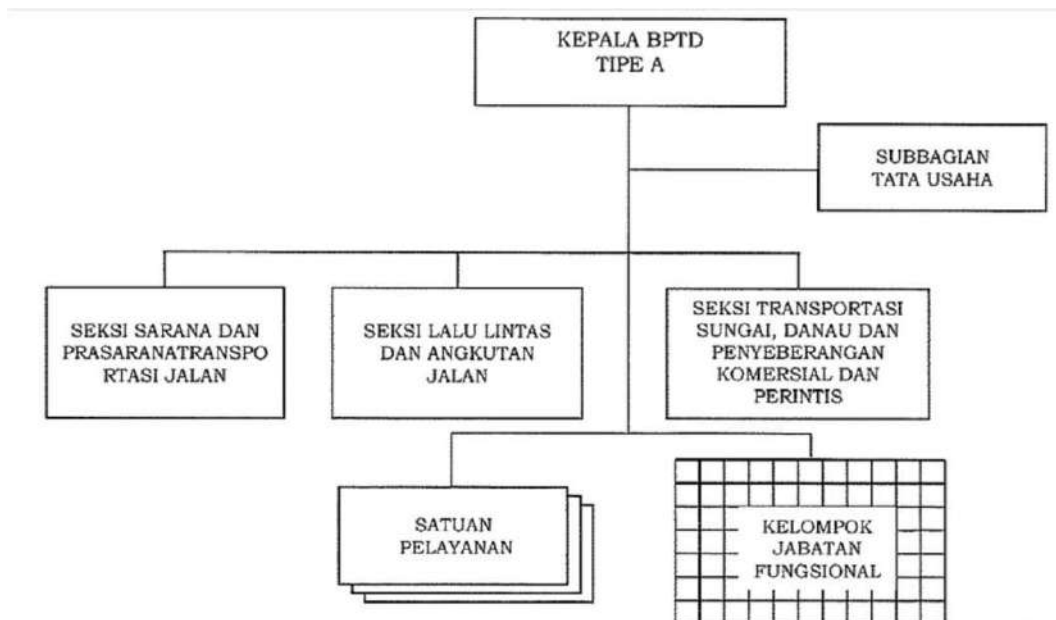
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
 - 3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan

- dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
- 4) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, dan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari subbagian tata usaha, seksi sarana dan prasarana transportasi jalan, seksi lalu lintas dan angkutan jalan dan seksi transportasi sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis sebagaimana pada bagan berikut :



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten pada triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 335 orang, dengan uraian sebagai berikut :

No	UNIT KERJA	PNS	PPNP	JUMLAH	TENAGA KESEHATAN	TOTAL
1	Kantor Induk	23	55	78	2	80
2	Satpel Pelabuhan	4	33	37	0	37
3	Satpel Terminal Merak	5	59	64	1	65
4	Satpel Terminal Pakupatan	4	65	69	1	70
5	Satpel Terminal Labuan	4	30	34	0	34
6	Satpel Terminal Lebak	4	26	30	0	30
7	Satpel UPPKB Cimanuk	2	9	11	0	11
8	Satpel UPPKB Cikande	1	18	19	0	19
TOTAL		47	295	342	4	346

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan monitoring triwulan I tahun 2021 sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

Memuat gambaran singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta terkait unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten yang termuat dalam kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia.

b. Bab II Capaian Kinerja Triwulan I

Memuat perjanjian kinerja (PK) tahun 2021, metode pengukuran untuk analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran unit kerja. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis unit kerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan perbandingan target dan realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2021, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan serta alternatif solusi dan rekomendasi terhadap peningkatan kinerja. Selain itu juga memuat realisasi keuangan unit kerja terkait pelaksanaan anggaran dengan triwulan I tahun 2021.

c. Bab III Penutup

Memuat tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan unit kerja di periode berikutnya dalam upaya peningkatan kinerja unit kerja.

d. Lampiran

Terdiri dari rencana aksi tahun 2021 dan monitoring rencana aksi setiap bulan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pada perjanjian kinerja (PK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten tahun 2021 ditetapkan 5 sasaran dan 30 indikator kinerja kegiatan. Pada bulan April tahun 2021 telah dilakukan revisi perjanjian kinerja (PK) tahun 2021 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten disebabkan adanya pergantian Kepala Balai.

Target kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten berdasarkan revisi perjanjian kinerja (PK) tahun 2021 sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 1 Tersusunnya rencana, program dan anggaran,	Laporan	1
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan hukum dan humas	Laporan	12
		IKK 3 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan	1
		IKK 4 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 5 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	laporan	4
		IKK 6 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	bahan	0
		IKK 7 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan,	laporan	4

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB		
		IKK 8 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1
		IKK 9 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024	laporan	1
		IKK 10 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	lokasi	7
		IKK 11 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	laporan	12
		IKK 12 Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	laporan	2
		IKK 13 Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	4
		IKK 14 Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	laporan	4
		IKK 15 Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1
		IKK 16 Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Laporan	1
		IKK 17 Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 18 Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Laporan	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 19 Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 20 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 21 Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 22 Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Laporan	1
		IKK 23 Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Laporan	1
		IKK 24 IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 25 IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Laporan	2
		IKK 26 Rata – rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan Keterangan : - Port Time : Waktu Kapal di Dermaga# - Sailing Time : Waktu kapal Berlayar	Laporan	12
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 27 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Adapun untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat, antara lain : • Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan SDP Komersil dan Perintis; • Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Jalan,	Laporan Laporan	12 2

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sungai dan Danau dan Penyeberangan (RAMPCHECK); • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan; • Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit; IKK 28 Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan.	Laporan Laporan Laporan	12 12 12
5.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 29 IKK 1.8 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak
		IKK 30 IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak

B. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja di definisikan sebagai proses sistematis dalam menginventarisir, menganalisis, dan menggunakan data atau informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program-program sesuai dengan program dan fungsinya. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja lebih efektif dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan sampai dengan akhir tahun.

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja dilakukan melalui pencapaian hasil atau *output* suatu kegiatan dalam waktu tertentu. Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja yaitu :

1. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2021 terhadap target kinerja triwulan I tahun 2021;
2. Analisis penyebab tercapai atau tidak tercapai kinerja termasuk identifikasi permasalahan;
3. Upaya peningkatan kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana acuan pada peraturan menteri perhubungan Nomer PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator kinerja menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam instansi pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur. Untuk mengetahui capaian kinerja antara rencana dan realisasi suatu *output* dan *outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan **tidak tercapai sesuai dengan target**, formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila *output* suatu kegiatan **tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran**, maka formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sasaran terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkala pada triwulan I yang meliputi capaian kinerja bulan Januari, Februari dan Maret dengan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Sasaran Program	Indikator Kenerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Capaian Kinerja
					Volume	Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 1 Tersusunnya rencana, program dan anggaran,	Laporan	1	1	-	-	100
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan hukum dan humas	Laporan	12	1	1	1	24,9
		IKK 3 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan	1	-	-	-	0
		IKK 4 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1	-	-	-	0

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Capaian Kinerja
					Volume	Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 5 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	laporan	4	-	-	-	0
		IKK 6 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	bahan	0	-	-	-	-
		IKK 7 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	laporan	4	-	-	-	0
		IKK 8 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1	-	-	-	0

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Capaian Kinerja
					Volume	Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		IKK 9 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024	laporan	1	1	-	-	100
		IKK 10 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	lokasi	7	-	-	1	14,28
		IKK 11 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	laporan	12	1	1	1	25
		IKK 12 Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	laporan	2	-	-	-	0
		IKK 13 Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	4	1	-	-	25
		IKK 14 Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	laporan	4	1	-	-	25

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Capaian Kinerja
					Volume	Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		IKK 15 Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1	-	-	-	0
		IKK 16 Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Laporan	1	-	-	-	0
		IKK 17 Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1	-	-	-	0
		IKK 18 Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Laporan	1	-	-	-	0
		IKK 19 Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1	-	-	-	0
		IKK 20 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Laporan	1	-	-	-	0
		IKK 21 Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Laporan	1	-	-	-	0

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Capaian Kinerja
					Volume	Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		IKK 22 Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Laporan	1	-	-	-	0
		IKK 23 Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Laporan	1	-	-	-	0
		IKK 24 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak	1	-	-	100
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 25 Persentase pelaksanaan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Laporan	2				
		IKK 26 Rata – rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan Keterangan : - Port Time : Waktu Kapal di Dermaga# IKK 27 Sailing Time : Waktu kapal Berlayar	Laporan	12	1	1	1	25

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Capaian Kinerja
					Volume	Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 28 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Adapun untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat, antara lain : • Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan SDP Komersil dan Perintis; • Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Jalan, Sungai dan Danau dan Penyeberangan (RAMPCHECK); • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan; • Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit;	Laporan	12	1	1	1	25

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Capaian Kinerja
					Volume	Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan.	Laporan	2	-	-	1	50
			Laporan	12	1	1	1	25
			Laporan	12	1	1	1	25
			Laporan	12	1	1	1	25
5.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat	IKK 29 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi	Pelabuhan Penyebera	1	-	-	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Realisasi Kinerja Bulan 1	Capaian Kinerja
					Volume	Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi			ngan Merak				
		IKK 30 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak	1	-	-	100

D. REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Bedasarkan Nomor DIPA SP SIPA-022.03.2.403848/2021 tanggal 23 November 2020 anggaran yang sudah terealisasi pada Triwulan I dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	Realisasi Anggaran Bulan ke 1 (%)	Realisasi Anggaran Bulan ke 2 (%)	Realisasi Anggaran Bulan ke 3 (%)
(1)	(2)	(3)			
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.355.449.000	1.411.294.287 (0,091)	2.525.831.128 (16)	3.835.929.409 (24,9)
2.	Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Rp. 100.000.000	-	23.104.800 (23)	23.104.800 (23)
3.	Monitoring Inventarisasi Aset	Rp. 154.000.000	-	-	-
4.	Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp. 300.000.000	-	-	48.262.500 (16)
5.	Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi Koordinasi Kelembagaan	Rp. 1.000.000.000	-	57.227.000 (5,7)	165.251.850 (16)
6.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan SDP Komersil dan Perintis	Rp. 153.040.000,-	68.000.000 (44)	68.000.000 (44)	81.944.000 (53,5)

7.	Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Jalan, Sungai dan Danau dan Penyeberangan (RAMPCHECK)	Rp. 120.000.000,-	-	-	38.760.000 (32,3)
8.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan	Rp. 260.000.000,-	-	26.980.000 (10)	53.960.000 (20,7)
9.	Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit	Rp. 1.000.000.000,-	-	-	-
10.	Operasioanl Satpel Pelabuhan Penyeberangan	Rp. 1.889.895.000,-	90.000.000 (4,76)	204.971.150 (10,85)	325.265.150 (17,21)
11.	Pemeliharaan Ruang Kendali dan Informasi	Rp. 100.000.000,-	-	-	-
12.	Pemeliharaan Sistem Peralatan dan Pengawasan	Rp. 100.000.000,-	-	-	-
13.	Pemeliharaan VMS	Rp. 100.000.000,-	-	-	-
14.	Pemeliharaan Videotron di Pelabuhan Penyeberangan Merak	Rp. 100.000.000,-	-	-	-
15.	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Rp. 12.918.124.000	411.640.600 (3,19)	2.247.628.250 (17,40)	1.413.353.450 (10,94)

16.	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Rp. 3.834.610.000	-	694.340.000 (18,11)	-
17.	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 750.000.000	-	-	-
18.	Rehabilitasi Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor	Rp. 4.000.000.000	-	-	-
19.	Operasional UPPKB	Rp. 1.917.168.000	5.259.650 (0,27)	141.117.700 (7,36)	306.290.300 (15,98)
20.	Monitoring, Evaluasi, dan Akreditasi UPUBKB	Rp. 80.000.000	-	10.766.000 (13)	10.766.000 (13,4)
21.	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	Rp. 584.900.000	-	62.808.800 (10,7)	147.393.886 (25,1)
22.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 15.032.138.000	-	2.857.486.800 (17,62)	-
23.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 2.931.732.000	-	214.991.497 (7,33)	429.982.994 (14,67)
24.	Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	Rp. 1.459.000.000	166.440.000 (11)	269.876.400 (18)	303.598.800 (20,8)
25.	Monitoring dan Pembahasan Evaluasi Andalalin	Rp. 554.900.000	-	-	-

26.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp. 120.000.000	-	7.800.000 (6,5)	86.662.500 (72)
27.	Audit dan Inspeksi Jalan Nasional	Rp. 60.000.000	-	300.000 (0,5)	600.000 (10)
28.	Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp. 147.000.000	-	4.003.700 (2,7)	69.283.700 (47,1)

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini perlu di susun secara berkala setiap triwulan sebagai salah satu alat penilai kinerja serta pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

B. REKOMENDASI

Hal-hal yang direkomendasikan sebagai hasil monitoring capaian kinerja balai pengelola transportasi darat wilayah VIII provinsi banten triwulan I tahun 2021 sebagai berikut :

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk triwulan ke-2 berikutnya, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan ke-1 kegiatan yang belum terlaksana dapat dilaksanakan sesuai target Perjanjian Kinerja.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten akan senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.

LAMPIRAN
MONITORING RENAKSI PERIODE JANUARI –
MARET TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN

2021





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merak, 9 April 2021

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784

Pihak Pertama

HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT

Pembina TK.I-IV/b

NIP. 19701124 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII PROVINSI
BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 1 Tersusunnya rencana, program dan anggaran,	Laporan	1
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan hukum dan humas	Laporan	12
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 3 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	laporan	4
		IKK 4 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	bahan	0
		IKK 5 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	laporan	4
		IKK 6 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1
		IKK 7 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024	laporan	1
		IKK 8 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	lokasi	7
		IKK 9 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	laporan	12
		IKK 10 Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	laporan	2

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 11 Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	4
		IKK 12 Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	laporan	4
3.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 13 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan	1
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 14 Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1
		IKK 15 Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Laporan	1
		IKK 16 Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 17 Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 18 Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 19 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 20 Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 21 Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Laporan	1
		IKK 22 Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Laporan	1
5.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 23 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
6.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan	IKK 1.8 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Antarmoda Transportasi			
		IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak
7.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Laporan	2
		IKK 2.4 Rata – rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan Keterangan : - Port Time : Waktu Kapal di Dermaga# - Sailing Time : Waktu kapal Berlayar	Laporan	12
8.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Adapun untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat, antara lain : • Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan SDP Komersil dan Perintis; • Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Jalan, Sungai dan Danau dan Penyeberangan (RAMPCHECK); • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan; • Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit; • Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan.	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	
9.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.8 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak
		IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.355.449.000
2.	Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Rp. 100.000.000
3.	Monitoring Inventarisasi Aset	Rp. 154.000.000
4.	Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp. 300.000.000
5.	Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi Koordinasi Kelembagaan	Rp. 1.000.000.000
6.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan SDP Komersil dan Perintis	Rp. 153.040.000,-
7.	Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Jalan, Sungai dan Danau dan Penyeberangan (RAMPCHECK)	Rp. 120.000.000,-
8.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan	Rp. 260.000.000,-
9.	Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit	Rp. 1.000.000.000,-
10.	Operasioanl Satpel Pelabuhan Penyeberangan	Rp. 1.889.895.000,-
11.	Pemeliharaan Ruang Kendali dan Informasi	Rp. 100.000.000,-
12.	Pemeliharaan Sistem Peralatan dan Pengawasan	Rp. 100.000.000,-
13.	Pemeliharaan VMS	Rp. 100.000.000,-
14.	Pemeliharaan Videotron di Pelabuhan Penyeberangan Merak	Rp. 100.000.000,-
15.	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Rp. 12.918.124.000
16.	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Rp. 3.834.610.000
17.	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 750.000.000
18.	Rehabilitasi Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor	Rp. 4.000.000.000
19.	Operasional UPPKB	Rp. 1.917.168.000
20.	Monitoring, Evaluasi, dan Akreditasi UPUBKB	Rp. 80.000.000
21.	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	Rp. 584.900.000
22.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp. 15.032.138.000
23.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp. 2.931.732.000

24.	Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun BAru	Rp.	1.459.000.000
25.	Monitoring dan Pembahasan Evaluasi Andalalin	Rp.	554.900.000
26.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp.	120.000.000
27.	Audit dan Inspeksi Jalan Nasional	Rp.	60.000.000
28.	Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp.	147.000.000

Merak, 9 April 2021

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784

Pihak Pertama



HANDJAR DWI ANTORO, ATD., MT

Pembina TK.I-IV/b

NIP. 19701124 199403 1 006



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id

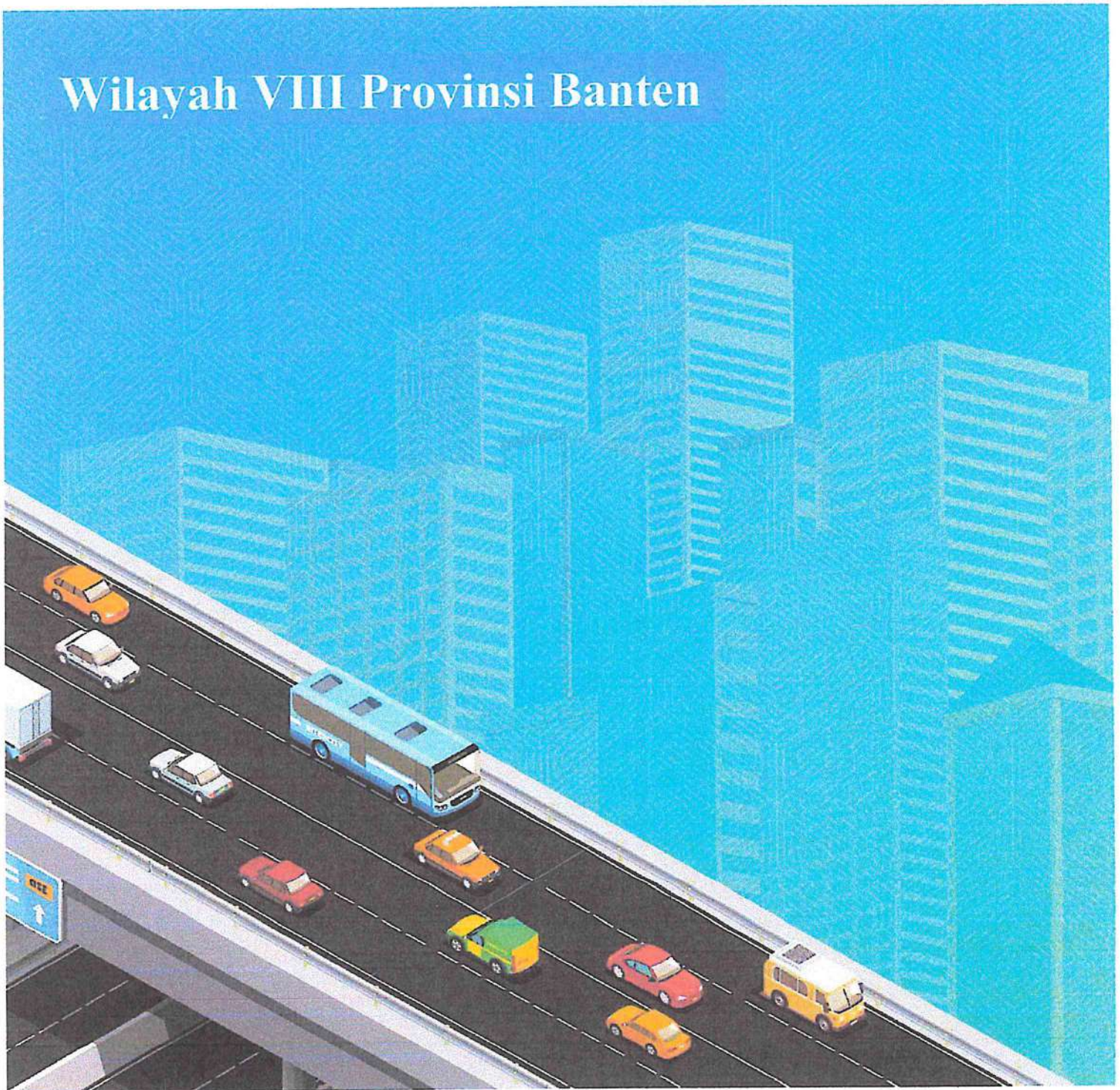
RENCANA AKSI



TAHUN 2021

Unit Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Wilayah VIII Provinsi Banten



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
						T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Diijen Perhubungan Darat	IKK 1 Tersusunnya rencana, program dan anggaran,	Laporan	1		√				TU	
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan humas	Laporan	12		√	√	√	√	TU	
2.	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 3 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	Laporan	4		√	√	√	√	Sarpras	
		IKK 4 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	Bahan	0						Sarpras	
		IKK 5 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	Laporan	4		√	√	√	√	Sarpras	
		IKK 6 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana	Laporan	1		√				Sarpras	

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
						T1	T2	T3	T4		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)									
		IKK 7 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOOS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024	Laporan	1		√					Sarpras
		IKK 8 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Lokasi	12		√	√	√	√		Sarpras
		IKK 9 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	Laporan	12		√	√	√	√		Sarpras
		IKK 10 Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	Laporan	2		√		√			Sarpras
		IKK 11 Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	Bahan	4		√	√	√	√		Sarpras
		IKK 12 Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	Laporan	4		√	√	√	√		Sarpras
3.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 13 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	Laporan	1		√					Sarpras
4.	Meningkatnya Kinerja	IKK 14 Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1			√				LLAJ

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 15 Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlekengapan jalan	Laporan	1			√				LLAJ
							√			LLAJ
								√		LLAJ
							√			LLAJ
									√	LLAJ
										LLAJ
IKK 16 Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1								LLAJ
										LLAJ
										LLAJ
										LLAJ
										LLAJ
IKK 17 Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Laporan	1								LLAJ
										LLAJ
										LLAJ
										LLAJ
IKK 18 enyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1					√			LLAJ
										LLAJ
										LLAJ
IKK 19 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Laporan	1						√		LLAJ
										LLAJ
IKK 20 Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Laporan	1						√		LLAJ
										LLAJ
IKK 21 Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Laporan	1						√		LLAJ
										LLAJ
IKK 22 Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Laporan	1							√	LLAJ
										LLAJ
5.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen	IKK 23 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1					√	LLAJ

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perhubungan Darat									
6.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.8 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak		✓				TSDP
		IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak		✓				TSDP
7.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Laporan	2			✓		✓	TSDP
		IKK 2.4 Rata – rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan Keterangan : - Port Time : Waktu Kapal di Dermaga# - Sailing Time : Waktu kapal Berlayar	Laporan	12		✓	✓	✓	✓	TSDP
8.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Adapun untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat, antara lain : • Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan SDP Komersil dan Perintis; • Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Jalan, Sungai dan Danau dan Penyeberangan (RAMPCHECK);	Laporan Laporan	12 2		✓	✓	✓	✓	TSDP

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
						T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		• Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan; • Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit; • Operasional Satpel Pelabuhan Penyelenggaraan.	Laporan Laporan Laporan	12 12 12		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		
9.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.8 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi	Pelabuhan Penyelenggaraan Merak		✓				TSDP	
		IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyelenggaraan Merak		✓				TSDP	

Merak, 9 April 2021

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VII Provinsi Banten

HANDJAR DWIJANTORO, APT, MT
Pembina TK.1-IV/6
NIP. 19701124 199403 1 006



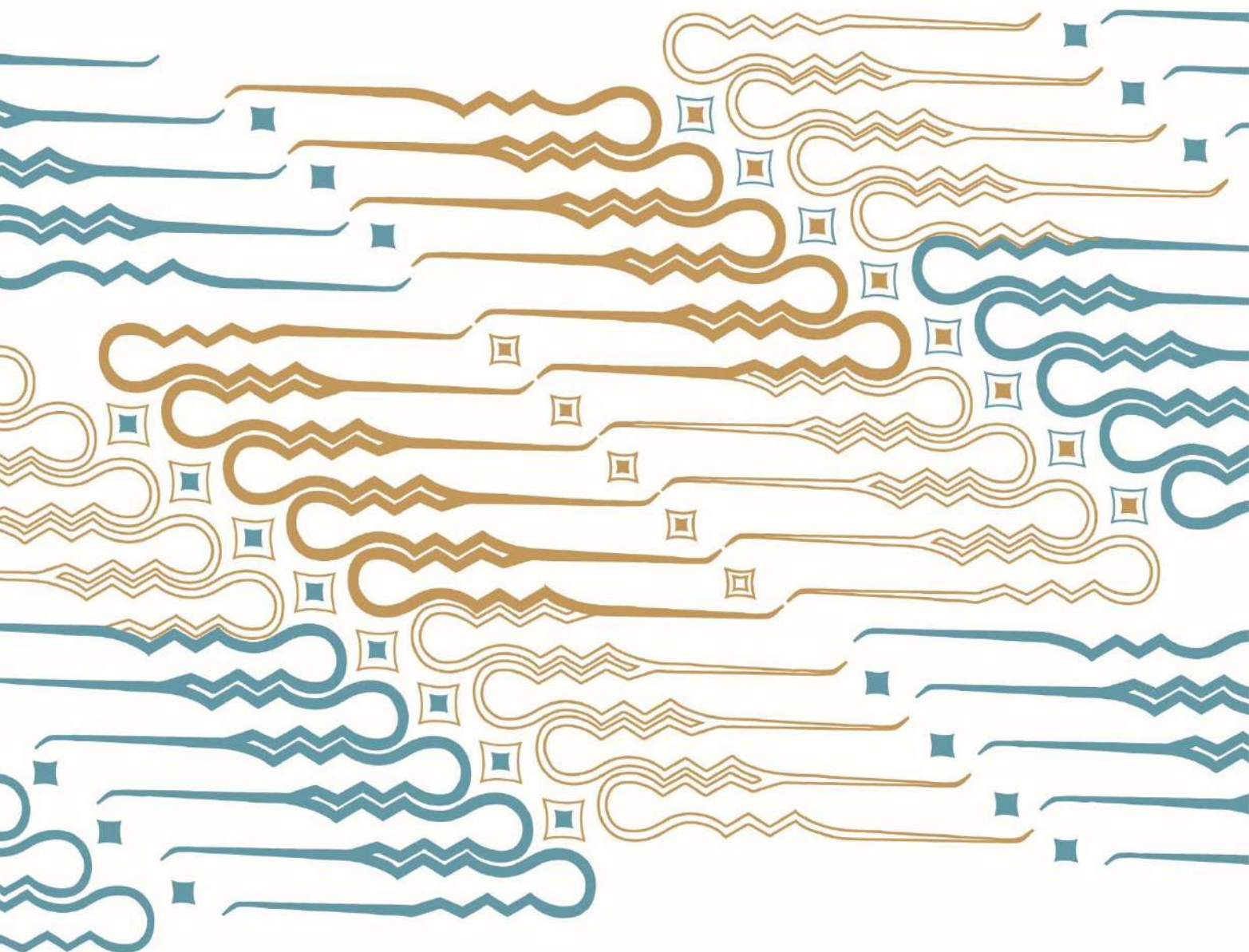


Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULANII TAHUN 2021



Daftar Isi



Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
Kata Sambutan	viii
Ringkasan Eksekutif	xi

Bab I Pendahuluan

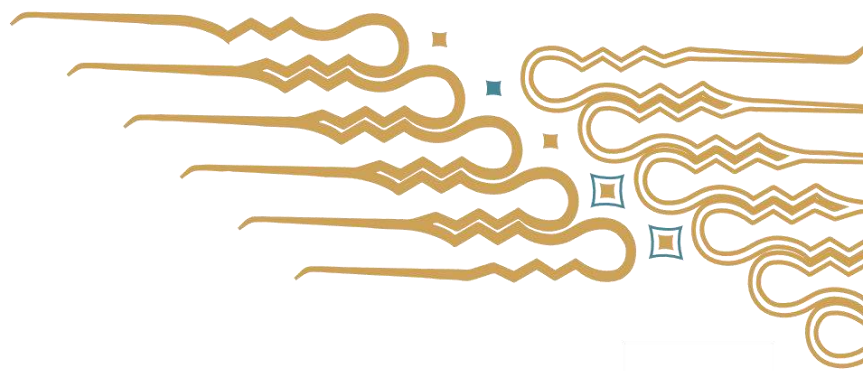
A. Latar Belakang	I-4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	I-5
C. Sumber Daya Manusia	I-26
D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-28
E. Sistematika Laporan	I-30
F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	I-31
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	I-34
H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional	I-36

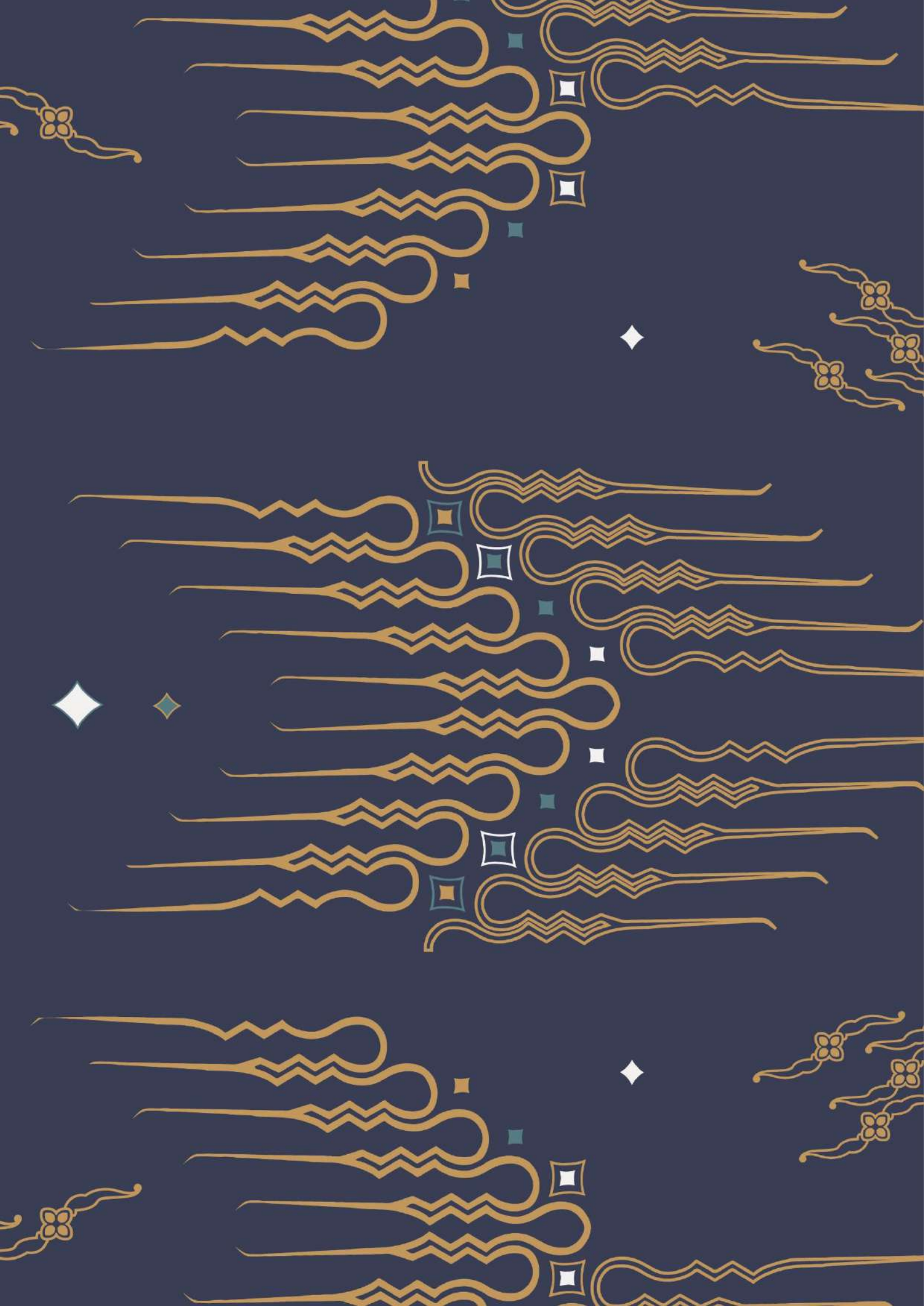
Bab II Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja	II-4
B. Capaian Kinerja Organisasi	II-6
C. Realisasi Anggaran	II-32

Bab III Penutup

A. Penutup	III-4
------------	-------







Kata Sambutan

Kata Sambutan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

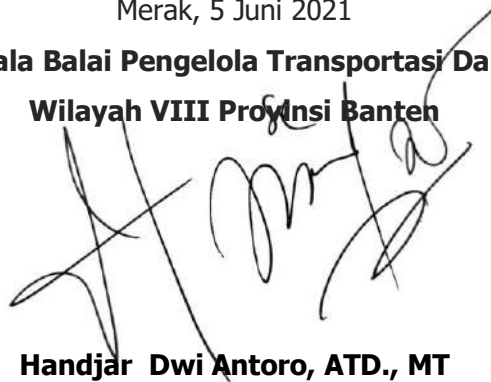
Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2021 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2021.



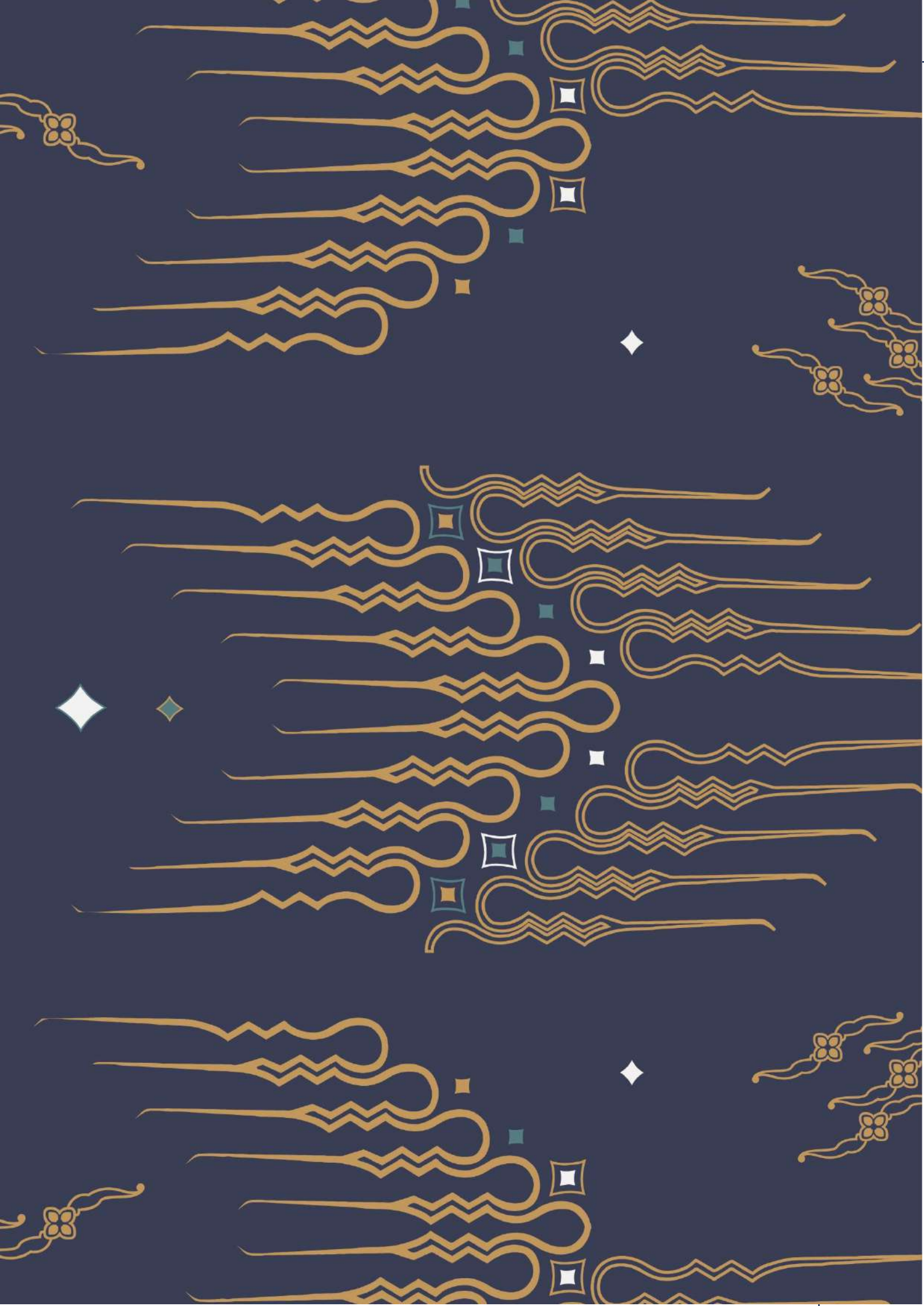
Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Merak, 5 Juni 2021

**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VIII Provinsi Banten**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Handjar Dwi Antoro', is written over the official title.

Handjar Dwi Antoro, ATD., MT





Bab I

Pendahuluan



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Monitoring Capaian Kinerja.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada khususnya dan Kementerian Perhubungan pada umumnya. Laporan Monitoring Capaian Kinerja dilaporkan setiap Triwulan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Monitoring Capaian Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Peraturan menteri PAN-RB Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Peraturan Menteri PAN-RB Nomer 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
 - 3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
 - 4) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan,

pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, dan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C;

Susunan Organisasi BPTD Tipe A terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Tipe B terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi BPTD Tipe C terdiri atas:

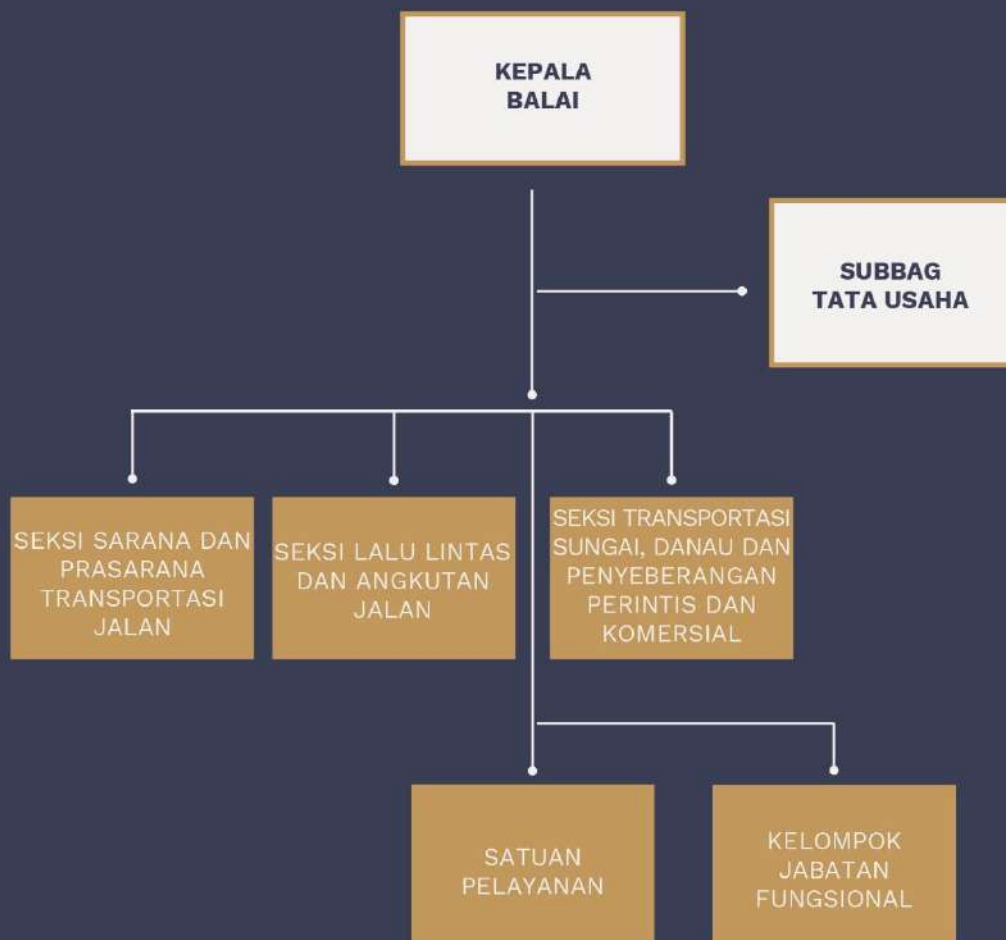
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Transportasi Jalan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

25 Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPTD Wil. I Aceh
2. BPTD Wil. II Sumut
3. BPTD Wil. III Sumbar

4. BPTD Wil. IV Riau dan Kepri
5. BPTD Wil. V Jambi
6. BPTD Wil. VI Bengkulu dan Lampung
7. BPTD Wil. VII Sumsel dan Babel
8. BPTD Wil. VIII Banten
9. BPTD Wil. IX Jabar
10. BPTD Wil. X Jateng dan DIY
11. BPTD Wil. XI Jatim
12. BPTD Wil. XII Bali dan NTB
13. BPTD Wil. XIII NTT
14. BPTD Wil. XIV Kalbar
15. BPTD Wil. XV Kalsel
16. BPTD Wil. XVI Kalteng
17. BPTD Wil. XVII Kaltim dan Kaltara
18. BPTD Wil. XVIII Sultra
19. BPTD Wil. XIX Sulsel dan Sulbar
20. BPTD Wil. XX Sulteng
21. BPTD Wil. XXI Gorontalo
22. BPTD Wil. XXII Sulut
23. BPTD Wil. XXIII Maluku
24. BPTD Wil. XXIV Maluku Utara
25. BPTD Wil. XXV Papua dan Papua Barat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) TIPE A



C. Sumber Daya Manusia

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten pada triwulan II tahun 2021 adalah sebanyak 335 orang, dengan uraian sebagai berikut :

No	UNIT KERJA	PNS	PPNPN	JUMLAH	TENAGA KESEHATAN	TOTAL
1	Kantor Induk	23	55	78	2	80
2	Satpel Pelabuhan	4	33	37	0	37
3	Satpel Terminal Merak	5	59	64	1	65
4	Satpel Terminal Pakupatan	4	65	69	1	70
5	Satpel Terminal Labuan	4	30	34	0	34
6	Satpel Terminal Lebak	4	26	30	0	30
7	Satpel UPPKB Cimanuk	2	9	11	0	11
8	Satpel UPPKB Cikande	1	18	19	0	19
TOTAL		47	295	342	4	346

D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- 1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - a. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - b. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - c. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

- 2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

- 3) PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- b. Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPLJSKB dan BPTD).

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki wilayah kerja 2 Provinsi.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (Over Dimension Over Loading);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2021 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

E. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- C. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- E. Sistematika Laporan
- F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- A. Tahapan Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran

F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 1 Tersusunnya rencana, program dan anggaran,	Laporan	1
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan hukum dan humas	Laporan	12
		IKK 3 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan	1
		IKK 4 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 5 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	laporan	4

		IKK 6	Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	bahan	0
		IKK 7	Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	laporan	4
		IKK 8	Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan	1
		IKK 9	Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024	laporan	1
		IKK 10	Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	lokasi	7
		IKK 11	Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	laporan	12
		IKK 12	Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	laporan	2
		IKK 13	Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	4
		IKK 14	Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	laporan	4
		IKK 15	Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1
		IKK 16	Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Laporan	1
		IKK 17	Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1

		IKK 18	Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 19	Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 20	Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 21	Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 22	Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Laporan	1
		IKK 23	Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Laporan	1
		IKK 24	IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 25	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Laporan	2
		IKK 2.4	Rata – rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan Keterangan : - Port Time : Waktu Kapal di Dermaga# IKK 26 Sailing Time : Waktu kapal Berlayar	Laporan	12
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Adapun untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat, antara lain : • Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan SDP Komersil dan Perintis; • Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Jalan, Sungai dan Danau dan	Laporan Laporan	12 2

		Penyeberangan (RAMPCHECK); • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan; • Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit; IKK 27 Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan.	Laporan Laporan Laporan	12 12 12
5.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 28 IKK 1.8 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak
		IKK 29 IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak

CASCADING DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020-2024

STAKEHOLDER'S PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS (SS1) Terwujudnya KonektivitasTransportasi Nasional	SASARAN STRATEGIS (SS2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	SASARAN STRATEGIS (SS3) Meningkatnya Keselamatan Transportasi
CUSTOMER'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP1) Terwujudnya KonektivitasTransportasi Nasional IKP1: Rasio Konektivitas Transportasi Darat IKP5: Rasio Konaktivitas Perkotaan	SASARAN PROGRAM (SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan IKP1: IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Darat IKP6: OTP Transportasi SDP IKP7: OTP Transportasi Perkotaan	SASARAN PROGRAM (SP3) Meningkatnya Keselamatan Transportasi IKP1: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan IKP2: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000 Pelayaran
INTERNAL PROCESS'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP1) Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum IKP1: Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan		
LEARN & GROWTH'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik IKP1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan		

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 64.956.567.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 30 Tersusunnya rencana, program dan anggaran,	Laporan	1
		IKK 31 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan hukum dan humas	Laporan	12
		IKK 32 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan	1
		IKK 33 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
7.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 34 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	laporan	4
		IKK 35 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	bahan	0
		IKK 36 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	laporan	4
		IKK 37 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi	laporan	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		IKK 38 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024	laporan	1
		IKK 39 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	lokasi	7
		IKK 40 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	laporan	12
		IKK 41 Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	laporan	2
		IKK 42 Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan	4
		IKK 43 Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	laporan	4
		IKK 44 Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1
		IKK 45 Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Laporan	1
		IKK 46 Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 47 Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Laporan	1
		IKK 48 Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		• Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan; • Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit; IKK 56 Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan.	Laporan Laporan Laporan	12 12 12
10.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 57 IKK 1.8 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak
		IKK 58 IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak

Tabel Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2021

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target PK 2020	Target Renstra 2024	Target PK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
11.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 59 Tersusunnya rencana, program dan anggaran,	Laporan			1
		IKK 60 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan hukum dan humas	Laporan			12
		IKK 61 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	laporan			1
		IKK 62 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan			1
12.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 63 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	laporan			4
		IKK 64 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	bahan			0
		IKK 65 Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	laporan			4
		IKK 66 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	laporan			1
		IKK 67 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024	laporan			1
		IKK 68 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	lokasi			7

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target PK 2020	Target Renstra 2024	Target PK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		IKK 69 Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	laporan			12
		IKK 70 Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	laporan			2
		IKK 71 Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	bahan			4
		IKK 72 Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	laporan			4
		IKK 73 Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan			1
		IKK 74 Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Laporan			1
		IKK 75 Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan			1
		IKK 76 Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Laporan			1
		IKK 77 Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan			1
		IKK 78 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Laporan			1
		IKK 79 Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Laporan			1
		IKK 80 Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Laporan			1
		IKK 81 Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Laporan			1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target PK 2020	Target Renstra 2024	Target PK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		IKK 82 IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi			Pelabuhan Penyeberangan Merak
13.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 83 IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Laporan			2
		IKK 2.4 Rata – rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan Keterangan : - Port Time : Waktu Kapal di Dermaga# IKK 84 Sailing Time : Waktu kapal Berlayar	Laporan			12
14.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Adapun untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat, antara lain : • Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan SDP Komersil dan Perintis; • Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Jalan, Sungai dan Danau dan Penyeberangan (RAMPCHECK); • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan; • Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit; IKK 85 Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan.	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan			12 2 12 12 12
15.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan	IKK 86 IKK 1.8 Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi			Pelabuhan Penyeberangan Merak

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target PK 2020	Target Renstra 2024	Target PK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Antarmoda Transportasi					
		IKK 87 IKK 1.10 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi			Pelabuhan Penyeberangan Merak

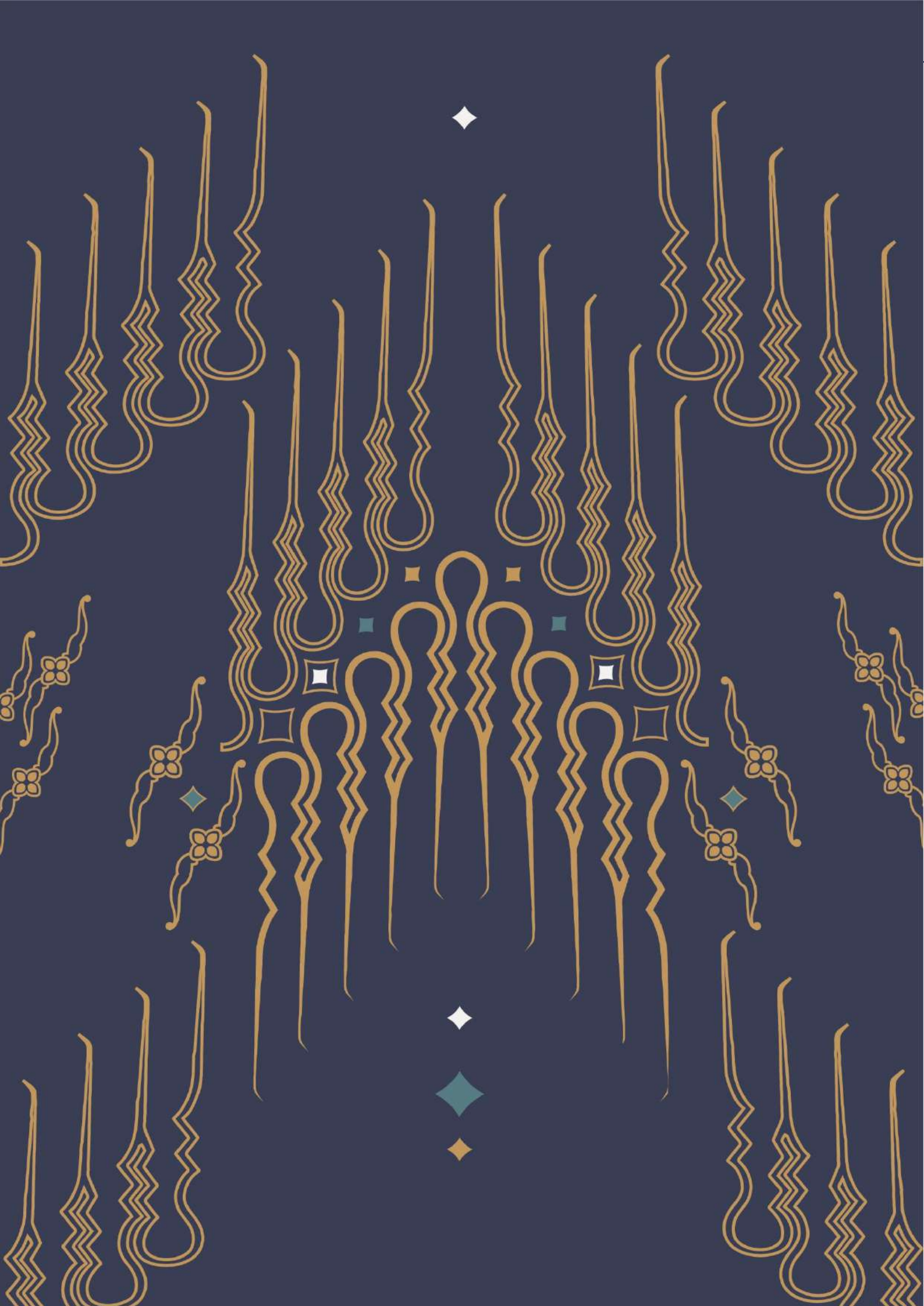
H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional maka *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan. *Refocusing* dan realokasi belanja dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di akhir Triwulan I Tahun 2021 berupaya melakukan revisi terhadap perjanjian kinerja dalam rangka menyelaraskan dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tujuan revisi pada perjanjian kinerja dan dokumen terkait diharapkan dapat selaras dengan dinamika kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka penanganan krisis.

Tabel Perubahan Pagu Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Akselerasi PEN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	7.098.656.000	7.098.656.000	6.348.656.000
Belanja Barang	54.041.983.000	42.317.925.000	42.317.925.000
• RM	49.457.373.000	37.733.315.000	37.733.315.000
• PNB	4.584.610.000	4.584.610.000	4.584.610.000
Belanja Modal	27.264.641.000	16.289.986.000	16.289.986.000
• RM	27.264.641.000	16.289.986.000	16.289.986.000
• PNB	0	0	0
• SBSN	0	0	0
TOTAL	Rp88.405.280.000	Rp65.706.567.000	Rp64.956.567.000



Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan





Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Program (SP) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maka diperoleh data Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebesar **135,70%**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran program sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 1 Capaian IKP dan SP Triwulan II Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	TARGET	TRIWULAN II				
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
SK1	Meningkatkan dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat				100%				
IKK 1	Tersusunnya rencana, program dan anggaran,	Laporan	1	0	0			Rp. 31.344.800	44,78%
IKK 2	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Laporan	12	3	3			1.074.957.485	36,67%
IKK 3	Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan sarana dan prasarana transportasi jalan	Laporan	1	0	0				
IKK 4	Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1	0	0			131.075.000	89%
SK2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat				100%				
IKK 5	Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A dan SMART Terminal	Laporan	4	1	1			6.279.061.983	48,61%
IKK 6	Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang	Bahan	0	0	0				
IKK 7	Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan UPPKB	Laporan	4	1	1			1.608.466.822	27,18%
IKK 8	Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Laporan	1	0	0			22.402.800	29,87%
IKK 9	Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024	Laporan	1	1	1			2.360.756.000	61,56%
IKK 10	Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Lokasi	7	0	0			12.670.000	19,49
IKK 11	Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	Laporan	12	3	3			255.695.097	43,71%
IKK 12	Penyusunan bahan evaluasi dan pengawasan teknis industri karoseri	Laporan	2	1	1				
IKK 13	Penyusunan bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor	Bahan	4	1	1				
IKK 14	Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengawasan uji berkala kendaraan bermotor	Laporan	4	1	1				
IKK 15	Penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional	Laporan	1	0	0				
IKK 16	Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Laporan	1	0	0			15.650.530.000	90,35%

IKK 17	Penyusunan bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1	0	0				
IKK 18	Penyusunan bahan pengawasan angkutan jalan	Laporan	1	0	0				
IKK 19	Penyusunan bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1	0	0			94.115.800	78,42%
IKK 20	Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan	Laporan	1	0	0				
IKK 21	Penyusunan bahan pengawasan tarif angkutan jalan	Laporan	1	0	0				
IKK 22	Penyusunan bahan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Angkutan jalan terutama pada angkutan umum massal	Laporan	1	0	0				
IKK 23	Penyusunan bahan evaluasi penumpang Angkutan umum massal	Laporan	1	0	0				
IKK 24	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan Penyeberangan Merak	0	0				
SK3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat					100%			
IKK 25	Persentase pelaksanaan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Laporan	2	1	1			100.933.896	40,37%
IKK 26	Rata – rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan Keterangan : • Port Time : Waktu Kapal di Dermaga	Laporan	12	3	3				
IKK 27	Sailing Time : Waktu kapal Berlayar	Laporan	12	3	3				
SK4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%			
IKK 28	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Adapun untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat, antara lain : • Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan SDP Komersil dan Perintis; • Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Jalan, Sungai dan Danau dan Penyeberangan (RAMPCHECK); • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kapal dan Pelabuhan; • Biaya Pengoperasian Tugboat 1 Unit; • Operasional Satpel Pelabuhan Penyeberangan.	Laporan	12	3	3			93.494.000 38.760.000 - 869.325.377 806.654.567	61,09% 38,76% - 53.84 42,68
SK5	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					100%			

IKK 29	Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan	Lokasi	Pelabuhan	0	0		-	-	
IKK 30	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	Pelabuhan	0	0			-	

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kinerja Kegiatan						100%			
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						100%			
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$)						0			
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$)						0			

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan triwulan I Tahun 2021, berdasarkan revisi perjanjian kinerja dari 9 IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat 4 (empat) IKP berstatus hijau dan 5 (lima) IKP berstatus merah.

Penjelasan capaian IKP untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Program 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 2 (dua) IKP, yaitu:

1. IKP 1 : Rasio Konektivitas Transportasi Darat, dan
2. IKP 5 : Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM				SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional					90,49%		
IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,710	0,710	0,839	118,13%		
IKP 5	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	0,455	0,455	0,455	0,286	62,86%		

Tabel II. 2 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada kawasan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Darat} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang terlayani Angkutan Umum di Jalan dan Angkutan Penyeberangan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan}}$$

Layanan Transportasi Darat berupa: Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN), Angkutan jalan perintis, Angkutan penyeberangan komersil, Angkutan penyeberangan perintis, Subsidi Angkutan Antarmoda Pada 10 KSPN.

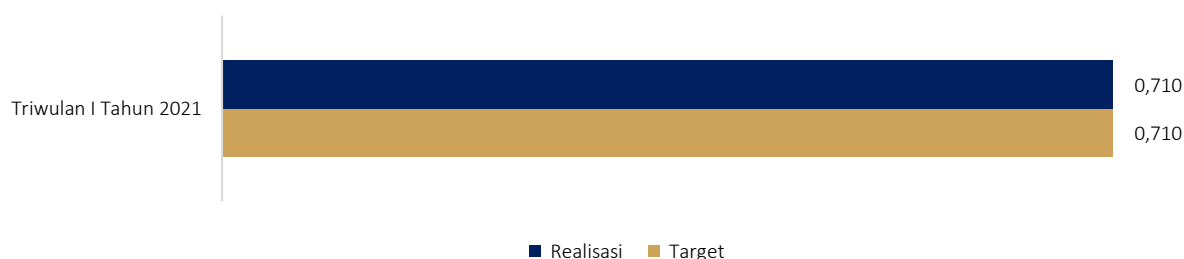
Sedangkan, fasilitas transportasi darat merupakan simpul dan sarana transportasi darat yang sudah selesai dibangun serta eksisting berupa: Terminal Tipe-A, Terminal Angkutan Barang, Pelabuhan Penyeberangan, Kapal Penyeberangan Perintis.

Angkutan Umum berupa: AKAP, Keperintisan Jalan, Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis). Kawasan Strategis Nasional terdiri dari: 10 (Sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 13 (tiga belas) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan 32 (tiga puluh dua) Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK). Rincian 10 (Sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) adalah KSPN Danau Toba, KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Borobudur, KSPN Bromo Tengger Semeru, KSPN Mandalika, KSPN Labuan Bajo, KSPN Likupang, KSPN

Wakatobi, KSPN Morotai, dan KSPN Raja Ampat. Daftar rincian Kawasan Prioritas Nasional Tahun 2021 sebagaimana **Lampiran 5**.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi darat triwulan I tahun 2021 sebesar 0,71 jika dibandingkan dengan target PK triwulan I tahun 2021 sebesar 0,71 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat.



Grafik II. 1 Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak **93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional** yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 6**. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Angkutan dan Fasilitas Prasarana Jalan

Kawasan Strategis Nasional yang telah **dilayani Angkutan Jalan** melalui ¹AKAP, ²ALBN, ³Angkutan Jalan Perintis, ⁴Angkutan Antarmoda dan **Fasilitas Prasarana Jalan** melalui ¹Pembangunan Terminal Tipe A dan ²Terminal Angkutan Barang adalah sebanyak **54 (lima puluh empat) Kawasan (Lampiran 6)**. Layanan Angkutan dan Fasilitas Prasarana Jalan tersebut dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a) Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP)

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia, target trayek pelayanan AKAP adalah sebesar 2.473 trayek dan yang terealisasi sampai dengan triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 2.237 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) trayek pada **41 (empat puluh satu) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

- b) Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)
 Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia dalam **Lampiran 7**, target trayek pelayanan ALBN adalah sebesar 4 trayek dan yang terealisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 4 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 4 trayek pada **2 (dua) Kawasan** Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 6**.
- c) Angkutan Jalan Perintis
 Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5647/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 8**, target trayek pelayanan Angkutan Jalan Perintis adalah sebesar 325 trayek dan yang terealisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 325 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) trayek pada **28 (duapuluh delapan) Kawasan** Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 6**.
- d) Angkutan Antarmoda
 Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.186/AJ.501/DRJD/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 9**, sebanyak 15 (lima belas) KSPN ditetapkan untuk dilayani subsidi Angkutan Antarmoda. Sampai dengan Triwulan 1 (satu), 15 (lima belas) KSPN tersebut sudah dilayani subsidi angkutan antarmoda tahun 2021, terdapat **9 (sembilan) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.
- e) Terminal Tipe-A
 Berdasarkan data aset Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat, Terminal Tipe-A yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Tahun 2020 adalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) terminal dengan rincian 110 (seratus sepuluh) terminal sudah serah terima operasional, dari jumlah terminal tersebut terdapat 52 (lima puluh dua) terminal yang telah melayani 41 (empat puluh satu) Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.
- f) Terminal Angkutan Barang
 Berdasarkan data aset Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat, terdapat 1 (satu) Terminal Angkutan Barang yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Tahun 2020, terminal tersebut adalah Terminal Barang Internasional Entikong yang terdapat pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.
2. Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan
 Kawasan Strategis Nasional yang telah **dilayani Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan** melalui ¹Angkutan Penyeberangan Komersil dan ²Angkutan Penyeberangan Perintis dan **Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan** melalui ¹pembangunan Pelabuhan Penyeberangan dan ²Kapal Penyeberangan Perintis adalah sebanyak **69 (enam puluh sembilan) Kawasan (Lampiran 6)**. Layanan Angkutan dan Fasilitas

Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan tersebut dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a) Angkutan Penyeberangan Komersil

Jumlah lintas penyeberangan komersil yang melayani Kawasan Prioritas Nasional sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 adalah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lintas penyeberangan pada **42 (empat puluh dua) kawasan** prioritas dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

b) Angkutan Penyeberangan Perintis

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 12**, sebanyak 276 lintas ditetapkan untuk dilayani Angkutan Penyeberangan Perintis. Dari jumlah lintas tersebut terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) lintas penyeberangan yang melayani **42 (empat puluh dua) Kawasan** Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

c) Pelabuhan Penyeberangan

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Triwulan I Tahun 2021 adalah sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) Pelabuhan. Dari jumlah pelabuhan tersebut terdapat 74 (tujuh puluh empat) Pelabuhan yang melayani **40 (empat puluh) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

d) Kapal Penyeberangan Perintis

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, jumlah Kapal Penyeberangan Perintis yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Triwulan I Tahun 2021 adalah sebanyak 118 (seratus delapan belas) kapal. Dari jumlah kapal tersebut terdapat 59 (lima puluh sembilan) Kapal yang melayani **53 (lima puluh tiga) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

Dari layanan dan fasilitas transportasi angkutan jalan dan angkutan penyeberangan tersebut di atas, terdapat **45 (empat puluh lima) Kawasan Strategis Nasional yang beririsan** sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

Sehingga:

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{(54+69) - 45 \text{ wilayah}}{93 \text{ wilayah}} = 0,839$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Rasio konektivitas Transportasi Darat Triwulan I Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,839}{0,710} \times 100\% = 118,13\%$$

Adapun anggaran terkait Rasio Konektivitas Transportasi Darat Triwulan I Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Angkutan Jalan memiliki target keuangan triwulan I senilai Rp. 0 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2021 Rp. 0 atau mencapai 100%.
2. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan memiliki target keuangan triwulan I senilai Rp 2,367,454,000,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2021 senilai Rp 2,367,454,000,- atau mencapai 100%.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan pembukaan lintas LDF Patimban- Panjang, Patimban – Pontianak di Kawasan PKN Cirebon dalam rangka mendukung angkutan logistic dari pulau Jawa ke Sumatera dan Kalimantan;
2. Memberikan subsidi untuk pelayanan lintas penyeberangan perintis Onanrungu – Muara, Onanbakkara – Nainggolan, Nainggolan - Ajibata di Kawasan KSPN Danau Toba pada Tahun mendatang;
3. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;
4. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan yang telah disusun;
5. Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya.

IKP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi perkotaan pada kawasan perkotaan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan perkotaan prioritas nasional RPJMN 2021-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah dilayani subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan skema Buy The Service}}{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas Nasional}}$$

Keterangan:

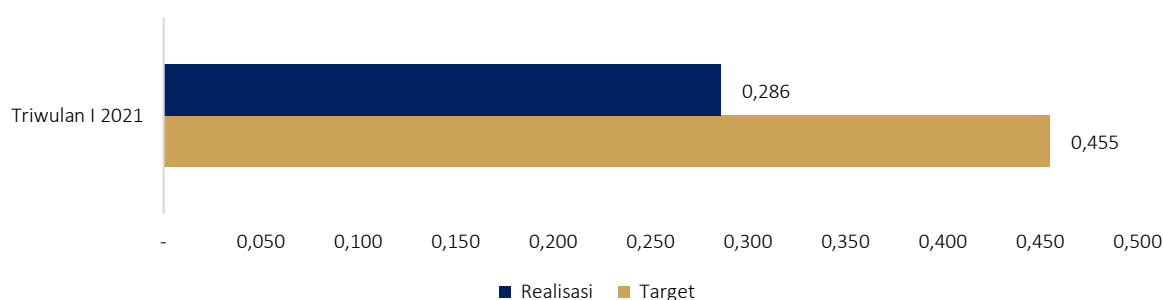
Kawasan perkotaan prioritas nasional terdiri 14 kawasan perkotaan, diantaranya:

1. Jabodetabek;
2. Mebidangro (Metropolitan Medan);
3. Bandung Raya (Metropolitan Bandung);
4. Kedungsepur (Metropolitan Semarang);
5. Gerbangkertasusila (Metropolitan Surabaya);
6. Maminassata (Metropolitan Makassar);
7. Metropolitan Palembang;
8. Metropolitan Denpasar;

9. Metropolitan Banjarmasin;
10. Kota Manado;
11. Kota Baru Maja;
12. Kota Baru Tanjung Selor;
13. Kota Baru Sofifi; dan
14. Kota Baru Sorong.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi perkotaan triwulan I tahun 2021 sebesar 0,286 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,455 maka capaian kinerja mencapai 0.63%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan.



Grafik II. 2 Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pelayanan dan fasilitas transportasi perkotaan pada kawasan prioritas nasional Tahun 2021 dilaksanakan selain di 5 (lima) kota percontohan Tahun 2020 dan 5 (lima) kota tambahan yaitu Bandung, Banyumas, Surabaya, Makassar dan Banjarmasin. Pada triwulan I Tahun 2021, Program *Buy The Service (BTS)* untuk kota-kota baru belum dilaksanakan sehingga realisasi rasio konektivitas adalah kota-kota Tahun 2020 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Medan, Palembang dan Denpasar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jakarta
Pelaksanaan kegiatan ini di Provinsi DKI Jakarta menjadi wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Medan
Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pemberian Subsidi Pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2021, di Kota Medan terdapat 5 trayek yang dilayani, yaitu :
 1. Terminal Pinang Baris – Lapangan Merdeka (PP)
 2. Terminal Amplas – Lapangan Merdeka (PP)
 3. Pelabuhan Belawan – Lapangan Merdeka (PP)
 4. Medan Tuntungan – Lapangan Merdeka (PP)
 5. Tembung – Lapangan Merdeka (PP)
 dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2021 total penumpang pelayanan BTS di Kota Medan sebesar 513.600 penumpang dengan rata-rata faktor muat sebesar 25,87%.

3. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Palembang

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pemberian Subsidi Pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2021, di Kota Palembang terdapat 4 Trayek yang dilayani, yaitu :

- 1) Terminal Alang Alang Lebar – Dempo (PP)
- 2) Stasiun LRT Asrama Haji – Terminal Sako (PP)
- 3) Terminal Plaju – Pasar Induk Jakabaring (PP)
- 4) Terminal Alang Alang Lebar – Talang Jambe

dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2021 total penumpang pelayanan BTS di Kota Palembang sebesar 252.850 penumpang dengan rata-rata faktor muat sebesar 14,64%.

4. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Denpasar

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pemberian Subsidi Pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2021, di Kota Denpasar terdapat 4 trayek yang dilayani, yaitu :

1. Terminal Pesiapan – Sentral Parkir Kuta (PP)
2. Bandara Ngurah Rai – GOR Ngurah Rai/Denpasar (PP)
3. Pantai Matahari Terbit – Terminal Ubung (PP)
4. Sentral Parkir Monkey Forest – Terminal Ubung (PP)

dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2021 total penumpang pelayanan BTS di Kota Denpasar sebesar 423.664 penumpang dengan rata-rata faktor muat sebesar 23,75%.

Sehingga capaian rasio konektivitas transportasi perkotaan triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{4}{14} = 0,286$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Rasio konektivitas Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,286}{0,455} \times 100\% = 62.86\%$$

Adapun anggaran terkait Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan Tahun 2021 dengan kegiatan Subsidi Perkotaan Buy The Service senilai Rp 373.000.000.000,- dengan target keuangan triwulan I senilai Rp. 47.865.908.260 dan realisasi hingga akhir triwulan I senilai Rp 45.865.908.260,- atau mencapai 95.82%;

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan kota-kota yang akan dipilih dalam program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra;
2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan.

3. Sosialisasi Program Buy The Service kepada Pemerintah Daerah;

2. Sasaran Program 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 3 (tiga) IKP, yaitu:

1. IKP 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat,
2. IKP 6 : OTP Angkutan SDP, dan
3. IKP 7 : OTP Angkutan Perkotaan.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM				TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan						89,61%
IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83	0	0	
IKP 6	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1	83,1	82,6	99,40%
IKP 7	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55	55	43,9	79,82%

Tabel II. 3 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat dihitung berdasarkan Penilaian publik atas penyelenggaraan layanan angkutan pada masa angkutan lebaran dan angkutan natal dan tahun baru.

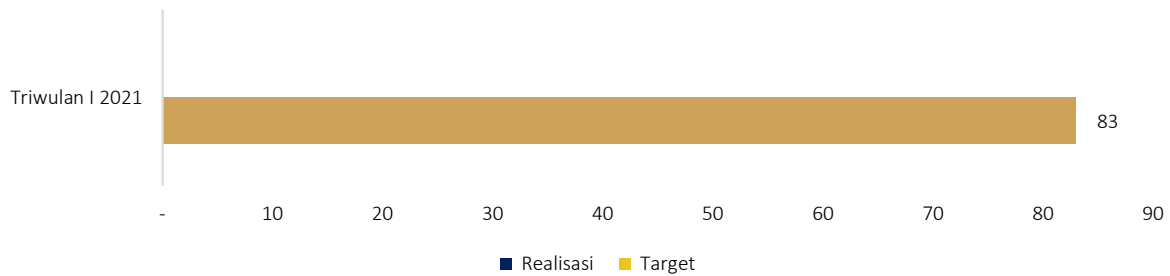
Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Proses perumusan meliputi:

1. Aspek Penilaian;
2. Pembobotan Nilai;
3. Parameter;
4. Jumlah responden (*sampling metode*).

d. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat triwulan I tahun 2021 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 83 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat.



Grafik II. 3 Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat

e. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Transportasi Darat belum dapat terealisasi di Triwulan I tahun 2021, hal ini disebabkan belum dilaksanakannya survei dikarenakan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa Angkutan Lebaran dan masa Angkutan Natal dan Tahun Baru:

Sehingga capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKM} = 0$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{83} \times 100\% = 0\%$$

Adapun target keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat triwulan I Tahun 2021 senilai Rp. 0,- dan realisasi hingga akhir triwulan I senilai Rp 0,- atau mencapai 100 %;

f. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan.
2. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik.

IKP 6 OTP Angkutan SDP

Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP merupakan persentase jumlah jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan yang tepat waktu pada lintas penyeberangan utama dibandingkan seluruh jadwal keberangkatan angkutan

penyeberangan pada lintas penyeberangan utama dalam 1 (satu) tahun. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian } On \text{ Time Performance (OTP) Angkutan SDP} = \frac{\text{Jumlah pelayaran tepat waktu dalam 1 tahun pada 7 Lintas Utama}}{\text{Jumlah pelayaran 1 tahun pada 7 lintas Utama}} \times 100\%$$

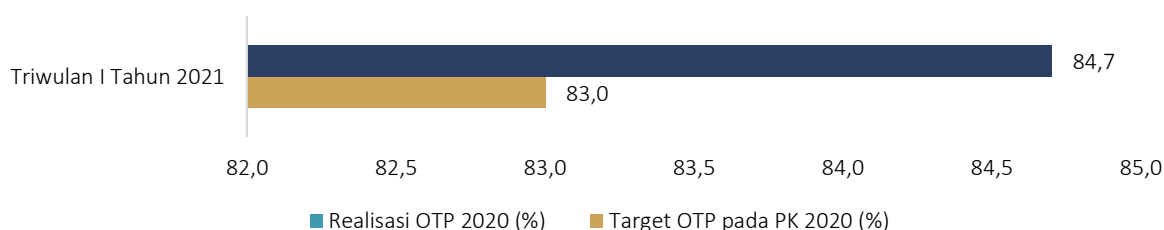
Keterangan:

7 (tujuh) lintas utama dimaksud adalah:

1. Merak-Bakauheni;
2. Ketapang-Gilimanuk;
3. Padangbai-Lembar;
4. Tanjung Api-Api-Tanjung Kelian;
5. Kayangan-Pototano;
6. Bajoe-Kolaka;
7. Kariangau-Penajam.

g. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021 sebesar 82.6% jika dibandingkan dengan target Triwulan I PK 2021 sebesar 83,1% maka capaian kinerja mencapai 99.40%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021



Grafik II. 4 Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021

h. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021 pada angkutan penyeberangan pada 7 (tujuh) lintas utama adalah sebagai berikut:

Tabel Pencapaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021 (dalam persentase OTP terhadap jumlah keberangkatan).

No.	Lintas	Jumlah Keberangkatan	Keberangkatan <i>On Time</i>	OTP (%)
1.	Merak – Bakauheni	15.414	12.019	77.97
2.	Padangbai – Lembar	3.100	2.587	83.45

No.	Lintas	Jumlah Keberangkatan	Keberangkatan On Time	OTP (%)
3.	Bajoe – Kolaka	477	401	84.07
4.	Ketapang – Gilimanuk	24.861	20.420	82.14
5.	Kariangau – Penajam	8.075	6.346	78.59
6.	Tanjung Api-api – Tanjung Kelian	1.295	1.160	89.58
7.	Kayangan Pototano	3.044	2.518	82.72
Total		56.266	45.451	82.64

Sumber data : Data olahan Direktorat TSDP

Sehingga capaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian OTP Transportasi SDP} = \frac{45.451}{56.266} \times 100\% = 82.64\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{82.64\%}{83.1\%} \times 100\% = 99.6\%$$

Capaian kegiatan *On Time Performance* Transportasi Darat di Sektor Perhubungan Darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan pada triwulan I Tahun 2021 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh:

1. Pada beberapa lintas sering terjadi kendala teknis saat bongkar / muat kendaraan (Mobil mogok dlm kapal), satu kapal terlambat akan menyebabkan kapal lain jg jd terlambat semua, sampai kondisi normal lagi;
2. Faktor cuaca buruk yang kerap terjadi, sehingga menyebabkan pelayaran ditutup untuk sementara waktu;
3. Pola dan jumlah kapal operasi per dermaga yang berbeda sehingga headway kapal tidak teratur.

Adapun anggaran terkait *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP tahun 2021 yaitu senilai Rp 1.600.000.000,- dengan target triwulan I senilai Rp 313,516,800,- dan realisasi hingga triwulan I senilai Rp 310.516.800,- atau mencapai 99.04%. Melalui Kegiatan :

1. Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
2. Pemeriksaan Kapal Angkutan Penyeberangan Setelah Docking Termasuk Kapal Perintis.

i. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;

4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKP 7 OTP Angkutan Perkotaan

Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Angkutan Jalan merupakan kinerja ketepatan waktu yang diukur pada layanan subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema *buy the service*. Data ketepatan waktu diperoleh berdasarkan pencatatan yang dilaksanakan melalui *Fleet Management System* proyek subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema *Buy The Service*. Sistem ini mensinergikan antara perangkat telematika berbasis satelit yang dipasang di setiap bus dengan platform yang dikembangkan oleh Direktorat Angkutan Jalan. Perangkat telematika akan mencatat waktu tiba setiap bus pada masing-masing halte yang dilewati dan kemudian sistem akan melakukan kalkulasi berdasarkan waktu headway antar bus yang telah ditentukan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian } On Time Performance (OTP) \text{ Angkutan Jalan} = \frac{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) tepat waktu dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) dalam 1 tahun}}$$

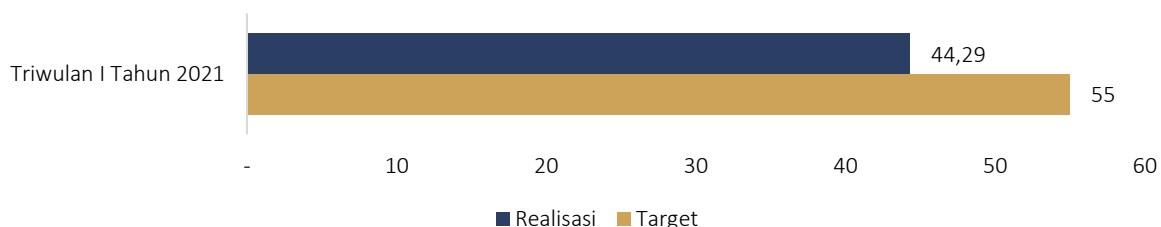
Keterangan:

Tahun 2021 Terdapat 10 (sepuluh) layanan BTS yang akan dioperasikan, yaitu :

1. BTS Kota Medan;
2. BTS Kota Denpasar;
3. BTS Kota Palembang;
4. BTS Kota Jogjakarta;
5. BTS Kota Surakarta;
6. BTS Kota Bandung;
7. BTS Kota Banyumas;
8. BTS Kota Surabaya;
9. BTS Kota Makassar;
10. BTS Kota Banjarmasin.

j. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021 sebesar 43,90% jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 55% maka capaian kinerja mencapai 79.82%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKP Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021



Grafik II. 5 Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021

k. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dari hasil output sistem *fleet management* diperoleh hasil capaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021 pada angkutan perkotaan di 10 (Sepuluh) kota adalah sebagai berikut:

Tabel Pencapaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021

No.	Lintas	Realisasi
1.	BTS Kota Medan	46,64
2.	BTS Kota Palembang	38,10
3.	BTS Kota Denpasar	34,21
4.	BTS Kota Jogjakarta	53,57
5.	BTS Kota Surakarta	37,19
	BTS Kota Surakarta (Feeder)	53,67
6.	BTS Kota Bandung	-
7.	BTS Kota Banyumas	-
8.	BTS Kota Surabaya	-
9.	BTS Kota Makassar	-
10.	BTS Kota Banjarmasin	-
OTP Nasional		43,90

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian OTP Angkutan Jalan} = \frac{263.38}{6} \times 100\% = 43.90\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{43,90}{55} \times 100\% = 79.82\%$$

Pada Triwulan I Tahun 2021, BTS di 5 (lima) kota tambahan belum dioperasikan, sehingga perhitungan OTP hanya diperoleh dari 5 (lima) kota eksisting.

Adapun anggaran terkait *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan tahun 2021 yaitu senilai Rp 37.549.000.000,- dengan target keuangan triwulan I senilai Rp 0,- dan realisasi keuangan pada Triwulan I senilai Rp 0,- atau capaian 100%;

I. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP dan SPM khususnya terkait pencapaian OTP ;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan BTS dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan "*pull dan push strategy*" dalam mendukung suksesnya program BTS.

3. Sasaran Program 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 2 (dua) IKP, yaitu:

1. IKP 1 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan,
2. IKP 2 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi					200,00%
IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0,019	0,019	0	200,00%
IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,086	0,086	0	200,00%

Tabel II. 4 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Keselamatan Transportasi

IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan

Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antar kota Antar provinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis di Jalan yang disubsidi APBN. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan}$$

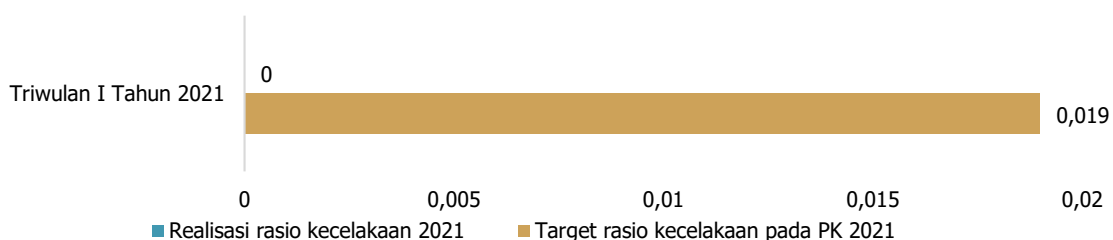
Keterangan:

1. Data keberangkatan (ritase) angkutan umum di jalan didapatkan melalui data realisasi keberangkatan di terminal dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan jalan pada tahun (n). Sedangkan, data kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di jalan didapatkan melalui pencatatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan;

2. Data kecelakaan yang melibatkan AKAP adalah data kecelakaan yang menonjol.

m. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 TW I sebesar 0. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,019 maka capaian kinerja mencapai 200%, karena menggunakan rumus minimize, yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP.



Grafik II. 6 Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021 TW I

n. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada periode Januari samapai dengan Maret 2021 belum ada laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus AKAP dan bus Perintis. Sedangkan Jumlah keberangkatan bus di terminal tipe A dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan pada periode Januari sampai dengan Maret (TWI) Tahun 2021 sebesar 1.007.963 keberangkatan.

Sehingga, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{0}{1.007.963} \times 10.000 \text{ keberangkatan} = 0$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 TW I terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,019 - (0 - 0,019))}{0,019} \times 100\% = 200\%$$

Keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator Persentase Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan antara lain dengan dilaksanakannya rampchek angkutan umum (AKAP), serta pelaksanaan monitoring dan pembinaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum, serta didukung oleh peningkatan mutu dengan tetap menerapkan

standar pelayanan minimal sesuai ketentuan sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada AKAP, Pariwisata, dan Perintis.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas adalah dengan melakukan kegiatan Monitoring Keselamatan Transportasi Jalan.

Adapun anggaran terkait Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 yaitu senilai Rp 650.000.000,-, dan sampai dengan akhir Maret 2021, target keuangan triwulan I senilai Rp. 69.127.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.127.000 atau 100 %.

o. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum baik Angkutan Orang maupun Barang Berbahaya Beracun (B3) dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP, antara lain:

1. Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus (B3);
3. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum Akap/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3)
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan
5. Melaksanakan Program Aksi Penigkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan Pariwisata dan AKAP, dalam rangka menurunkan angka kecelakaan pada AKAP dan pariwisata;
6. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU;

IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran

Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 pelayaran angkutan penyeberangan, baik komersil maupun perintis. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran digunakan rumus sebagai berikut:

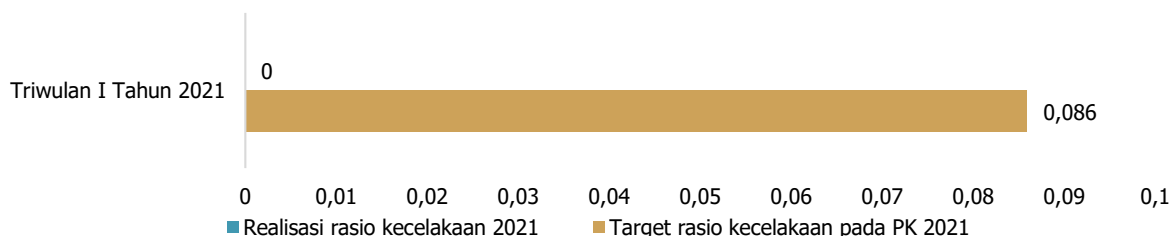
$$\text{Rasio kecelakaan transportasi penyeberangan per 10.000 pelayaran} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah pelayaran Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ pelayaran}$$

Keterangan:

Data jumlah pelayaran per tahun didapatkan melalui data realisasi pelayaran angkutan komersil dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan penyeberangan. Sedangkan, data kecelakaan angkutan penyeberangan terdiri dari, kecelakaan yang menyebabkan kapal karam, kapal terbakar, dan korban meninggal dunia (MD).

p. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Penyeberangan Transportasi Darat Triwulan 1 tahun 2021 sebesar 0. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,086 maka capaian kinerja pada triwulan 1 mencapai 200%, karena menggunakan rumus minimize, yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran.



Grafik II. 7 Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Triwulan I Tahun 2021

q. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Hingga triwulan 1 tahun 2021, belum ada kejadian Kecelakaan yang tercatat oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap kejadian kecelakaan yang menyebabkan kapal karam, kapal terbakar dan korban meninggal dunia (MD). Sedangkan Jumlah pelayaran angkutan penyeberangan baik perintis maupun komersil pada triwulan 1 Tahun 2021 sebesar 122.443 pelayaran.

No.	Periode	Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil
1.	Triwulan I	122.443

Tabel II. 5 Data Realisasi Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil Tahun 2021

Sumber data : Data olahan dari Subdit Angkutan Direktorat TSDP, terhitung tanggal 1 januari s.d 31 maret 2021

Sehingga, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan TW I} = \frac{0}{122.443} \times 10.000 \text{ pelayaran} = 0$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran pada triwulan 1 tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,086 - (0 - 0,086))}{0,086} \times 100\% = 200 \%$$

Pada tahun 2021 tetap dilakukan pemantauan dampak Covid-19 terhadap pelayaran, yang sebelumnya diberlakukan pembatasan jumlah pelayaran di wilayah timur seperti Lintas Biak dan Merauke pada tahun 2020. Pemberlakuan pembatasan pelayaran untuk kendaraan pribadi dan penumpang yang terjadi pada masa mudik lebaran tahun 2021 terhitung tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 yang merupakan program dari kementerian perhubungan untuk memutus rantai covid-19 yang tertuang pada PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Idul Fitri 1442 Hijriah.

Adapun anggaran terkait Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2021 yaitu senilai Rp. 700.000.000,- target keuangan triwulan I senilai Rp. 35.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.170.000 atau 94.77 %.

r. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan angkutan penyeberangan, antara lain:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;
2. Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai berikut:
 - a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 2021 di Hotel Novotel Tangerang yang dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta yang terdiri dari Syahbandar SDP, Marine Inspector SDP, Kepala Seksi Bidang Transportasi SDP, Pembantu Syahbandar, Auditor Manajemen Keselamatan dari seluruh BPTD Wilayah Indonesia;
 - b. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Penyeberangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 April 2021 di Hotel Santika BSD City yang dihadiri ± 100 peserta yang dariseluruh BPTD Wilayah Indonesia;
 - c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau;
 - d. Bimbingan Teknis Auditor ISPS Code;
 - e. Bimbingan Teknis Auditor ISM Code;
 - f. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLASDP;
 - g. Bimbingan Teknis Patroli Keamanan dan Penanggulangan Musibah di Bidang SDP.

3. Melakukan pengadaan kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan kordinasi pantauan terhadap cuaca ekstrim;
4. Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
5. Pemberian Bantuan Teknis Perlengkapan keselamatan angkutan penyeberangan di 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan.

4. Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan IKP, yaitu Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat *class action* oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan. Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

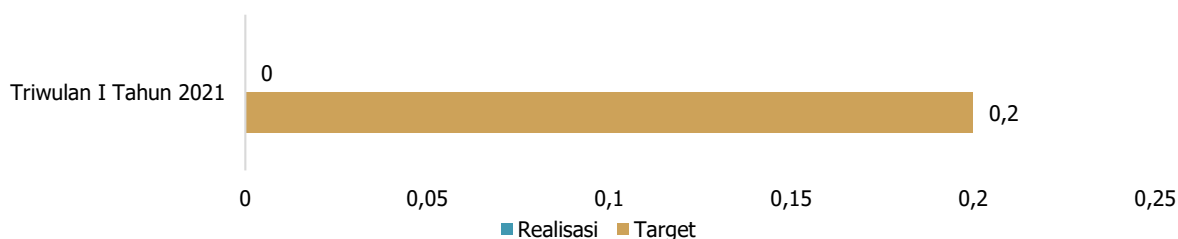
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum				200,00%	
IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,2	0,2	0	200,00%

Tabel II. 6 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

s. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan Triwulan 1 tahun 2021 sebesar 0. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,2 maka capaian kinerja pada triwulan 1 mencapai 200 % karena menggunakan rumus minimize, yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan.



Grafik II. 8 Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

t. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada triwulan I tahun 2021 Peraturan Menteri yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) peraturan dari penetapan tersebut tidak terdapat peraturan yang mendapat *class action* dari masyarakat sehingga perhitungan Rasio Permenhub yang mendapat *Class Action* pada triwulan I tahun 2021 menjadi $0/5 = 0$

Hal ini disebabkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan yang ditargetkan sudah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2021 masih dalam proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga belum mendapat *Class Action* dari masyarakat. Peraturan Menteri Perhubungan yang disusun merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun Proses Harmonisasi ini baru dilaksanakan pada bulan April sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (Harmonisasi tanggal 19 April 2021);
2. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Harmonisasi tanggal 20 April 2021);
3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Harmonisasi tanggal 29 April 2021);
4. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Harmonisasi tanggal 29 April 2021); dan
5. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Harmonisasi tanggal 30 April 2021).

Adapun 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehingga, Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan TW I} = \frac{0}{5} = 0$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,2-(0-0,2))}{0,2} \times 100\% = 200 \%$$

Adapun anggaran terkait Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan Tahun 2021 yaitu senilai Rp. 6.356.128.000,- target keuangan triwulan I senilai Rp. 1.061.626.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.040.146.000 atau 97,98 %.

u. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan, antara lain:

- 1) Membuat timeline target penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan berjalan sesuai waktu yang ditentukan.
- 2) Memantau proses pengharmonisasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait sehingga peraturan yang diajukan dapat segera ditetapkan dan diundangkan.
- 3) Apabila peraturan sudah diundangkan maka diharapkan segera mendapatkan tanggapan/*class action* dari masyarakat.

5. Sasaran Program 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan IKP, yaitu Indeks RB Kementerian Perhubungan. Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM				TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SP5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						98,35%
IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79	79	77,7	98,35%

Tabel II. 7 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dihitung berdasarkan penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan di lakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi

Perencanaan (40%), Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran K?L (40%) dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%). Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi digunakan rumus sebagai berikut:

Proses perumusan meliputi:

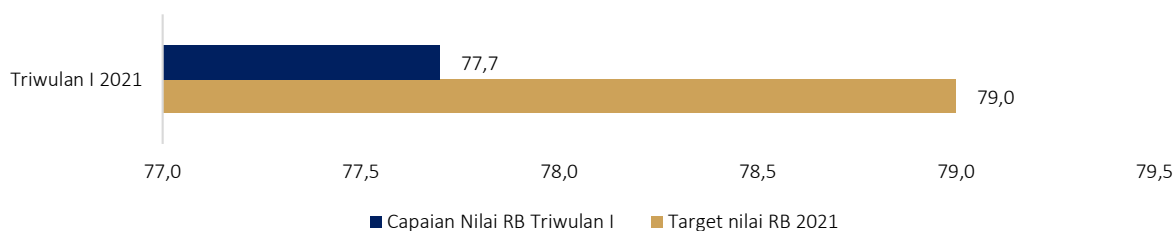
1. Aspek Penilaian;
2. Pembobotan Nilai;
3. Parameter;
4. Jumlah responden (*sampling metode*).

Keterangan:

1. Aspek Penilaian:
 - a. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan Darat
 - b. Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat
 - c. Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat
 - d. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Darat
 - e. Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Darat
 - f. Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Darat
 - g. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Darat
 - h. Indeks Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat
 - i. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Perhubungan Darat
 - j. Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat
 - k. Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat
 - l. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
 - m. Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat
 - n. Reputasi Positif Ditjen Perhubungan Darat
 - o. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Transportasi Darat

v. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2021 (Januari – Mei) sebesar 77,7 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 79,0 maka capaian kinerja mencapai 98,354%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub.



Grafik II. 9 Grafik Capaian IKP Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub

w. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), di arahkan dalam empat strategi :

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan system merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan nasional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui : penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi system akuntabilitas kinerja, melalui : perluasan implementasi system integrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi system perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan public melalui : pelayanan public berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tri wulan I Tahun 2021 masih menggunakan capaian nilai RB Tahun 2019, karena untuk capaian nilai RB Tahun 2020 belum di tetapkan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN & RB dengan komponen nilai RB Tahun 2019 di peroleh dari total nilai Pengungkit dan Nilai Hasil meliputi : total Nilai Pengungkit 44,62 dan Nilai Hasil 33,08

Sehingga:

$$\text{Capaian Nilai RB Tri wulan I tahun 2021} = 44,62 + 33,08 = 77,7$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub Tahun 2021 (Triwulan I) terhadap target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{77,7}{79,0} \times 100\% = 98,354\%$$

Adapun anggaran terkait Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub Tahun 2021 yaitu sebagai berikut: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat senilai Rp 226.954.000,- dengan realisasi hingga Triwulan I senilai Rp 0,- atau mencapai 0%.

x. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;

3. Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya;
4. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat;
5. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat

C. Realisasi Anggaran

1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2021 sebesar **Rp. 88.405.280.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	83.820.670.000	94,81%
PNBP	Rp.	4.584.610.000	0,51%
SBSN	Rp.	0	0%
Total	Rp.	88.405.280.000	100,00%

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	345.339.287	4,86%
Belanja Barang	Rp.	1.807.295.250	3,34%
Belanja Modal	Rp.	0	0%
Total	Rp.	88.405.280.000	100,00%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2021 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tanggal 19 Februari 2021 dari sebesar **Rp. 88.405.280.000,-** menjadi sebesar **Rp. 65.706.567.000,-** dengan rincian berikut.

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	61.121.957.000	93%
PNBP	Rp.	4.584.610.000	0,69%
SBSN	Rp.	0	0%
Total	Rp.	65.706.567.000	100,00%

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	1.096.345.967	15,44%
Belanja Barang	Rp.	8.104.618.172	19,15%
Belanja Modal	Rp.	2.863.486.800	17,58%
Total	Rp.	65.706.567.000	100,00%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2021 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar **Rp. 65.706.567.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat pada Triwulan II TA. 2021 adalah sebesar **Rp. 64.956.567.000,-** dengan rincian sebagai berikut.

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	60.371.957.000	92,94%
PNBP	Rp.	4.584.610.000	0,70%
SBSN	Rp.	0	0%
Total	Rp.	64.956.567.000	100,00%

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	6.348.656.000	9,77%
Belanja Barang	Rp.	42.317.925.000	65,15%
Belanja Modal	Rp.	16.289.986.000	25,08%
Total	Rp.	64.956.567.000	100,00%

2. Refocussing Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan revisi pada tanggal 19 februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2) sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten sebesar Rp. 88.405.280.000,-. Dari pagu Revisi ke-1 sebesar Rp. 65.706.567.000,- menjadi sebesar Rp. 64.956.567.000,- di Revisi ke-2.

- Rincian Revisi Per Sumber Dana

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	76.722.014.000	4.584.610.000	0	88.405.280.000
REVISI KE-1	61.121.957.000	4.584.610.000	0	65.706.567.000
REVISI KE-2	54.023.301.000	4.584.610.000	0	64.956.567.000

- Rincian Revisi per Jenis Belanja

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	345.339.287	1.807.295.250	0	88.405.713.000
REVISI KE-1	1.096.345.967	8.104.618.172	2.863.486.800	65.706.567.000
REVISI KE-2	6.348.656.000	42.317.925.000	16.289.986.000	64.956.567.000

- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja :

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	7.098.656.000	7.098.656.000	6.348.656.000
Belanja Barang	54.041.983.000	42.317.925.000	42.317.925.000
· RM	49.457.373.000	37.733.315.000	37.733.315.000
· PNBP	4.584.610.000	4.584.610.000	4.584.610.000

Belanja Modal	27.264.641.000	16.289.986.000	16.289.986.000
· RM	27.264.641.000	16.289.986.000	16.289.986.000
· PNPB	0	0	0
· SBSN	0	0	0
TOTAL	Rp88.405.280.000	Rp65.706.567.000	Rp64.956.567.000

3. Realisasi Anggaran

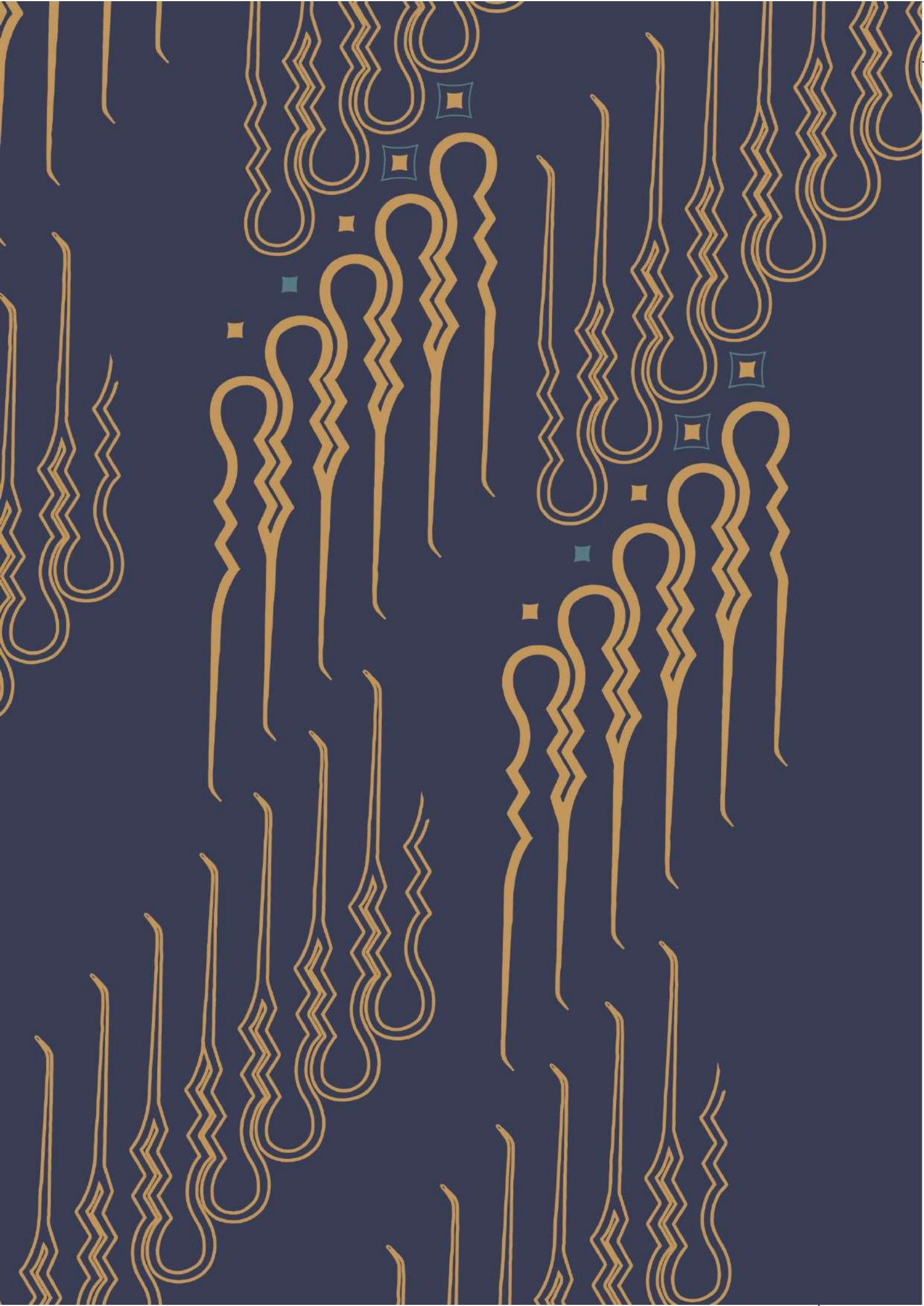
Realisasi penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 38.578.303.209,- atau mencapai 59,39% dari total pagu sebesar Rp. 64.956.567.000

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	6.348.656.000	2.824.265.246	44,49%
2	Belanja Barang	42.317.925.000	21.155.170.963	49,99%
3	Belanja Modal	16.289.986.000	14.598.867.000	89,62%
TOTAL		64.956.567.000	38.578.303.209	59,39%

Tabel II. 8 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2021

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	54.023.301.000	36.217.547.209	67,04%
2	PNBP	4.584.610.000	2.360.756.000	51,49%
3	SBSN	0	0	0%
TOTAL		64.956.567.000	38.578.303.209	59,39%

Tabel II. 9 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2020





Bab III

Penutup





Angkutan Antarmoda
Bandara YIA

Bab III

Penutup

A. Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



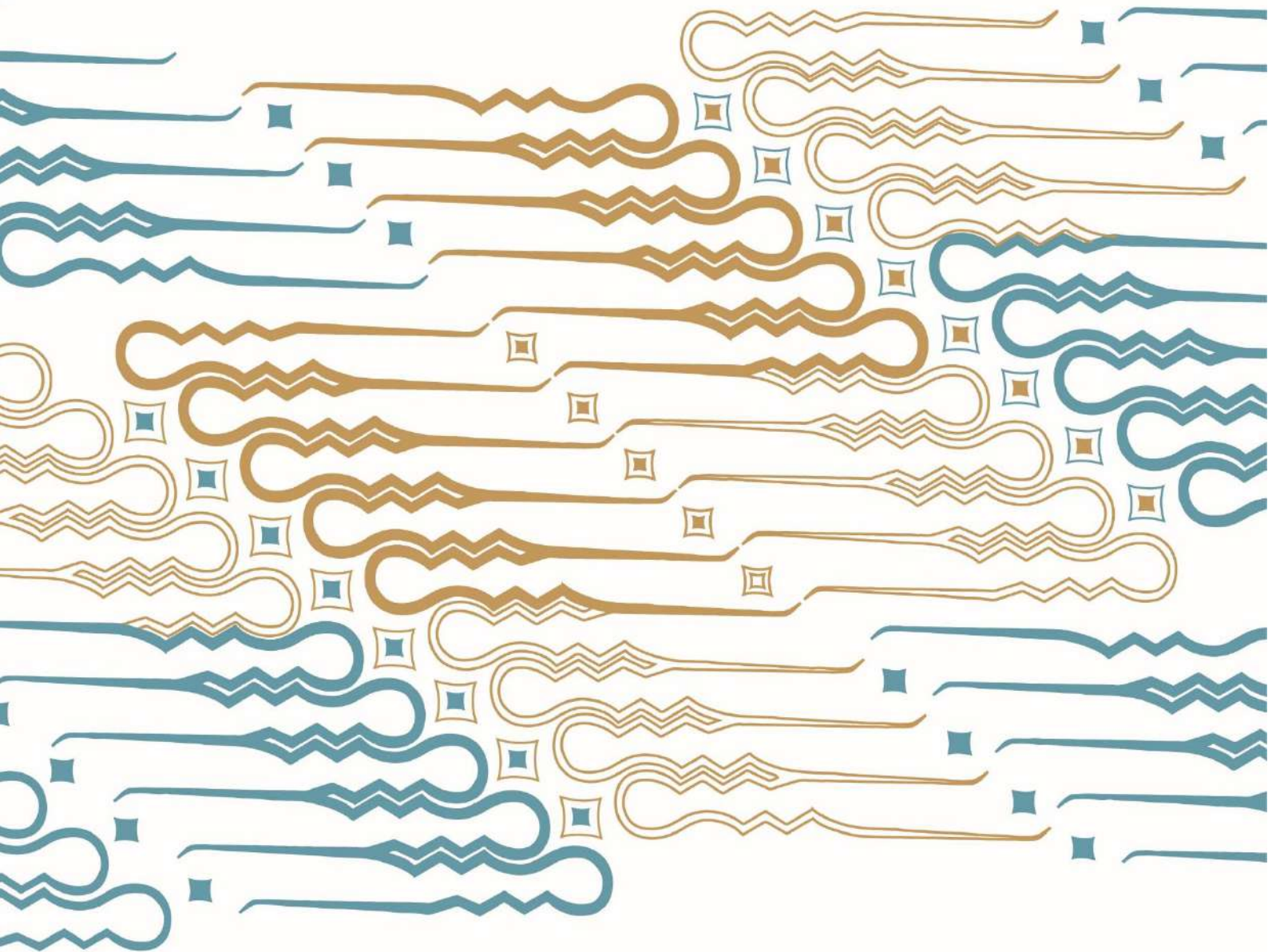
Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2021 BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten



Daftar Isi



Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
Kata Sambutan	viii

Bab I Pendahuluan

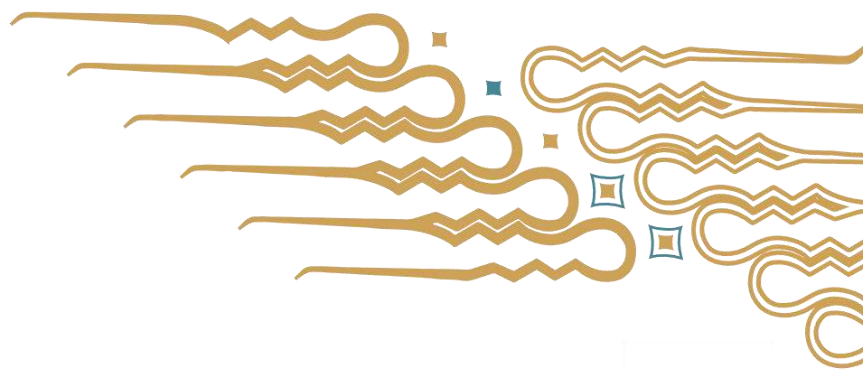
A. Latar Belakang	I-4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	I-6
C. Sumber Daya Manusia	I-11
D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-12
E. Sistematika Laporan	I-14
F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	I-15
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	I-18
H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional	I-20

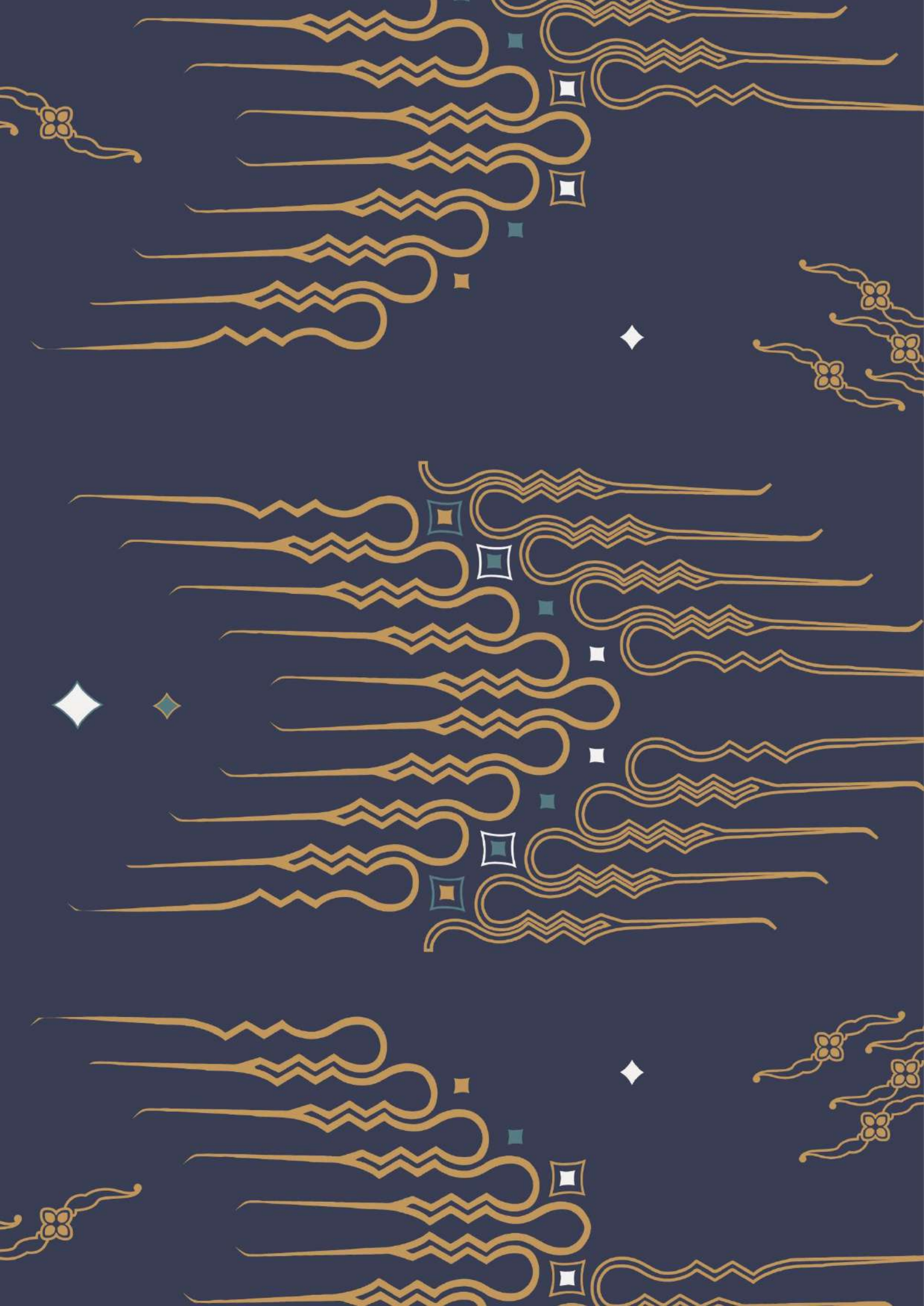
Bab II Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja	II-4
B. Capaian Kinerja Organisasi	II-8
C. Realisasi Anggaran	II-24

Bab III Penutup

A. Penutup	III-4
------------	-------







Kata Sambutan

Kata Sambutan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2021 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2021.

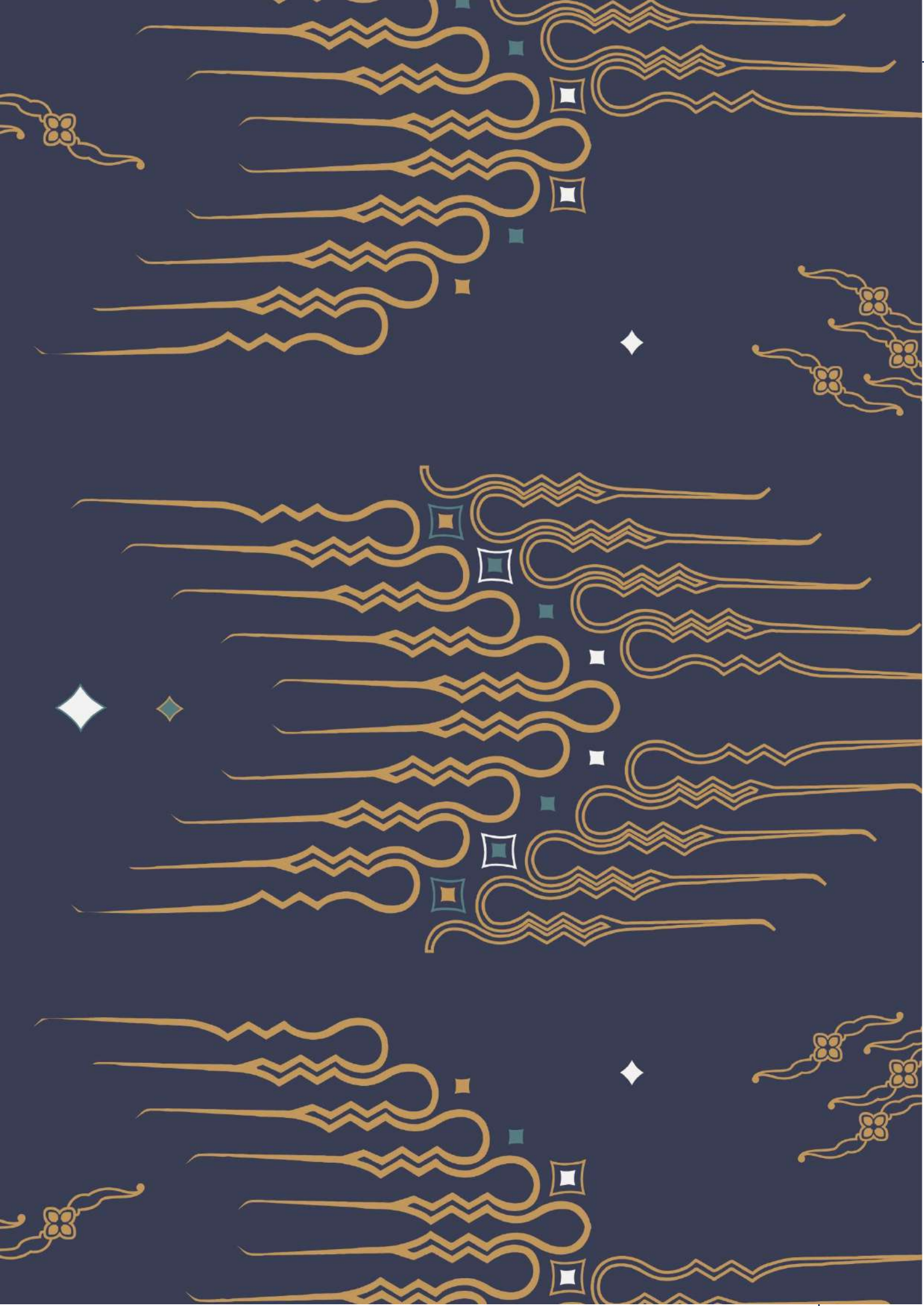


Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Merak, Oktober 2021

**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VIII Provinsi Banten**

Handjar Dwi Antoro, ATD., MT





Bab I

Pendahuluan



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Monitoring Capaian Kinerja.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada khususnya dan Kementerian Perhubungan pada umumnya. Laporan Monitoring Capaian Kinerja dilaporkan setiap Triwulan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Monitoring Capaian Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Peraturan menteri PAN-RB Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Peraturan Menteri PAN-RB Nomer 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
 - 3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
 - 4) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan,

pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, dan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C;

Susunan Organisasi BPTD Tipe A terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Tipe B terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi BPTD Tipe C terdiri atas:

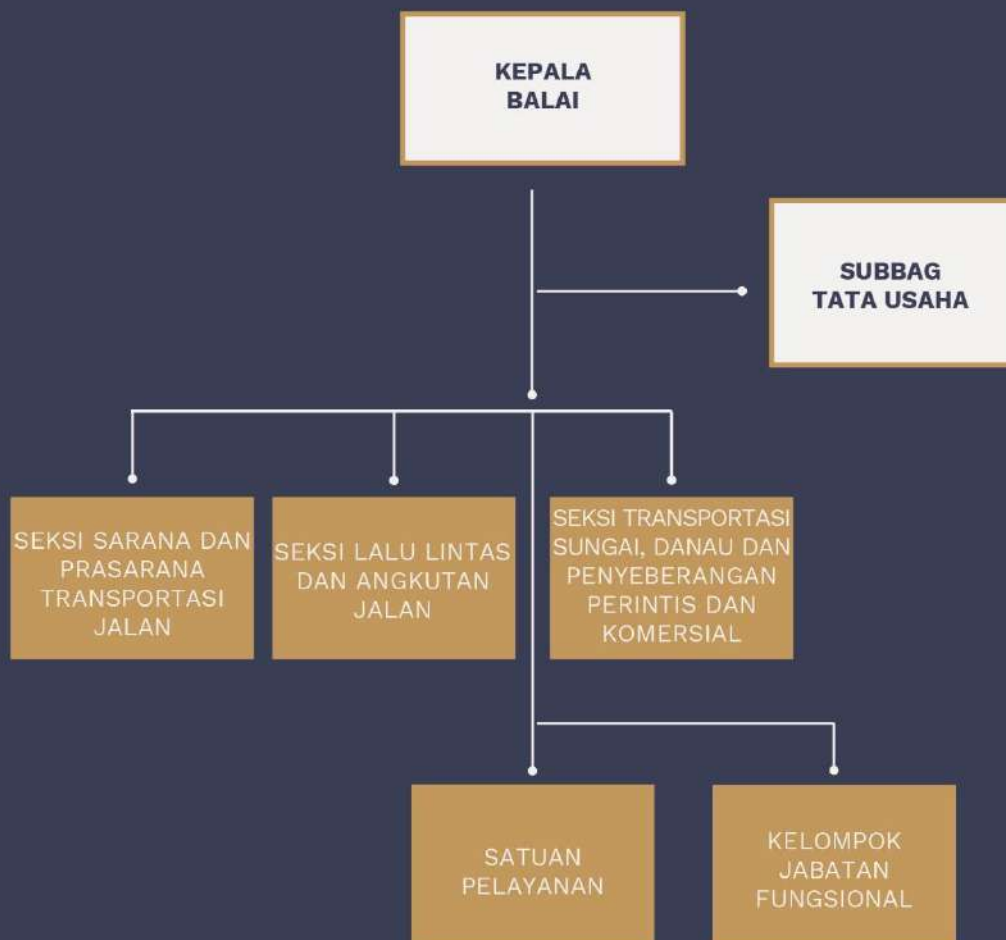
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Transportasi Jalan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

25 Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPTD Wil. I Aceh
2. BPTD Wil. II Sumut
3. BPTD Wil. III Sumbar

4. BPTD Wil. IV Riau dan Kepri
5. BPTD Wil. V Jambi
6. BPTD Wil. VI Bengkulu dan Lampung
7. BPTD Wil. VII Sumsel dan Babel
8. BPTD Wil. VIII Banten
9. BPTD Wil. IX Jabar
10. BPTD Wil. X Jateng dan DIY
11. BPTD Wil. XI Jatim
12. BPTD Wil. XII Bali dan NTB
13. BPTD Wil. XIII NTT
14. BPTD Wil. XIV Kalbar
15. BPTD Wil. XV Kalsel
16. BPTD Wil. XVI Kalteng
17. BPTD Wil. XVII Kaltim dan Kaltara
18. BPTD Wil. XVIII Sultra
19. BPTD Wil. XIX Sulsel dan Sulbar
20. BPTD Wil. XX Sulteng
21. BPTD Wil. XXI Gorontalo
22. BPTD Wil. XXII Sulut
23. BPTD Wil. XXIII Maluku
24. BPTD Wil. XXIV Maluku Utara
25. BPTD Wil. XXV Papua dan Papua Barat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) TIPE A



C. Sumber Daya Manusia

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten pada triwulan III tahun 2021 adalah sebanyak 342 orang, dengan uraian sebagai berikut :

No	UNIT KERJA	PNS	PPNPN	JUMLAH	TENAGA KESEHATAN	TOTAL
1	Kantor Induk	23	54	77	1	78
2	Satpel Pelabuhan	4	39	43	0	3
3	Satpel Terminal Merak	5	57	62	1	63
4	Satpel Terminal Pakupatan	4	63	67	1	68
5	Satpel Terminal Labuan	3	30	34	0	34
6	Satpel Terminal Lebak	3	25	28	0	28
7	Satpel UPPKB Cimanuk	1	9	10	0	10
8	Satpel UPPKB Cikande	1	17	18	0	18
TOTAL		44	295	339	3	342

D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- 1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - a. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - b. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - c. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

- 2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

3) PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- b. Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPLJSKB dan BPTD).

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki wilayah kerja 2 Provinsi.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (Over Dimension Over Loading);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2021 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

E. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- C. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- E. Sistematika Laporan
- F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- A. Tahapan Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran

F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2	SK2		IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan	%	0

				Minimum (SPM) di terminal tipe-A		
		Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	14
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	0
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

CASCADING DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020-2024

STAKEHOLDER'S PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS (SS1) Terwujudnya KonektivitasTransportasi Nasional	SASARAN STRATEGIS (SS2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	SASARAN STRATEGIS (SS3) Meningkatnya Keselamatan Transportasi
CUSTOMER'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP1) Terwujudnya KonektivitasTransportasi Nasional IKP1: Rasio Konektivitas Transportasi Darat IKP5: Rasio Konektivitas Perkotaan	SASARAN PROGRAM (SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan IKP1: IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Darat IKP6: OTP Transportasi SDP IKP7: OTP Transportasi Perkotaan	SASARAN PROGRAM (SP3) Meningkatnya Keselamatan Transportasi IKP1: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan IKP2: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000 Pelayaran
INTERNAL PROCESS'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP1) Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum IKP1: Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan		
LEARN & GROWTH'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik IKP1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan		

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 63.644.118.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	14
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0

			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	0
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional

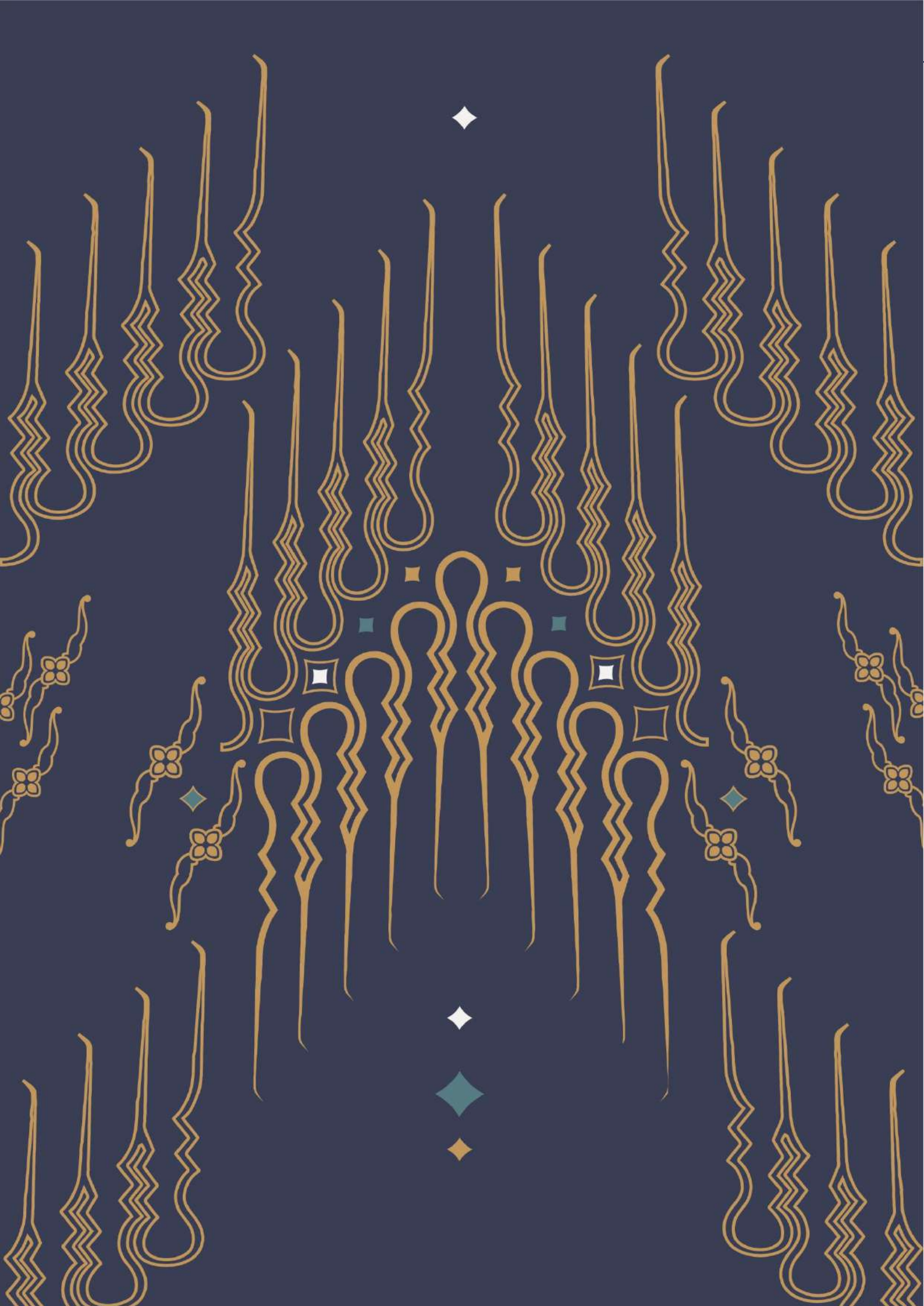
Dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional maka *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan. *Refocusing* dan realokasi belanja dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di akhir Triwulan I Tahun 2021 berupaya melakukan revisi terhadap perjanjian kinerja dalam rangka menyelaraskan dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tujuan revisi pada perjanjian kinerja dan dokumen terkait diharapkan dapat selaras dengan dinamika kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka penanganan krisis.

Tabel Perubahan Pagu Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Akselerasi PEN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	7.098.656.000	7.098.656.000	6.348.656.000
Belanja Barang	54.041.983.000	42.317.925.000	42.317.925.000
• RM	49.457.373.000	37.733.315.000	37.733.315.000
• PNBP	4.584.610.000	4.584.610.000	4.584.610.000
Belanja Modal	27.264.641.000	16.289.986.000	16.289.986.000
• RM	27.264.641.000	16.289.986.000	16.289.986.000
• PNBP	0	0	0
• SBSN	0	0	0
TOTAL	Rp88.405.280.000	Rp65.706.567.000	Rp64.956.567.000

I.



Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan





Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Presentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Program (SP) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten maka diperoleh data Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten adalah sebesar **79,87%**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran program sebagaimana tampak pada tabel berikut.

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			Realisasi Keuanga n (Rp)	Capaian Keuanga n (%)	
				TARGE T KINERJ A	REALISA SI KINERJA	CAPAIA N KINERJ A	TARGE T KINERJ A	REALISA SI KINERJA	CAPAIA N KINERJ A	TARGE T KINERJ A	REALIS ASI KINERJ A	CAPAIA N KINERJ A			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Tranpsortasi					100%				100%			100%		
IKK 1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	24,9	24,9	100%	49,8	49,8	100%	74,7	74,7	100%	1.719.931.976	65,14 %	
IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	4	1	1	100%	2	2	100%	3	3	100%	9.071.856.216	70,22 %	
IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 1.5	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1.163.658.837	61,95 %	
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					100%				100%	100%				
IKK 2.1	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 2.2	Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimun (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	30	30	100%	60	60	100%	90	90	100%	150.160.000	68,25 %	
SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi					100%				100%	100%				
IKK 3.1	Prsentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	22,5	22,5	100%	45	45	40%	67,5	67,5	100%	16.132.198.400	99,45%	
IKK 3.2	Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90	22,5	22,5	100%	45	45	0	67,5	67,5	0	104.925.800	87 %	
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	14	0	0	0	0	0	0	14	14	100%	3.566.586.000	93,01 %	
IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosssialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Penguji Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	14,3	14,3	100%	14,3	14,3	100%	42,9	42,9	100%	736.296.000	98,17 %	
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	

SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%			100%		100%			
IKK 5.1	Kualiatas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	22,5	22,5	100%	45	45	100%	67,5	67,5	100%	3.326.230.691	74,48 %
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100%			100%		100%			
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	22,5	22,5	100%	45	45	100%	67,5	67,5	100%	10.750.408.497	75 %
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100%			100%		100 %			
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						100%			100%		100 %			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						9								
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						10								

Tabel II. 1 Capaian IKP dan SP Triwulan III Tahun 2021

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan triwulan II Tahun 2021, berdasarkan perjanjian kinerja dari 19 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, terdapat 9 (Sembilan) IKK berstatus hijau dan 10 (Sepuluh) IKK berstatus merah.

Penjelasan capaian IKK untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung menggunakan 6 (Enam) IKK, yaitu:

- IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
- IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda
- IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi
- IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
- IKK 1.5 Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
- IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

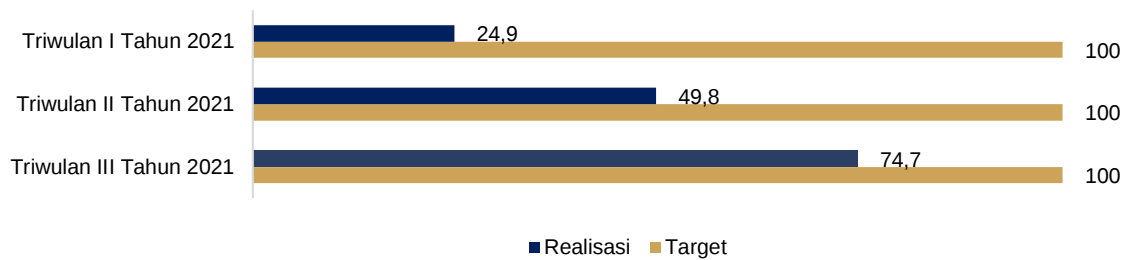
SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SAT UAN	TAR GET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
					TAR GET KIN ERJ A	REALI SASI KINE RJA	CAP AIA N KINE RJA	TAR GET KIN ERJ A	REALI SASI KINE RJA	CAP AIA N KINE RJA	TAR GET KIN ERJ A	REALI SASI KIN ERJ A	CAPA IAN KINE RJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						100 %			100 %			100 %
IKK 1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	24,9	24,9	100 %	49,8	49,8	100 %	74,7	74,7	100 %	
IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Loka si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Loka si	4	1	1	100 %	2	2	100 %	3	3	100 %	
IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Loka si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 1.5	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Loka si	1	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	

Tabel II. 1 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan triwulan I tahun 2021 sebesar 24,9%, triwulan II tahun 2021 sebesar 49,8%, maka capaian kinerja mencapai 74,7%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.



Grafik II. 1.1 Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan III senilai Rp. 1.719.931.976 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 1.719.931.976 atau mencapai 100%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

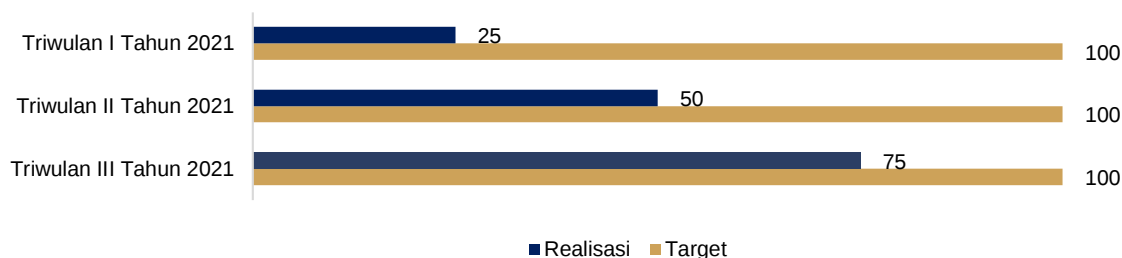
IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

IKK 1.3 Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi dengan target 4 lokasi dan capaian pada triwulan I tahun 2021 yaitu 1 lokasi, triwulan II tahun 2021 yaitu 2 lokasi, maka capaian kinerja triwulan III yaitu 3 lokasi. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.



Grafik II. 1.3 Capaian IKK Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi target Triwulan III senilai Rp. 9.071.856.216 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 9.071.856.216 atau mencapai 100%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan Monitoring Terminal Tipe-A sesuai dengan jadwal yang telah disusun
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

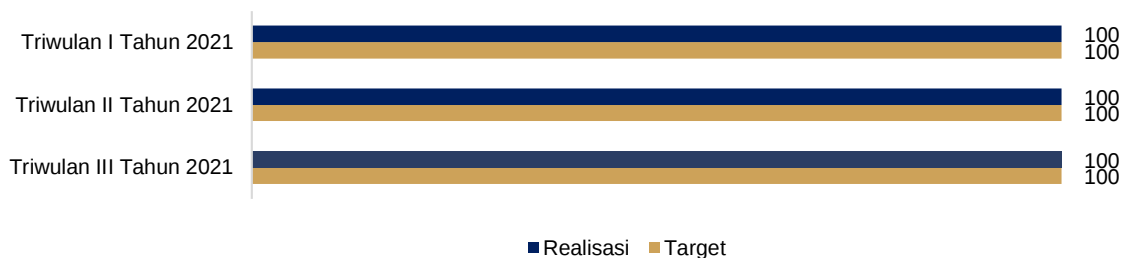
IKK 1.5 Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

Kinerja Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Jumlah Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dengan target 1 lokasi dan capaian pada triwulan I tahun 2021 sebesar 100%, triwulan II tahun 2021 sebesar 100%, maka capaian kinerja triwulan III mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.



Grafik II. 1.6 Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Uji Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Jumlah Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi target Triwulan III senilai Rp. 1.164.658.837 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 1.164.658.837 atau mencapai 100%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan Monitoring Pelabuhan SDP yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menggunakan 3 (Tiga) IKK, yaitu:

- IKK 2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A
 IKK 2.2 Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A
 IKK 2.3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				SAT UA N	TAR GET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
						TAR GET KIN ERJ A	REALI SASI KINER JA	CAPA IAN KINE RJA	TAR GET KIN ERJ A	REALIS ASI KINERJ A	CAP AIA N KIN ERJ A	TARG ET KINE RJA	RE ALI SASI KIN ERJ A	CAPA IAN KINE RJA
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat						100 %				100 %	100%		
IK K 2.1	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IK K 2.2	Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IK K 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimun (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	30	30	100 %	60	60	100 %	90	90	100 %		

Tabel II. 2 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

IKK 2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

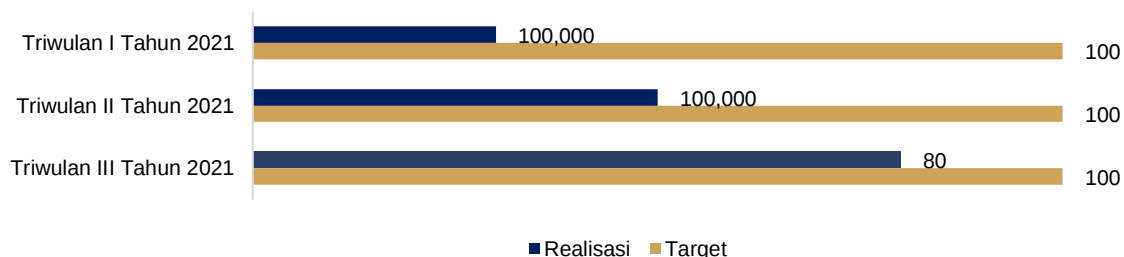
IKK 2.2 Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

Kinerja Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

IKK 2.3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP target 100% capaian pada triwulan I tahun 2021 sebesar 30%, triwulan II tahun 2021 sebesar 50%, maka capaian kinerja triwulan III mencapai 80%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK umlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.



Grafik II. 2.3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP target Triwulan III senilai Rp. 150.160.000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 150.160.000 atau mencapai 100%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

3. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menggunakan 8 (Delapan) IKK, yaitu:

IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
IKK 3.2	Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan
IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)
IKK 7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

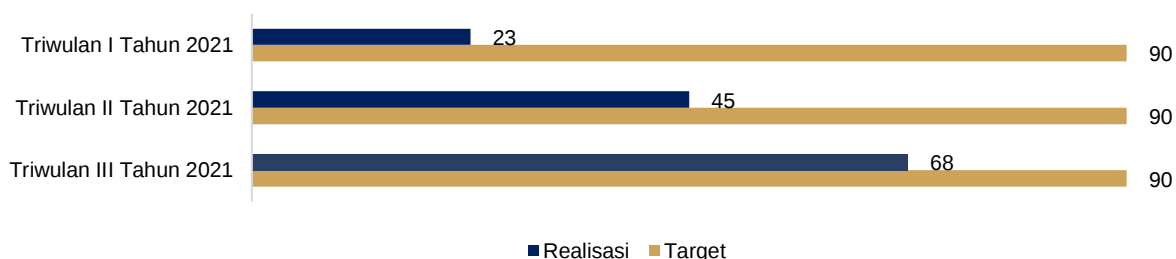
SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
				TAR GET KIN ERJ A	REALI SASI KINER JA	CAPA IAN KINE RJA	TAR GET KIN ERJ A	REALIS ASI KINERJ A	CAP AIA N KIN ERJ A	TAR GET KIN ERJ A	REAL ISAS I KINE RJA	CAPA IAN KINE RJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi						100 %			100 %	100%		
IKK 3.1	Prsentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	22,5	22,5	100 %	45	45	40 %	67,5	67,5	100 %
IKK 3.2	Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	90	22,5	22,5	100 %	45	45	0	67,5	67,5	0
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Loka si	14	0	0	0	0	0	0	14	14	100 %
IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Loka si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosssialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Oran g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Penguji Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	14,3	14,3	100 %	14,3	14,3	100 %	42,9	42,9	100 %
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelajaran SDP	Loka si	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0

Tabel III. 3 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

IKK 3.1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal target 90% capaian pada triwulan I tahun 2021 sebesar 22,5%, triwulan II tahun 2021 sebesar 45%, maka capaian kinerja triwulan III mencapai 67,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK umlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.



Grafik II. 3.1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,5}{90} \times 100\% = 75\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Uji Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal target Triwulan III senilai Rp. 16.132.198.400 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 16.132.198.400 atau mencapai 90%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana pihak ke-3 (kontraktor) dan pengawas pekerjaan (supervise) agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan capaian prestasi dan rencana pembayaran atau termin sesuai kontrak pekerjaan
- Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

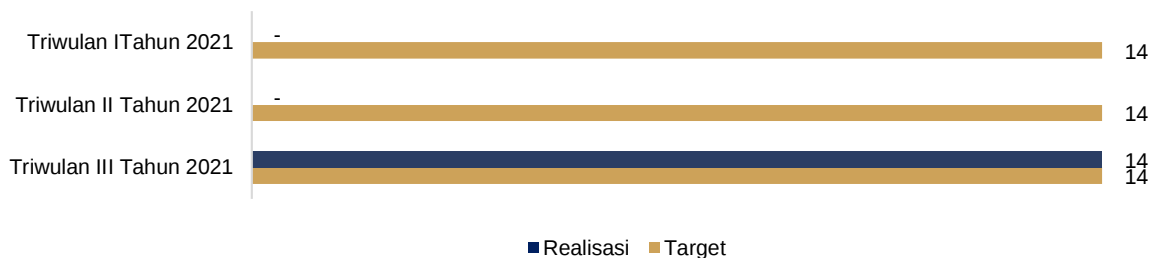
IKK 3.2 Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

Kinerja Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass dan Batas Kecepatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass dan Batas Kecepatan target 14 Lokasi capaian pada triwulan I tahun 2021 dan triwulan II tahun 2021 yaitu 0 lokasi, maka capaian kinerja triwulan III mencapai 14 lokasi. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass dan Batas Kecepatan.



Grafik II. 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, dan Batas Kecepatan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, dan Batas Kecepatan Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, dan Batas Kecepatan Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, dan Batas Kecepatan target Triwulan III senilai Rp. 3.566.586.000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 3.566.586.000 atau mencapai 100%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana pihak ke-3 (kontraktor) dan pengawas pekerjaan (supervise) agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan capaian prestasi dan rencana pembayaran atau termin sesuai kontrak pekerjaan
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif tidak dilaksanakan pada tahun berjalan.

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

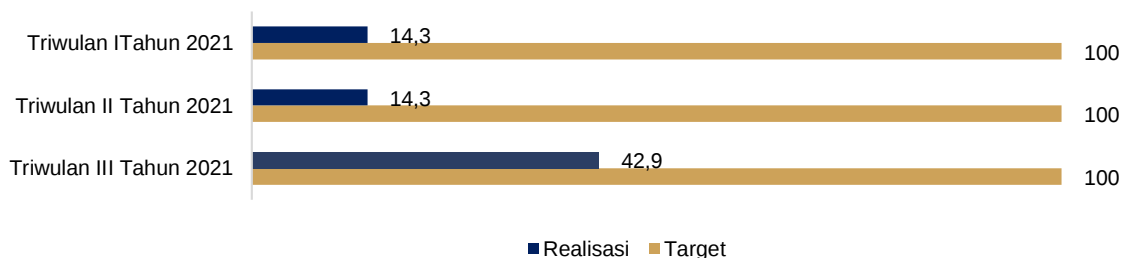
IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Penguji Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)

Kegiatan Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE) tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

IKK 7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor target 100% pada triwulan I tahun 2021 sebesar 14,3%, triwulan II tahun 2021 sebesar 14,3%, maka capaian kinerja triwulan III mencapai 42,9%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan .



Grafik II. 7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{42,9}{42,9} \times 100\% = 100\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor target Triwulan III senilai Rp. 736.296.000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 736.296.000 atau mencapai 100%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

4. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menggunakan 1 (Satu) IKK, yaitu:

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

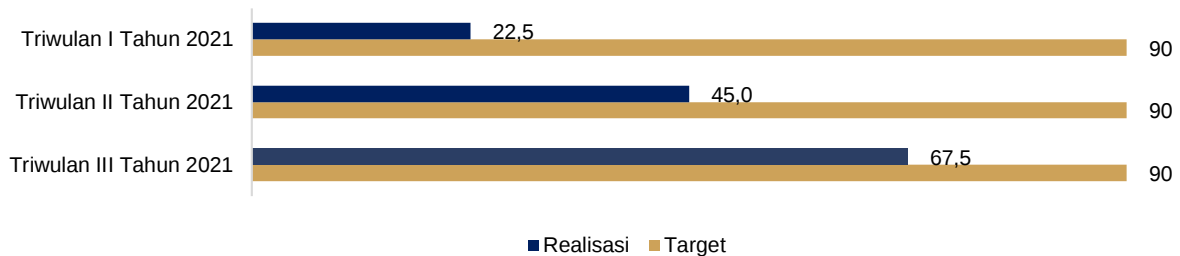
SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			
				TAR GET KIN ERJ A	REALI SASI KINER JA	CAPA IAN KINE RJA	TAR GET KIN ERJ A	REALIS ASI KINERJ A	CAP AIA N KIN ERJ A	TAR GET KIN ERJ A	REAL ISAS I KINE RJA	CAPA IAN KINE RJA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Tranportasi Darat					100 %			100 %		100%		
IKK 5.1	Kualiatas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat		Nilai	90	22,5	22,5	100 %	45	45	100 %	67,5	67,5	100 %

Tabel II. 4 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat target nilai 90% pada triwulan I tahun 2021 sebesar 22,5%, triwulan II tahun 2021 sebesar 45%, maka capaian kinerja triwulan III mencapai 67,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat



Grafik II. 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,5}{90} \times 90\% = 75\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat target Triwulan III senilai Rp. 3.326.230.691 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 3.326.230.691 atau mencapai 90%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

5. Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten menggunakan 1 (Satu) IKK, yaitu:

IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

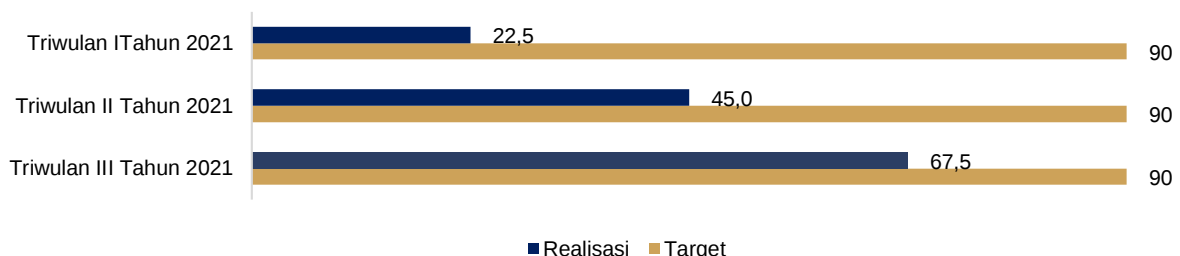
SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			
				TAR GET KIN ERJ A	REALI SASI KINER JA	CAPA IAN KINE RJA	TAR GET KIN ERJ A	REALIS ASI KINERJ A	CAP AIA N KIN ERJ A	TAR GET KIN ERJ A	REAL ISAS I KINE RJA	CAPA IAN KINE RJA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100 %			100 %		100%		
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat		Nilai	90	22,5	22,5	100 %	45	45	100 %	67,5	67,5	100 %

Tabel II. 4 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat target nilai 90% pada triwulan I tahun 2021 sebesar 22,5%, triwulan II tahun 2021 sebesar 45%, maka capaian kinerja triwulan III mencapai 67,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat



Grafik II. 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,5}{67,5} \times 90\% = 90\%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat target Triwulan III senilai Rp. 10.750.408.497 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2021 Rp. 10.750.408.497 atau mencapai 90%

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana pihak ke-3 (kontraktor) dan pengawas pekerjaan (supervise) agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan capaian prestasi dan rencana pembayaran atau termin sesuai kontrak pekerjaan
2. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

C. Realisasi Anggaran

1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2021 sebesar **Rp. 88.405.280.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	83.820.670.000	94,81%
PNBP	Rp.	4.584.610.000	0,51%
SBSN	Rp.	0	0%
Total	Rp.	88.405.280.000	100,00%

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	345.339.287	4,86%
Belanja Barang	Rp.	1.807.295.250	3,34%
Belanja Modal	Rp.	0	0%
Total	Rp.	88.405.280.000	100,00%

Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tanggal 19 Februari 2021 dari sebesar **Rp. 88.405.280.000,-** menjadi sebesar **Rp. 65.706.567.000,-** dengan rincian berikut.

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	61.121.957.000	93%
PNBP	Rp.	4.584.610.000	0,69%
SBSN	Rp.	0	0%
Total	Rp.	65.706.567.000	100,00%

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	1.096.345.967	15,44%
Belanja Barang	Rp.	8.104.618.172	19,15%
Belanja Modal	Rp.	2.863.486.800	17,58%
Total	Rp.	65.706.567.000	100,00%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2021 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar **Rp. 65.706.567.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan II TA. 2021 adalah sebesar **Rp. 64.956.567.000,-** dengan rincian sebagai berikut.

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	60.371.957.000	92,94%
PNBP	Rp.	4.584.610.000	0,70%
SBSN	Rp.	0	0%
Total	Rp.	64.956.567.000	100,00%

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	6.348.656.000	9,77%
Belanja Barang	Rp.	42.317.925.000	65,15%
Belanja Modal	Rp.	16.289.986.000	25,08%
Total	Rp.	64.956.567.000	100,00%

Pada Triwulan Ke III terdapat perubahan pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA.2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai Triwulan II **Rp. 64.956.567.000** berubah di Triwulan III menjadi **Rp. 63.644.118.000** dengan rincian sebagai berikut;

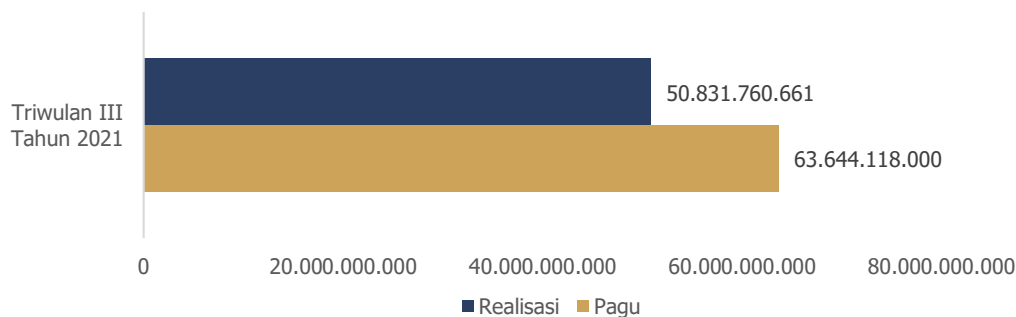
Belanja Pegawai	Rp.	6.058.656.000	9,77%
Belanja Barang	Rp.	41.295.476.000	65,15%
Belanja Modal	Rp.	16.289.986.000	25,08%
Total	Rp.	63.644.118.000	100,00%

2. Realisasi Anggaran

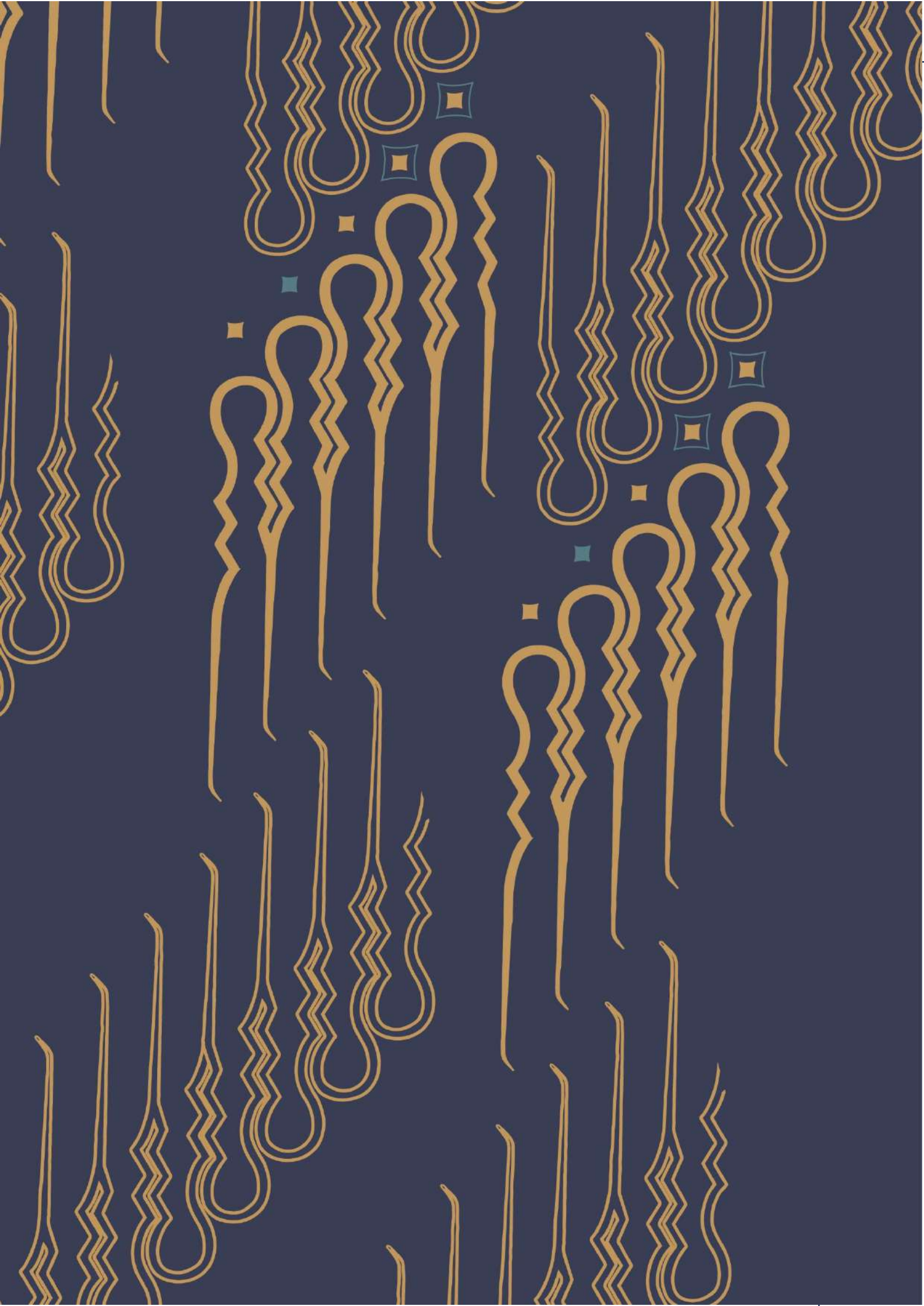
Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 50.831.760.661,- atau mencapai 79,87% dari total pagu sebesar Rp. 63.644.118.000,-.

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	6.058.656.000	4.060.959.845	67,03%
2	Belanja Barang	41.295.476.000	30.575.265.416	74,04%
3	Belanja Modal			
	-Rupiah Murni	16.289.986.000	16.195.535.400	99,42%
	-PLN			
TOTAL		63.644.118.000	50.831.760.661	79,87%

Tabel II. 4 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2021



Grafik II. 2 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan III Tahun 2021





Bab III

Penutup





**BPTD WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN
SATPEL PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK**



Bab III

Penutup

A. Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.